

PEDOMAN TEKNIS PETUGAS PEMETA

PEMETAAN DAN PEMUTAKHIRAN
MUATAN WILAYAH KERJA STATISTIK
SENSUS PENDUDUK 2020



BADAN PUSAT STATISTIK

PEDOMAN TEKNIS PETUGAS PEMETA

PEMETAAN DAN PEMUTAKHIRAN
MUATAN WILAYAH KERJA STATISTIK
SENSUS PENDUDUK 2020



Sensus
Penduduk
2020



BADAN PUSAT STATISTIK

PEDOMAN TEKNIS PETUGAS PEMETA

PEMETAAN DAN PEMUTAKHIRAN MUATAN WILAYAH KERJA STATISTIK
SENSUS PENDUDUK 2020

No. Publikasi: 03140.1902

Katalog BPS: 1401010

Ukuran Buku: 17.6 cm x 25 cm

Jumlah Halaman: xii + 122 Halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik

Penyunting:

Subdirektorat Pengembangan Pemetaan Statistik

Subdirektorat Pengembangan Kerangka Sampel

Desain *Cover*:

Subdirektorat Pengembangan Pemetaan Statistik

Diterbitkan oleh:

© Badan Pusat Statistik

Dicetak oleh:

Badan Pusat Statistik

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.



KATA PENGANTAR

Sensus Penduduk 2020 (SP2020) akan dilaksanakan kembali oleh BPS pada tahun 2020. Salah satu upaya dalam mencapai data berkualitas adalah tersedianya kerangka induk wilayah kerja statistik yang mutakhir. Kerangka induk yang dibuat BPS selama ini terdiri dari peta dan muatan blok sensus (BS). Untuk melengkapi berbagai metode yang akan digunakan dalam sensus dan survei selanjutnya, maka kerangka induk tersebut akan dilengkapi dengan informasi Satuan Lingkungan Setempat (SLS). Dengan demikian, metode kegiatan agak berbeda dengan kegiatan Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilayah Kerja Statistik (wilkerstat) yang sudah dilakukan sebelumnya.

Buku Pedoman Teknis Petugas Pemeta ini memuat uraian tentang konsep definisi, metodologi, alur kerja, dan tata cara pengisian dokumen. Pemutakhiran peta dan muatan serta kelengkapan isian dokumen disesuaikan dengan ketentuan berlaku sehingga dapat digunakan untuk kegiatan pengolahan peta digital.

Dengan selesainya buku pedoman ini, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran di Pusat dan Daerah yang telah berperan serta dalam kegiatan Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilkerstat SP2020 tahun 2019. Selamat bekerja.

Jakarta, Januari 2019

Deputi

Bidang Metodologi dan Informasi Statistik



M. Ari Nugraha



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	III
DAFTAR GAMBAR	V
DAFTAR TABEL	IX
DAFTAR LAMPIRAN	XI
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Landasan Hukum	3
1.4. Jenis Instrumen dan Perangkat	3
1.5. Jadwal Kegiatan	5
BAB 2. KONSEP DAN DEFINISI	7
2.1. Konsep dan Definisi Terkait Wilkerstat	7
2.2. Konsep dan Definisi Terkait Muatan	19
2.3. Konsep dan Definisi Terkait Peta Digital	24
BAB 3. METODOLOGI	27
3.1. Petugas	27
3.2. Tugas dan Fungsi Petugas	28
3.3. Alur Kegiatan	30
3.4. Jadwal Lapangan	31
3.5. Mekanisme Perhitungan Bangunan Sensus	32
3.6. Hasil Kegiatan	37
BAB 4. ALUR KERJA PEMETA	39
4.1. Bagan Alur Kerja Pemeta	39
4.2. Instrumen yang Digunakan	40
4.3. Identifikasi Wilayah	40

4.4. Rekonsiliasi Pengecekan Daftar SLS	40
4.5. Mengunjungi Ketua SLS.....	41
4.6. Menelusuri Batas SLS	44
4.7. Menghitung Bangunan Sensus	49
4.8. Memetakan dan Menghitung Muatan Pada Bangunan Bertingkat dan Kawasan Niaga	51
4.9. Memetakan dan Menghitung Muatan Pada Wilayah Non SLS.....	52
4.10. Rekonsiliasi Hasil Pengecekan Batas dan Isian Dokumen.....	54
4.11. Rekonsiliasi Finalisasi Dokumen	55
4.12. Hasil Lapangan.....	56
BAB 5. TATA CARA PENGISIAN DOKUMEN.....	57
5.1. Daftar Identifikasi Wilayah Tugas.....	57
5.2. Tata Cara Pengisian Rekap SLS (SP2020-RS)	58
5.3. Tata Cara Pengisian Lembar Kerja Perhitungan Muatan (LK-M).....	66
BAB 6. APLIKASI WILKERSTAT	73
6.1. Pengguna Aplikasi.....	73
6.2. Menu Aplikasi	73
6.3. Login dan Registrasi Aplikasi Wilkerstat	76
6.4. Cara Bekerja Secara <i>Offline</i>	78
6.5. Cara Membuat Project.....	80
BAB 7. PERMASALAHAN KHUSUS	87



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kode Wilayah BS (14 Digit)	17
Gambar 2.2. Kode Wilayah SLS/Non SLS (14 Digit)	18
Gambar 2.3. Contoh 4 digit Kode Identitas SLS/Non SLS (hijau adalah SLS, merah adalah non SLS)	18
Gambar 2.4. Contoh Rumah Tinggal yang Dihitung Sebagai 1 BSTT	19
Gambar 3.1. Petugas Lapangan	27
Gambar 3.2. Alur Kegiatan	30
Gambar 3.3. Contoh Rumah Kontrakan yang Masing-masing Pintu Dihitung Sebagai 1 BSTT	33
Gambar 3.4. Contoh Kos-kosan Bertingkat yang Masing-masing Kamar Dihitung Sebagai 1 BSTT	33
Gambar 3.5. Contoh Apartemen	33
Gambar 3.6. Contoh Rumah Susun	33
Gambar 3.7. Contoh Kantor	34
Gambar 3.8. Contoh Kompleks Perkantoran	35
Gambar 3.9. Contoh Gedung Perkantoran	36
Gambar 3.10. Contoh Pasar	36
Gambar 3.11. Contoh Pertokoan	37
Gambar 3.12. Contoh Mall	37
Gambar 4.1. Alur Kerja Pemeta	39
Gambar 4.2. Contoh Batas Non SLS di SP2020WA-Sementara	42
Gambar 4.3. Contoh Batas Non SLS	42
Gambar 4.4. Penggambaran Batas SLS di SP2020WA-Sementara	43
Gambar 4.5. Penggambaran Batas SLS di SP2020WB-Sementara	44
Gambar 4.6. Penggambaran <i>Landmark</i> Batas SLS	45
Gambar 4.7. <i>Landmark</i> Batas SLS (<i>Imagine</i>)	45

Gambar 4.8. Contoh Foto Lebih dari Satu Infrastruktur Dalam Satu Kawasan	47
Gambar 4.9. SLS Hasil mosaik	49
Gambar 4.10. Contoh Segmen di 1 BS dan 1 SLS	50
Gambar 4.11. Contoh Segmen di 1 BS dan 3 SLS	50
Gambar 4.12. Contoh Segmen di 1 SLS di 2 BS	50
Gambar 4.13. Segmen dalam 1 SLS di 2 BS (Digabung)	51
Gambar 4.14. Contoh segmen Bangunan Bertingkat	52
Gambar 4.15. Contoh wilayah non SLS di Peta WB	52
Gambar 4.16. Contoh wilayah non SLS di Peta WA	53
Gambar 4.17. Contoh simbolisasi di peta yang sudah final	54
Gambar 4.18. Contoh simbolisasi segmen non SLS di peta yang sudah final	54
Gambar 4.19. Contoh simbolisasi peta SP2020WA-Sementara yang sudah final	55
Gambar 5.1. Contoh daftar identifikasi wilayah tugas	58
Gambar 5.2. Contoh Blok I rincian 1-4	59
Gambar 5.3. Contoh Blok I rincian 5	59
Gambar 5.4. Contoh Blok I rincian 6	59
Gambar 5.5. Contoh Blok I rincian 7	59
Gambar 5.6. Contoh Blok I rincian 8	60
Gambar 5.7. Contoh Blok I rincian 9	60
Gambar 5.8. Contoh Blok II keterangan petugas	60
Gambar 5.9. Contoh pengisian kode SLS	61
Gambar 5.10. Contoh pengisian kode identitas wilayah	62
Gambar 5.11. Contoh pengisian wilayah 2 hirarki SLS dibawah desa/kelurahan	63
Gambar 5.12. Contoh pengisian wilayah 3 hirarki SLS dibawah desa/kelurahan	63
Gambar 5.13. Contoh pengisian wilayah yang tidak ada SLS dibawah desa/kelurahan	64
Gambar 5.14. Contoh pengisian wilayah yang tidak tercakup di SLS manapun	64
Gambar 5.15. Contoh pengisian identitas wilayah dan Pemeta di lembar LK-M	66
Gambar 5.16. Contoh pengisian nomor segmen	67
Gambar 5.17. Contoh pengisian muatan dominan	68
Gambar 5.18. Contoh pengisian jumlah KK	68
Gambar 5.19. Contoh pengisian BSTT, BSBTT, dan BSTT kosong	69
Gambar 5.20. Contoh pengisian jumlah muatan	69
Gambar 5.21. Contoh pengisian jumlah bangunan sensus ekonomi	70

Gambar 5.22. Contoh pengisian jumlah masing-masing kolom	70
Gambar 6.1. Alur Login Aplikasi Wilkerstat	77
Gambar 7.1. Pengisian SLS pada Blok III	88
Gambar 7.2. Peta WA Desa Seberaya berdasar batas BS dan batas segmen.....	88
Gambar 7.3. Daftar Identifikasi Wilayah	89
Gambar 7.4. LK-M untuk Pemeta 1	90
Gambar 7.5. LK-M untuk Pemeta 2	91
Gambar 7.6. Pengawas menjumlahkan total muatan Pemeta 1 dan Pemeta 2	92
Gambar 7.7. Hasil penyalinan LK-M ke dalam SP2020-RD.....	93
Gambar 7.8. Menuliskan informasi per wilayah non SLS halaman pertama	93
Gambar 7.9. Menuliskan informasi per wilayah non SLS halaman selanjutnya	94
Gambar 7.10. Contoh Segmen yang terbentuk	94
Gambar 7.11. Hasil penghitungan muatan dalam LK-M	95
Gambar 7.12. Contoh pengkodean danau	96
Gambar 7.13. contoh pengkodean hutan.....	97
Gambar 7.14. contoh pengkodean pulau tidak berpenghuni	97
Gambar 7.15. pengkodean infrastruktur tanpa menggunakan android.....	98
Gambar 8.1. Sebaran desa di Kecamatan Banjarmasin Utara	100
Gambar 8.2. Contoh distribusi wilayah BS Pemeta di dalam satu desa.....	100
Gambar 8.3. Contoh distribusi wilayah SLS Pemeta di dalam satu desa	102



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jadwal Kegiatan Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilkerstat.....**Error!**
Bookmark not defined.

Tabel 2.1. Kode Pulau/Kepulauan 15

Tabel 2.2. Kode Wilayah SLS/Non SLS 17

Tabel 2.3. Kode *Landmark* Infrastruktur Desa/Kelurahan 25



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Contoh Penentuan Wilayah Tugas.....	99
Lampiran 2. Contoh Daftar Identifikasi Wilayah Tugas	103
Lampiran 3. Contoh SP2020 RS Tingkat 2	104
Lampiran 4. Contoh SP2020 RS Tingkat 3	108
Lampiran 5. Contoh SP2020-RS dengan Wilayah Non SLS.....	112
Lampiran 6. Contoh SP2020 Lembar Kerja Perhitungan Muatan (LK-M)	115
Lampiran 7. Contoh SP2020 RD	116
Lampiran 8. Contoh SP2020WA-Sementara.....	120
Lampiran 9. Contoh SP2020WB-Sementara.....	121



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sensus Penduduk (SP) 2020 adalah sensus penduduk ke-7 sejak Indonesia merdeka. Sejak tahun 2018, persiapan SP2020 bidang kerangka induk sudah dilakukan. Salah satu unit kerja yang bertanggung jawab atas penyusunan dan pengembangan kerangka induk BPS adalah Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei Badan Pusat Statistik (BPS) adalah melaksanakan penyusunan dan pengembangan kerangka induk. Kerangka induk yang lengkap, akurat, relevan, dan mutakhir pada wilayah kerja statistik (wilkerstat) akan dijadikan sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan sensus dan survei BPS. Wilkerstat terdiri dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan dan blok sensus (BS).

Kerangka induk yang dibuat BPS selama ini terdiri dari peta dan muatan BS. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan kerangka induk terus dilakukan. Pada prinsipnya, kerangka induk yang dibangun adalah untuk memenuhi kebutuhan kegiatan sensus dan survei BPS yang menggunakan berbagai macam metode statistik.

Tahun 2018, Kegiatan Penyusunan Peta Dasar dan Informasi Muatan Wilkerstat SP2020 telah menghasilkan peta dasar SP2020 yang terdiri dari peta desa/kelurahan dan BS. Selain itu juga telah dilakukan *ground check/ground truth* pada 15.420 BS terpilih. Tahun 2019, peta dasar tersebut akan digunakan dalam kegiatan Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilkerstat SP2020. Peta dasar ini akan dilengkapi dengan informasi satuan lingkungan setempat (SLS).

Pelaksanaan Kegiatan Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilkerstat SP2020 dilakukan di seluruh desa pada 514 kabupaten/kota. Kegiatan ini terdiri dari dua tahapan, yaitu tahap pertama kegiatan Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan

Wilkerstat, serta tahap kedua kegiatan Pengolahan Peta dan dokumen muatan wilkerstat. Dokumen muatan wilkerstat yang diolah adalah SP2020-RS dan SP2020-RD. Selanjutnya kegiatan tahap kedua disebut Pengolahan Peta dan RD.

Pada tahap pertama, kegiatan Pemetaan dan Muatan Wilkerstat merupakan kegiatan lapangan, yang dilakukan dengan membawa print out peta dasar untuk penggambaran batas SLS dan batas desa/kelurahan di lapangan. Selain itu, petugas dibekali dengan Aplikasi Wilkerstat (mobile) untuk memastikan posisi dan lokasi SLS, serta pengambilan foto dan titik koordinat landmark batas SLS dan infrastruktur desa/kelurahan. Selanjutnya, petugas akan menghitung muatan SLS pada wilayah BS yang menjadi beban tugasnya.

Setelah kegiatan lapangan, tahap kedua adalah kegiatan Pengolahan Peta dan RD. Kegiatan ini terdiri dari pengolahan peta digital hasil pemetaan lapangan, dan pengolahan data informasi muatan wilkerstat SLS. Hasil pengolahan peta digital adalah *layout* peta desa/kelurahan dan SLS. Pencetakan *layout* peta ini dilakukan sesuai dengan keperluan. Selanjutnya, untuk keperluan metode sensus dan survei yang memerlukan unit sampling terkecil di bawah desa/kelurahan, akan dibentuk wilayah *cluster* yang muatannya seragam. Kegiatan ini direncanakan akan dilakukan tahun 2020.

Buku ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis pemeta pada tahapan kegiatan lapangan. Buku ini memuat tentang konsep dan definisi, metodologi, alur kegiatan, tata cara pengisian dokumen, aplikasi wilkerstat, dan permasalahan khusus. Dengan demikian, pemeta dapat melakukan kegiatan sesuai aturan, tata cara, dan kriteria yang baku.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilkerstat SP2020 adalah:

1. Mengembangkan *statistical spatial framework* sebagai jembatan integrasi informasi statistik dan geospasial.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas ketersediaan kerangka induk wilayah kerja statistik sebagai dasar pelaksanaan lapangan SP2020.

Tujuan kegiatan Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilkerstat SP2020 adalah:

1. Menyusun peta wilayah kerja statistik untuk SP2020.
2. Mendapatkan kerangka induk yang mutakhir untuk SP2020.
3. Mendukung kebijakan satu peta Indonesia.

1.3. Landasan Hukum

Landasan hukum pelaksanaan kegiatan Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilkerstat SP2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
4. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;
5. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah;
6. DIPA BPS Nomor DIPA-054.01.1.018576/2019 tanggal 5 Desember 2018.

1.4. Jenis Instrumen dan Perangkat

Instrumen dan perangkat yang digunakan dalam kegiatan Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilkerstat SP2020 adalah sebagai berikut:

1. **Peta SP2010/ST2013/Peta-WA** selanjutnya disebut **Peta-WA**, adalah sketsa peta wilayah desa/kelurahan yang dibuat pada *updating* rutin, *updating* peta ST2013 atau pemetaan SP2010 yang dapat digunakan sebagai referensi wilayah.
2. **Peta SP2010/ST2013/Peta-WB** selanjutnya disebut **Peta-WB**, adalah sketsa peta BS yang dibuat pada *updating* rutin, *updating* peta ST2013 atau pemetaan SP2010 yang dapat digunakan sebagai referensi wilayah.

3. **SP2020WA-Sementara**, adalah peta hasil *overlay* antara peta *Google* dengan peta digital desa/kelurahan yang sudah dimutakhirkan pada kegiatan Penyusunan Peta Dasar dan Informasi Muatan Wilkerstat SP2020 tahun 2018.
4. **SP2020WB-Sementara**, adalah peta hasil *overlay* antara peta *Google* dengan peta digital BS yang sudah dimutakhirkan pada kegiatan Penyusunan Peta Dasar dan Informasi Muatan Wilkerstat SP2020 tahun 2018.
5. **Daftar PWA** (Perubahan Wilayah Administrasi), merupakan daftar yang memuat perubahan wilayah (pemecahan/penggabungan/perubahan kode atau nama) pada level kabupaten/kota sampai dengan desa/kelurahan. Dokumen ini diisi oleh Seksi IPDS BPS kabupaten/kota.
6. Daftar Pemutakhiran Muatan Wilkerstat
 - a. **Daftar Identifikasi Wilayah Tugas**, adalah daftar yang memuat master BS yang akan digunakan oleh pemeta melakukan penelusuran dan identifikasi wilayah tugas.
 - b. **SP2020-RS** (Rekap SLS), adalah daftar untuk menampung informasi SLS dan wilayah non SLS dalam satu desa/kelurahan.
 - c. **SP2020-RD** (Rekap Desa), adalah daftar untuk menampung informasi muatan SLS/non SLS dalam satu desa/kelurahan berdasarkan informasi penghitungan muatan (LK-M).
 - d. **LK-M** (Lembar Kerja Penghitungan Muatan), adalah lembar pembantu untuk menuliskan jumlah muatan ketika pemeta melakukan penghitungan muatan SLS/non SLS. Muatan SLS/non SLS dihitung per segmen.
 - e. **Form Laporan Kegiatan Pengawas**, adalah daftar yang digunakan untuk menuliskan kegiatan pengawas selama melakukan tugas/fungsi pengawasannya beserta permasalahan yang dihadapi dan pemecahannya.
7. **Aplikasi Wilkerstat**, adalah aplikasi Android yang digunakan untuk membantu pengenalan wilayah desa/kelurahan/BS dan untuk pengambilan foto *landmark* yang memiliki koordinat geografis.
8. **Peta digital wilkerstat**, adalah peta wilkerstat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, BS dan peta RW (khusus DKI Jakarta) dalam format digital atau biasa disebut *shapefile*.

1.5. Jadwal Kegiatan

Jadwal kegiatan Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilkerstat SP2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1. Jadwal Kegiatan

Kegiatan	Tanggal
BPS Kabupaten/Kota	
Tahap 1 (Lapangan)	
1. Pelatihan petugas	8 Maret – 12 April 2019
2. Pelaksanaan Lapangan	22 April – 22 Mei 2019
Tahap 2 (Pengolahan)	
1. Pengolahan SP2020-RD dan SP2020-RS	6 Mei – 17 Juni 2019
2. Pengolahan peta digital hasil lapangan	23 Mei – 25 Juli 2019
Layouting peta	13 September – 30 Oktober 2019
BPS Provinsi	
Tahap 1 (Lapangan)	
1. Pelatihan Inda	4 – 16 Maret 2019
Tahap 2 (Pengolahan)	
1. Pelatihan petugas pengolahan peta dan RD	22 April – 3 Mei 2019
2. Kompilasi dan revalidasi RD	17 Juni – 14 juli 2019
3. Pengiriman RD	1 – 14 Juli 2019
4. Kompilasi dan sinkronisasi peta digital	22 Juli – 8 Agustus 2019
BPS Pusat	
Tahap 1 (Lapangan)	
1. Pelatihan Innas	25 Februari – 1 Maret 2019
Tahap 2 (Pengolahan)	
1. Pelatihan innas pengolahan peta dan RD	8 – 12 April 2019
2. Sinkronisasi dan pengecekan peta digital	1 Agustus – 12 September 2019



BAB 2. KONSEP DAN DEFINISI

Bab ini menjelaskan konsep dan definisi yang digunakan dalam kegiatan Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilkerstat SP2020. Konsep dan definisi dijelaskan dalam tiga subbab yaitu:

1. konsep dan definisi terkait wilkerstat,
2. konsep dan definisi terkait muatan,
3. konsep dan definisi terkait peta digital.

2.1. Konsep dan Definisi Terkait Wilkerstat

2.1.1. Wilayah Kerja Statistik

Wilayah kerja statistik terdiri dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, dan SLS. Pada pedoman ini, wilkerstat yang dibahas hanya pada tingkat desa/kelurahan dan wilayah di bawah desa/kelurahan, yaitu satuan lingkungan setempat (SLS).

a. Desa

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa).

b. Kelurahan

Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31

Tahun 2006 tentang pembentukan, penghapusan, dan penggabungan kelurahan).

c. Nagari

Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam daerah Provinsi Sumatera Barat, yang terdiri dari himpunan beberapa suku yang mempunyai wilayah dengan batas-batas tertentu, mempunyai harta kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumahtangganya, dan memilih pimpinan pemerintahannya. Kampung atau dengan nama lain yang setingkat dan terdapat dalam Nagari adalah bagian dari wilayah Nagari (Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000). Dalam MFD, nagari setara dengan desa.

Contoh wilayah setingkat desa/kelurahan/nagari lainnya yaitu Gampong (Aceh), Kampung (Lampung, Kalimantan Timur, dan Papua), Pekon (Lampung), dan Lembang (Sulawesi Selatan).

d. Blok Sensus

Blok sensus (BS) adalah wilayah kerja pencacahan yang merupakan bagian dari suatu wilayah desa/kelurahan. BS dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu:

1. BS Biasa (B)

BS Biasa memiliki muatan sekitar 100 (minimum 80 dan maksimum 120) rumahtangga/bangunan sensus bukan tempat tinggal (BSBTT)/bangunan sensus tempat tinggal kosong (BSTT kosong) atau kombinasi ketiganya dalam satu hamparan (tidak dipisahkan oleh BS lain) baik di daratan maupun perairan, dan diperkirakan tidak akan berubah dalam jangka waktu lebih kurang 10 tahun. Dalam kegiatan ini jumlah rumah tangga didekati dengan bangunan sensus tempat tinggal (BSTT).

2. BS Khusus (K)

BS Khusus merupakan BS yang akses masuk ke lokasinya terbatas untuk umum (membutuhkan perizinan khusus) dan dikelola oleh suatu institusi/lembaga (yayasan/pemerintah) misalnya asrama/barak militer, pondok pesantren dan lembaga pemasyarakatan.

3. BS Persiapan (P)

BS Persiapan adalah wilayah kosong yang terpisah dari pemukiman seperti sawah, perkebunan, hutan, rawa, termasuk wilayah kosong yang telah

direncanakan akan digunakan untuk daerah pemukiman penduduk atau tempat usaha.

Pada kegiatan ini, BS digunakan sebagai menentukan wilayah tugas petugas lapangan.

e. Satuan Lingkungan Setempat (SLS)

Satuan Lingkungan Setempat adalah satuan wilayah di bawah desa/kelurahan. Satuan wilayah ini biasanya ditetapkan dengan peraturan daerah atau peraturan desa, dimana dalam peraturan tersebut menyebutkan tingkatan dan banyaknya satuan wilayah di bawah desa beserta batas-batasnya. Tingkatan dan nama SLS bisa berbeda antar daerah, seperti rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), jorong, dusun, dan lingkungan. Batas SLS bisa berupa batas alam/buatan, tetapi ada juga yang hanya berupa dinding rumah atau batas imajiner.

Dusun/lingkungan adalah bagian wilayah dalam desa/kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa). Dusun merujuk pada pemerintahan desa dan lingkungan merujuk pada kelurahan dimana masing-masing dipimpin oleh Kepala Dusun atau Kepala Lingkungan.

Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) adalah organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa dan kelurahan.

Jorong/Korong/Kampung adalah bagian dari wilayah Nagari menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018. Sedangkan Jurong adalah bagian wilayah dalam Gampong (desa) yang merupakan lingkungan kerja Pelaksanaan Pemerintahan Gampong di wilayah Aceh. Selain itu terdapat Pedukuhan yang merupakan satuan tugas kewilayahan pembantu Lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di DI Yogyakarta.

2.1.2. Wilayah Non SLS

Wilayah non SLS adalah bagian wilayah desa yang tidak termasuk dalam cakupan SLS. Wilayah tersebut bisa berupa wilayah bervegetasi pertanian, wilayah bervegetasi bukan pertanian, lahan terbuka, kawasan terbangun pemukiman, kawasan terbangun bukan pemukiman, dan wilayah perairan.

1. **Wilayah bervegetasi pertanian**, adalah daerah yang arealnya diusahakan untuk budidaya tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura. Vegetasi alami telah dimodifikasi/dihilangkan dan diganti dengan tanaman antropogenik atau memerlukan campur tangan manusia. Contohnya:

- Sawah, adalah areal pertanian yang digenangi air atau diberi air baik dengan teknologi pengairan, tadah hujan, lebak atau pasang surut yang dicirikan oleh pola pematang, dengan ditanami jenis tanaman pangan berumur pendek.



- Ladang, tegal atau huma, adalah areal yang digunakan untuk kegiatan pertanian dengan jenis tanaman semusim di lahan kering.



- Perkebunan, adalah lahan yang digunakan untuk kegiatan pertanian tanpa pergantian tanaman selama 2 tahun.



2. **Wilayah bervegetasi bukan pertanian**, adalah daerah yang arealnya tidak diusahakan untuk budidaya tanaman pangan dan hortikultura. Contohnya:

- Hutan lahan kering, adalah hutan yang tumbuh dan berkembang di habitat lahan kering yang dapat berupa hutan dataran rendah, perbukitan, pegunungan atau hutan tropis dataran tinggi.



- Hutan lahan basah, adalah hutan yang tumbuh berkembang pada habitat lahan basah berupa rawa, termasuk rawa payau dan rawa gambut.



- Semak dan belukar, adalah kawasan lahan kering yang telah ditumbuhi berbagai vegetasi alami heterogen dan homogen yang tingkat kerapatannya jarang hingga rapat.



- Padang rumput, alang-alang, dan sabana, adalah areal terbuka yang didominasi oleh jenis rumput tidak seragam.



- Rumput rawa, adalah rumput yang berhabitat di daerah rawa.



3. **Lahan terbuka**, adalah lahan tanpa tutupan baik yang bersifat alami, semi alami maupun artifisial. Contohnya lahan terbuka pada kaldera (kawah hasil letusan gunung berapi), lahar dan lava, hamparan pasir pantai, beting pantai (bagian darat terluar ke arah laut), gumuk pasir, dan lain-lain.



4. **Kawasan terbangun pemukiman**, adalah daerah yang mengalami substitusi penutup lahan alami maupun semi alami dengan areal yang digunakan sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian, dan tempat kegiatan yang mendukung kehidupan orang.



5. **Kawasan terbangun bukan pemukiman**, adalah daerah yang mengalami substitusi penutup lahan alami maupun semi alami dengan penutup lahan buatan yang biasanya bersifat kedap air dan relatif permanen. Contohnya bandar udara, pelabuhan laut, kawasan stasiun kereta, pertokoan, pasar, mall, perkantoran, dan lain-lain.



6. **Wilayah perairan**, adalah semua kenampakan perairan, termasuk laut, waduk, terumbu karang dan padang lamun. Contohnya:
- Danau atau waduk, adalah areal perairan dengan penggenangan air yang dalam dan permanen serta penggenangan dangkal dan fungsinya.



- Rawa, adalah genangan air tawar atau air payau yang luas dan permanen di daratan.



- Sungai, adalah tempat mengalirnya air yang bersifat alamiah.



- Anjir pelayaran, adalah tempat mengalirnya air, bersifat artifisial, dan berasosiasi dengan laut atau pantai dan kegiatan pelayaran.



- Terumbu karang, adalah kumpulan fauna laut yang berkumpul dan membentuk terumbu karang.



Wilayah desa (dan setingkatnya) dapat terbagi habis seluruhnya dalam wilayah SLS, dapat juga terbagi habis dalam wilayah SLS dan non SLS, ataupun seluruhnya terbagi habis dalam wilayah non SLS. Penjabarannya adalah sebagai berikut:

- a. Desa seluruh wilayahnya terbagi habis dalam SLS sesuai tingkatan-tingkatan yang ada.
- b. Desa terbagi dalam wilayah SLS dan non SLS, artinya wilayah desa sebagian masuk sebagai wilayah yang memiliki tingkatan wilayah di bawah desa (SLS) dan sebagian wilayah tidak tercakup dalam SLS manapun di desa tersebut.
- c. Desa terbagi habis dalam wilayah non SLS, artinya tidak ada tingkatan wilayah lagi di bawah wilayah desa.

Contoh detail dapat dilihat pada Bab 4 Alur Kerja Pemeta.

2.1.3. Kode Wilayah Kerja Statistik

Kode wilayah kerja statistik dibuat sedemikian rupa mengikuti tingkatan dari wilayah administrasi pemerintahan yang bersangkutan, mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/ kelurahan, BS dan SLS.

a. Desa/Kelurahan

Kode wilayah desa/kelurahan terdiri dari 10 angka (digit) dengan rincian sebagai berikut:

1. Digit **pertama** menunjukkan nomor urut wilayah pulau/kepulauan. Pengurutan nomor ini didasarkan pada letak geografis kepulauan Indonesia yang membentang dari barat ke timur. Kode tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1. Kode Pulau/Kepulauan

Nama Pulau/Kepulauan	Kode	Keterangan
Sumatera	1	
	2	
Jawa	3	
	4	
Bali, Nusa Tenggara	5	Nomor Cadangan
Kalimantan	6	
Sulawesi	7	

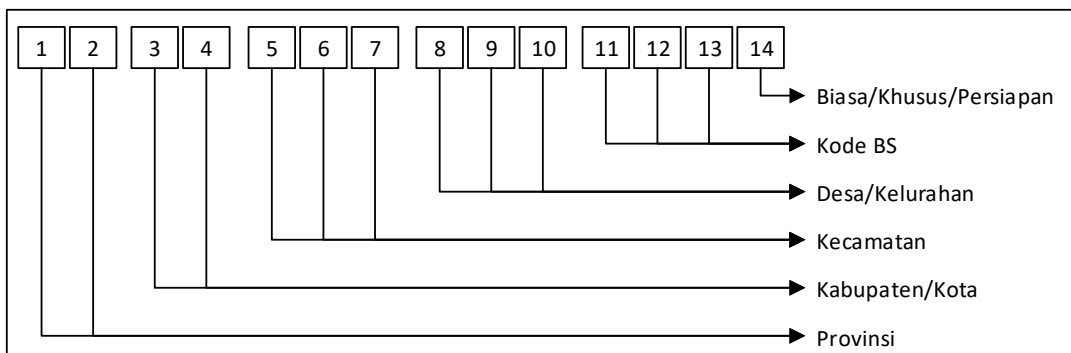
Maluku	8	
Papua	9	

2. Digit **kedua** menunjukkan nomor urut provinsi/daerah istimewa/daerah khusus pada suatu pulau atau kepulauan tertentu.
3. Digit **ketiga dan empat** menunjukkan nomor urut kabupaten/kota pada provinsi/daerah istimewa/daerah khusus. Nomor urut untuk kabupaten adalah 01, 02, 03, ..., 69, sedangkan nomor urut untuk kota adalah 71, 72, 73, dan seterusnya.
4. Digit **kelima, enam, dan tujuh** menunjukkan nomor urut dan kode wilayah kecamatan. Dalam hal ini, digit kelima dan enam menunjukkan nomor urut kecamatan pada suatu kabupaten/kota dan digit ketujuh menunjukkan apakah kecamatan yang bersangkutan merupakan kecamatan pecahan atau bukan. Bila tidak ada pemecahan kecamatan, digit kelima, enam, dan tujuh pada kode kecamatan yang membentuk kabupaten/kota adalah 010, 020, 030, ..., 690, sedangkan kecamatan yang membentuk kota administratif diberi kode 710, 720, 730, ... Jika digit ketujuh bukan 0 (nol), berarti kecamatan tersebut merupakan kecamatan pecahan.
5. Digit **kedelapan, sembilan, dan sepuluh** menunjukkan nomor urut desa/kelurahan atau UPT/PMT yang berada pada suatu kecamatan tertentu. Nomor urut untuk desa/kelurahan adalah 001, 002, 003, dan seterusnya.

b. Blok Sensus

Kode wilayah BS terdiri dari 14 angka (digit) dengan rincian sebagai berikut:

1. Digit **pertama** sampai **sepuluh** menunjukkan kode wilayah desa/kelurahan.
2. Digit **sebelas, dua belas, tiga belas** menunjukkan kode BS, yaitu 001, 002, 003, dan seterusnya.
3. Digit **empat belas** menunjukkan jenis BS, yaitu BS Biasa (B), BS Khusus (K), dan BS Persiapan (P).
4. Contoh kode BS: 1101010001001B



Gambar 1.1. Kode Wilayah BS (14 Digit)

c. Kode Identitas SLS/Non SLS

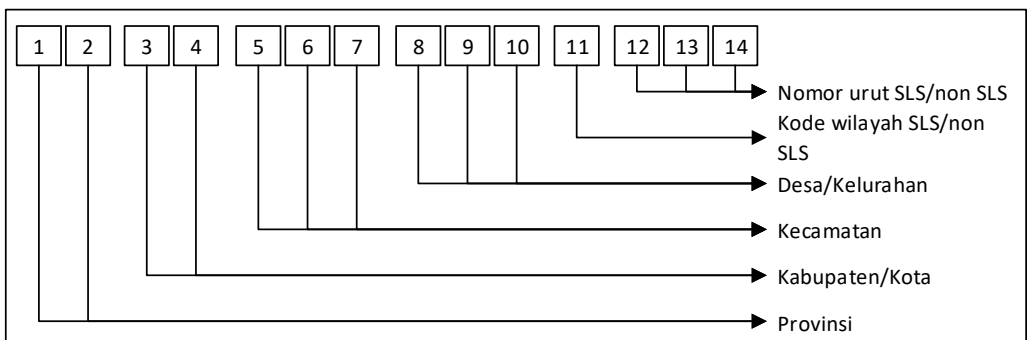
Kode identitas SLS/non SLS terdiri dari 14 angka (digit) dengan rincian sebagai berikut:

1. Digit **pertama** sampai **sepuluh** menunjukkan kode wilayah desa/kelurahan.
2. Digit **sebelas** menunjukkan kode wilayah SLS/non SLS seperti pada klasifikasi yang telah dijelaskan pada subbab sebelumnya, sebagai berikut:

Tabel 1.2. Kode Wilayah SLS/Non SLS

Wilayah SLS/Non SLS	Kode
Wilayah SLS	0
Wilayah bervegetasi pertanian	1
Wilayah bervegetasi bukan pertanian	2
Lahan terbuka	3
Kawasan terbangun pemukiman	4
Kawasan terbangun bukan pemukiman	5
Wilayah perairan	6

3. Digit **dua belas, tiga belas, dan empat belas** menunjukkan nomor urut wilayah SLS/non SLS mulai 001, 002, 003, dan seterusnya
4. Contoh kode identitas SLS/non SLS: 11010100010001



Gambar 1.2. Kode Wilayah SLS/Non SLS (14 Digit)



Gambar 1.3. Contoh 4 digit Kode Identitas SLS/Non SLS (hijau adalah SLS, merah adalah non SLS)

2.1.4. Segmen

Segmen adalah wilayah yang mempunyai batas jelas baik batas alam atau buatan seperti sungai/kali, jalan, gang/lorong. Luas segmen tidak dibatasi oleh jumlah muatan tetapi mengacu pada batas jelas yang ada.

Penomoran segmen terdiri dari 4 (empat) digit. Digit pertama adalah huruf S. Digit kedua, ketiga, dan keempat menunjukkan nomor urut segmen pada suatu wilayah (SLS/non SLS) dari barat daya secara zigzag. Contohnya S001, S002, S003, dan seterusnya.

2.1.5. Batas Alam dan Buatan

Batas alam adalah batas wilayah yang terbentuk oleh alam, misalnya sungai, pantai dan danau. Sedangkan batas buatan adalah batas wilayah yang dibentuk oleh manusia, misalnya jalan raya, rel kereta api, dan saluran irigasi.

2.2. Konsep dan Definisi Terkait Muatan

2.2.1. Bangunan Fisik

Bangunan fisik adalah tempat berlindung tetap maupun sementara, yang mempunyai dinding, lantai dan atap, baik digunakan untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal.

Bangunan yang **tidak digunakan** untuk tempat tinggal maupun usaha, dianggap sebagai satu bangunan fisik jika luas lantainya lebih dari atau sama dengan 10m². Sedangkan bangunan yang **digunakan** untuk tempat tinggal atau usaha, walaupun luas lantainya kurang dari 10m², tetap dianggap satu bangunan fisik. Khusus tempat usaha, yang tidak mempunyai dinding dianggap sebagai satu bangunan fisik.

2.2.2. Bangunan Sensus

Bangunan sensus adalah sebagian atau seluruh bangunan fisik yang mempunyai dinding, atap dan pintu keluar/masuk sendiri dalam satu kesatuan fungsi/penggunaan. Menurut penggunaannya bangunan sensus dibagi menjadi:

1. Bangunan sensus tempat tinggal (BSTT), yaitu bangunan sensus yang seluruhnya digunakan untuk tempat tinggal.



Gambar 1.4. Contoh Rumah Tinggal yang Dihitung Sebagai 1 BSTT

2. Bangunan sensus bukan tempat tinggal (BSBTT), yaitu bangunan sensus yang digunakan/diperuntukkan bukan untuk tempat tinggal, misalnya toko, restoran, ruko, rukan, salon, tempat ibadah, rumah sakit, pabrik, sekolah, gedung kantor, balai pertemuan, dan sebagainya. Pada bangunan tempat usaha seperti pasar dan mal, tiap kios dihitung sebagai satu BSBTT.
3. Bangunan sensus tempat tinggal kosong (BSTT kosong) adalah bangunan sensus yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal usaha tetapi tidak/belum dihuni. Misalnya di suatu perumahan beberapa rumah telah selesai dibangun dan belum ada penghuninya atau tidak dihuni lagi. Batasannya adalah bangunan sudah/masih berdiri lengkap dengan dinding, atap dan lantai.
4. Bangunan sensus kegiatan ekonomi (BSKEKO) adalah sebagian atau seluruh bangunan fisik yang mempunyai pintu keluar/masuk sendiri dalam satu kesatuan fungsi/penggunaan yang digunakan untuk melakukan kegiatan dengan tujuan menghasilkan barang/jasa untuk dijual atau ditukar dengan barang lain, dan ada seseorang atau lebih yang bertanggungjawab dan punya kewenangan untuk mengelola kegiatan tersebut.

2.2.3. Muatan

Muatan yang dimaksud dalam kegiatan ini adalah jumlah total bangunan sensus, yaitu penjumlahan dari jumlah bangunan sensus tempat tinggal (BSTT), jumlah bangunan sensus bukan tempat tinggal (BSBTT) dan jumlah bangunan sensus tempat tinggal kosong (BSTT kosong).

2.2.4. Kriteria Muatan Dominan

1. **Permukiman biasa**, adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan (UU No. 1 Tahun 2011).
2. **Perumahan mewah/elite/*real estate***, adalah rumah komersial dengan harga jual lebih besar dari 6 (enam) kali harga jual rumah sederhana. Rumah sederhana adalah rumah umum yang dibangun di atas tanah dengan luas lantai dan harga jual sesuai ketentuan pemerintah (Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 7 Tahun 2013).

3. **Permukiman kumuh**, adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat (UU No. 1 Tahun 2011).
4. **Apartemen/kondominium/flat**, adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 1 Tahun 2018).
5. **Kos-kosan/kontrakan**, adalah kamar atau rumah yang disewa dengan sistem pembayaran bulanan atau tahunan.
6. **Pesantren/barak/asrama/sekolah**, adalah suatu wilayah yang penghuninya homogen dari sisi kepentingan atau tujuan tinggal, seperti pesantren atau diseminari untuk pendidikan, barak militer untuk keamanan, dormitori perusahaan sebagai mess/tempat tinggal pekerja perusahaan.
7. **Pertokoan/pasar/perkantoran**.

Toko, adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual (Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 70 Tahun 2013).

Toko Modern, adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Departement Store, Hypermarket ataupun grosir berbentuk perkulakkan (Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 70 Tahun 2013).

Pasar, adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional, Pertokoan, Mall, Plasa, Pusat Perdagangan maupun sebutan lainnya (Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 70 Tahun 2013).

Pasar Tradisional, adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, BUMN, dan BUMD, termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa Toko, Kios, Los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau

koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar (Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 70 Tahun 2013).

Perkantoran, adalah sebutan untuk tempat yang digunakan untuk perniagaan atau perusahaan yang dijalankan secara rutin. Kantor bisa hanya berupa suatu kamar atau ruangan kecil maupun bangunan bertingkat tinggi. Perkantoran adalah kumpulan dari kantor.

8. **Pusat perbelanjaan modern/mal**, adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang (Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 70 Tahun 2013).

9. **Kawasan industri/Sentra Industri.**

Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri (Peraturan Pemerintah No. 142 Tahun 2015).

Sentra Industri Kecil dan Menengah adalah sekelompok Industri Kecil dan Menengah dalam satu lokasi/tempat yang terdiri dari paling sedikit lima unit usaha yang menghasilkan produk sejenis, dan/atau melakukan proses produksi yang sama (Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018).

10. **Hotel/tempat rekreasi.**

Hotel adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan (Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 53 Tahun 2013).

Tempat rekreasi adalah tempat dimana seseorang/sekelompok orang melakukan aktivitas yang berfungsi menyegarkan kembali kondisi fisik/mental, beristirahat sejenak dari aktivitas rutin sehari-hari dengan tujuan memperoleh kesenangan/kegembiraan atau sekedar melepas lelah. Tempat rekreasi dapat berupa taman rekreasi, tempat bermain anak-anak/*playground*, pemancingan, dan sebagainya.

11. **Lainnya (hutan/kebun, pulau kosong, danau/waduk/rawa, lahan kosong)** adalah penggunaan lahan dalam bentuk lainnya, baik dalam lingkup pertanian maupun non pertanian, seperti hutan/kebun, pulau kosong, danau/waduk/rawa, lahan kosong.

2.2.5. Akses Menuju Desa

1. **Transportasi umum bertrayek tetap**, adalah kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, serta lintasan tetap (Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 35 Tahun 2003).
2. **Transportasi umum dengan frekuensi teratur**, adalah kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang, yang mempunyai jadwal tetap (Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 35 Tahun 2003).
3. **Transportasi tidak bertrayek**, adalah kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan, tetapi tidak mempunyai lintasan dan jadwal yang tetap (Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 108 Tahun 2017).
4. **Transportasi sewa**, adalah usaha pengangkutan penumpang dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu, dalam wilayah operasi yang tidak dibatasi oleh wilayah administratif dan tarif berdasarkan kesepakatan antara pengguna dengan penyedia angkutan. Termasuk layanan carter, wisata, dan angkutan carter musiman lainnya serta penyewaan mobil atau angkutan pribadi lainnya dengan sopir. Kelompok ini juga mencakup angkutan sewa bajaj, kancil, bentor dan lain-lain. Kelompok ini tidak mencakup angkutan taksi dan angkutan ojek motor (KBLI 49422).
5. **Biaya transportasi Pergi-Pulang (PP)**, adalah biaya yang harus dikeluarkan dalam menggunakan moda transportasi, dihitung biaya berangkat dan pulang kembali ke tempat asal, baik berupa tarif yang sudah ditentukan maupun biaya sewa.

2.2.6. Kepala Keluarga (KK)

Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Keluarga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai hubungan darah

dan atau orang lain yang tinggal dalam satu rumah/bangunan dan terdaftar dalam Kartu Keluarga. Tanggung jawab keluarga dipegang oleh seorang kepala keluarga. Anggota keluarga adalah orang-orang yang nama dan identitasnya biodatanya tercantum dalam kartu keluarga dan secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga (Buku pedoman pencacahan SP2020).

2.3. Konsep dan Definisi Terkait Peta Digital

2.3.1. Aplikasi Wilkerstat

Aplikasi Wilkerstat adalah aplikasi GIS untuk mengumpulkan, menyajikan, dan berbagi informasi geografis, untuk ponsel dan tablet. Aplikasi Wilkerstat dapat diunduh melalui Google Play Store dan tersedia untuk perangkat yang menjalankan Android 4.0.3 dan yang lebih baru. Dalam kegiatan ini, Aplikasi Wilkerstat digunakan untuk membantu pengenalan wilayah dan untuk pengambilan foto *landmark* yang memiliki koordinat geografis.

2.3.2. Geotagging

Geotagging adalah proses menambahkan identifikasi geografis pada berbagai media, salah satunya adalah menggunakan media foto. *Software Geotagging* dapat berupa *software bundling* pada *smartphone* tipe tertentu. Apabila ingin menginstal *software* tersebut, dapat diunduh dari Google Play Store.

2.3.3. Landmark

Landmark adalah fitur geografis baik alami ataupun buatan manusia. *Landmark* merupakan sesuatu yang mudah dikenali, seperti monumen, bangunan atau struktur lainnya.

Landmark yang dicakup pada Kegiatan Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilkerstat adalah *landmark* di empat titik batas SLS dan *landmark* infrastruktur desa/kelurahan. Pengkodean *landmark* infrastruktur desa/kelurahan adalah sebagai berikut.

Tabel 1.3. Kode *Landmark* Infrastruktur Desa/Kelurahan

No	Kategori	Infrastruktur	Kode
1	Lembaga Pendidikan	TK Negeri	10001
		TK Swasta	10002
		RA/BA Negeri	10003
		RA/BA Swasta	10004
		SD Negeri	10005
		SD Swasta	10006
		MI Negeri	10007
		MI Swasta	10008
		SMP Negeri	10009
		SMP Swasta	10010
		MTs Negeri	10011
		MTs Swasta	10012
		SMU Negeri	10013
		SMU Swasta	10014
		MA Negeri	10015
		MA Swasta	10016
		SMK Negeri	10017
		SMK Swasta	10018
		Perguruan Tinggi Negeri	10019
		Perguruan Tinggi Swasta	10020
2	Lembaga Kesehatan	Rumah sakit	20001
		Rumah sakit bersalin	20002
		Puskesmas rawat inap	20003
		Puskesmas tanpa rawat inap	20004
		Puskesmas pembantu	20005
		Poliklinik/balai pengobatan	20006
		Tempat praktek dokter	20007
		Rumah bersalin	20008
		Tempat praktek bidan	20009
		Poskesdes	20010
		Posyandu	20011
		Polindes	20012
		Apotek	20013

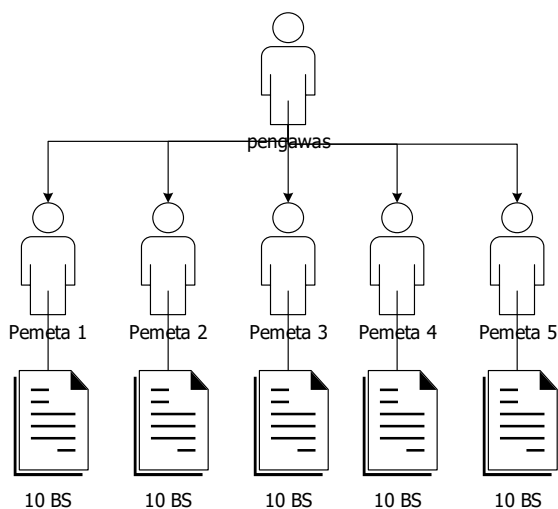
No	Kategori	Infrastruktur	Kode
		Warung jamu/toko herbal/toko obat	20014
3	Lembaga ekonomi	Kelompok pertokoan	30001
		Pasar dengan bangunan permanen	30002
		Pasar dengan bangunan semi permanen	30003
		Pasar tanpa bangunan	30004
		Minimarket	30005
4	Lembaga akomodasi	Restoran/rumah makan	40001
		Warung/kedai makanan minuman	40002
		Hotel	40003
		Penginapan	40004
5	Lembaga keuangan	Bank pemerintah	50001
		Bank swasta	50002
		BPR	50003
6	Lembaga pemerintahan dan Perkantoran	Kantor desa	60001
		Kantor camat	60002
		Kantor bupati/walikota	60003
		Kantor gubernur	60004
7	Tempat Ibadah	Masjid	70001
		Gereja	70002
		Pura	70003
		Wihara/Klenteng	70004

BAB 3. METODOLOGI

3.1. Petugas

Petugas lapangan terdiri dari Pengawas dan Pemeta. Setiap Pengawas rata-rata membawahi 5 orang Pemeta. Masing-masing Pemeta memiliki beban menggambar SLS utuh di wilayah yang berada pada rata-rata 10 BS. Rata-rata petugas juga menggunakan Aplikasi Wilkerstat untuk melakukan *Geotagging* infrastruktur dan batas SLS. Aplikasi tersebut terintegrasi dalam smartphone yang digunakan oleh petugas Pemeta.

Pembagian wilayah kerja Pemeta ditentukan oleh Pengawas dan dikoordinasikan dengan IPDS Kabupaten/Kota. Untuk menjamin adanya komunikasi yang terjalin baik dengan Pengawas, perlu dilakukan pertemuan (rekonsiliasi), minimal 3 (tiga) kali dalam periode lapangan.



Gambar 3.1. Petugas Lapangan

3.2. Tugas dan Fungsi Petugas

Pengawas

Untuk kabupaten/kota tertentu, pengawas dibantu oleh kordinator lapangan (korlap).

Secara umum, pengawas memiliki tugas dan fungsi, sebagai berikut:

1. Mengatur penerimaan dan pembagian instrumen.
2. Konfirmasi batas desa/kelurahan dan informasi SLS ke kantor desa/kelurahan.
3. Mengisi dokumen SP2020-RS.
4. Melakukan rekonsiliasi dengan Pemeta untuk:
 - a. Pengecekan daftar SLS hasil identifikasi lapangan Pemeta dan hasil konfirmasi kantor desa.
 - b. Pengecekan batas wilayah dan isian dokumen.
 - c. Finalisasi dokumen dan peta.
5. Membagi wilayah tugas Pemeta berdasarkan SLS, dan menuliskan identitas wilayah SLS/non SLS ke dalam LK-M untuk dibagikan kepada Pemeta.
6. Melakukan penelusuran batas desa.
7. Memperbaiki batas desa di SP2020WA-Sementara.
8. Melakukan persetujuan (*approval*) *Geotagging landmark* pada aplikasi wilkerstat.
9. Menyalin batas SLS ke SP2020WA-Sementara.
10. Mengisi dokumen SP2020-RD berdasarkan LK-M yang diisi Pemeta.
11. Melakukan rekonsiliasi dengan Pengawas lain jika dalam satu desa/kelurahan lebih dari satu Pengawas.
12. Pengambil keputusan dalam tim dan berkoordinasi dengan Pengawas lain;
13. Mengumpulkan kembali semua instrumen hasil lapangan dan menyerahkan ke BPS kabupaten/kota.
14. Mengisi form laporan kegiatan Pengawas.

Pemeta

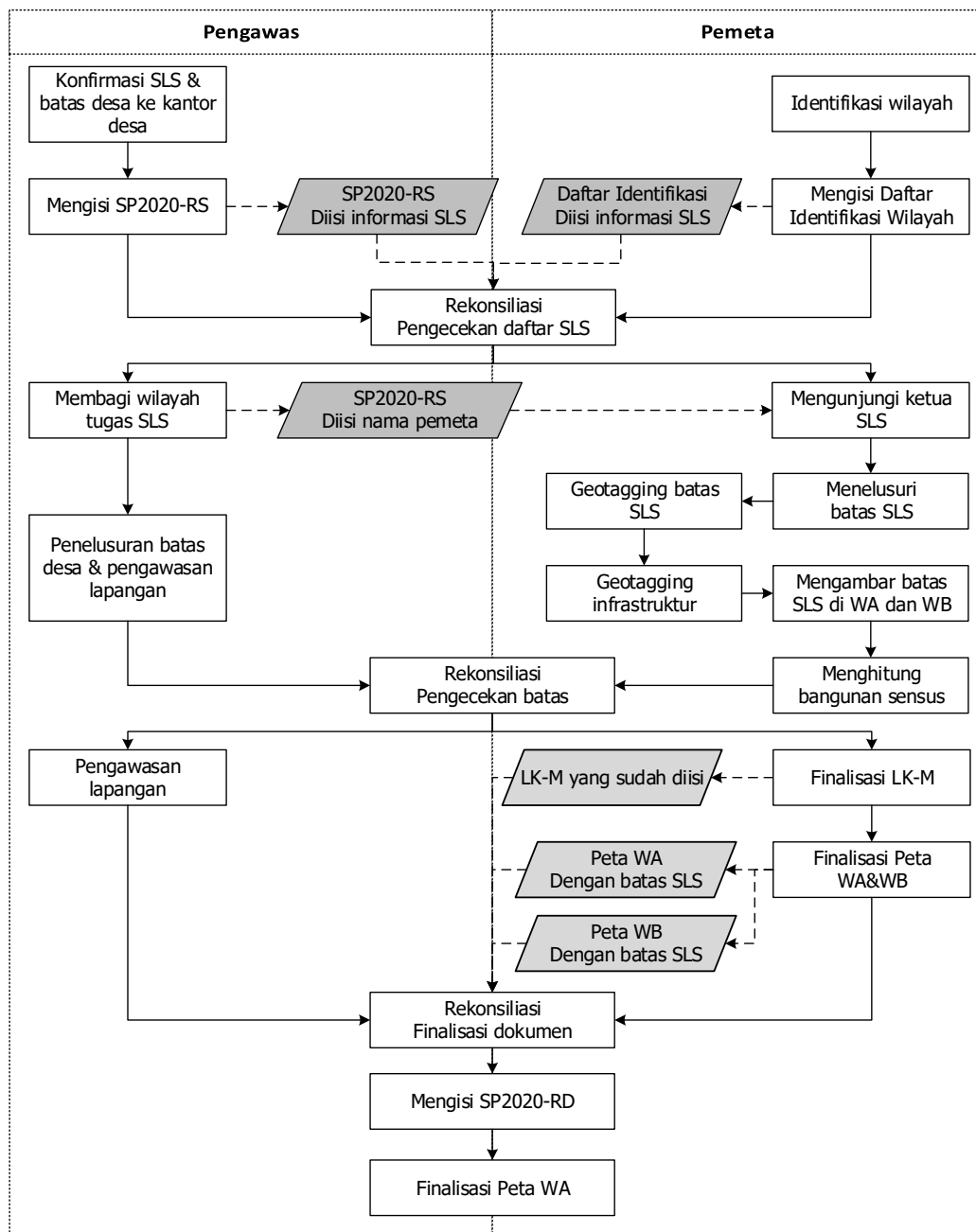
Pemeta secara umum memiliki tugas dan fungsi, sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi awal untuk mengecek SLS yang ada di wilayah kerja BSnya.
2. Mengisi daftar SLS hasil identifikasi menggunakan Daftar Identifikasi Wilayah.
3. Melakukan rekonsiliasi dengan Pengawas untuk:

- a. Pengecekan daftar SLS hasil identifikasi lapangan Pemeta dan hasil konfirmasi kantor desa.
 - b. Pengecekan batas wilayah dan isian dokumen.
 - c. Finalisasi dokumen dan peta.
4. Mengunjungi ketua SLS di wilayah tugasnya untuk melakukan konfirmasi.
 5. Menelusuri batas SLS dan menggambarkannya ke SP2020WA-Sementara dan SP2020WB-Sementara.
 6. Melakukan *Geotagging* menggunakan aplikasi wilkerstat untuk *landmark* batas SLS dan bangunan infrastruktur.
 7. Menggambar segmen dalam SLS pada SP2020WB-Sementara.
 8. Menghitung bangunan sensus dan mengisi LK-M.
 9. Bekerjasama dan berkoordinasi dengan Pemeta di SLS yang bersebelahan.
 10. Berkoordinasi dengan Pengawas.
 11. Mengumpulkan seluruh dokumen ke Pengawas.

3.3. Alur Kegiatan

Alur kegiatan seluruh petugas digambarkan ke dalam diagram alur berikut ini.



Gambar 3.2. Alur Kegiatan

3.4. Jadwal Lapangan

Mengingat kegiatan Pemetaan memiliki rangkaian proses yang bertahap, maka petugas harus mengikuti jadwal kegiatan lapangan berikut ini:

Minggu ke-4 bulan April	
Pengawas: - Melakukan konfirmasi ke kantor desa. - Melakukan Pengawasan lapangan. - Rekonsiliasi 1 untuk pengecekan hasil identifikasi wilayah dari Pemeta, pengecekan daftar SLS (SP2020-RS) & pembagian wilayah tugas.	Pemeta: - Melakukan identifikasi wilayah dan mengisi informasi SLS/non SLS dalam daftar identifikasi wilayah. - Rekonsiliasi 1 untuk pengecekan daftar SLS & pembagian wilayah tugas.
Output: - SP2020-RS yang sudah diisi, diberi nomor Kode Wilayah dan nomor urut SLS/non SLS, nama Pemeta yang bertugas di setiap SLS/non SLS. - LK-M yang sudah ditulis identitas dan kode wilayah SLS/non SLS.	

Minggu ke-1 sampai ke-2 Bulan Mei	
Pengawas: - Pengawasan lapangan bergiliran ke setiap Pemeta. - Melakukan penelusuran batas desa. - Koordinasi lapangan ketika ada permasalahan. - <i>Approval Geotagging</i>. - Rekonsiliasi 2 untuk pengecekan batas & konsistensi dokumen.	Pemeta: - Konfirmasi ketua SLS. - Penelusuran batas SLS/non SLS. - <i>Geotagging</i>. - Perhitungan muatan. - Rekonsiliasi 2 untuk pengecekan batas & konsistensi dokumen.
Output: - Peta SP2020WA & SP2020WB yang sudah digambar dengan pensil oleh Pemeta. - LK-M yang sudah diisi oleh Pemeta. - <i>Geotagging</i> batas dan infrastruktur. - Kesepakatan batas antar SLS/non SLS. - Peta SP2020-WA yang sudah di cek batas desa oleh Pengawas.	
Minggu ke-3 Bulan Mei	
Pengawas: - Pengawasan lapangan bergiliran ke setiap Pemeta. - Koordinasi lapangan ketika ada permasalahan.	Pemeta: - Finalisasi peta dan LK-M. - Rekonsiliasi 3 untuk finalisasi peta dan dokumen di tingkat desa.

- <i>Approval Geotagging</i>. - Pengecekan konsistensi dokumen dan peta Pemeta. - Rekonsiliasi 3 untuk finalisasi peta dan dokumen di tingkat desa.	
Output: - Peta SP2020WA & SP2020WB final yang dari Pemeta. - LK-M final dari Pemeta. - Selesai <i>approval Geotagging</i> oleh Pengawas.	

Minggu ke-4 bulan Mei	
Pengawas: - Finalisasi Peta SP2020WA satu desa. - Finalisasi SP20200RD. - Pengiriman seluruh hasil ke BPS.	Pemeta: - Koordinasi dengan Pengawas.
Output: - Seluruh batas SLS/non SLS tergambar dalam Peta SP2020WA. - Seluruh dokumen sudah diisi dan diperiksa. - Seluruh <i>Geotagging</i> sudah di <i>approve</i> oleh Pengawas.	

3.5. Mekanisme Perhitungan Bangunan Sensus

Bangunan-bangunan khusus seperti kos-kosan, pasar, mall, apartemen dan bangunan bertingkat lainnya di dalamnya memiliki banyak bangunan-bangunan sensus. Perhitungan muatan di dalam bangunan khusus tersebut pendekatannya berbeda dengan bangunan biasa seperti rumah tinggal.

3.5.1. Kos-Kosan

1. Petugas Pemeta mendatangi ketua SLS, tanyakan keberadaan kos-kosan di wilayah SLS tersebut. Jika terdapat kos-kosan, tanyakan lokasi rumah kos tersebut dan perkiraan jumlah kamar yang difungsikan sebagai kamar kos.
2. Pada saat petugas Pemeta mengelilingi SLS untuk menghitung muatan, pada bangunan yang diketahui merupakan bangunan dengan kos-kosan, tanyakan pada penghuni atau pemilik kos mengenai jumlah kamar yang difungsikan sebagai kamar kos. Penghitungannya adalah satu kamar kos dihitung sebagai satu BSTT.

Contohnya kos Az-Zahra memiliki 10 kamar, maka total bangunan sensus kos Az-Zahra berjumlah 10 BSTT. Contoh di atas diberlakukan juga bagi rumah kontrakan dimana satu pintu kontrakan dihitung sebagai satu BSTT.



Gambar 3.3. Contoh Rumah Kontrakan yang Masing-masing Pintu Dihitung Sebagai 1 BSTT



Gambar 3.4. Contoh Kos-kosan Bertingkat yang Masing-masing Kamar Dihitung Sebagai 1 BSTT

3.5.2. Apartemen atau Rumah Susun

1. Datangi pengelola apartemen sebagai narasumber.
2. Tanyakan banyaknya unit yang ada di apartemen, dimana satu unit dihitung sebagai satu BSTT.
3. Tanyakan apakah ada bangunan/unit di kawasan apartemen yang difungsikan sebagai usaha seperti toko, klinik, minimarket, restoran, dan lain-lain. Jika ada, satu usaha dihitung satu BSBTT dan satu BSKEKO.

Contohnya Apartemen Kalibata terdapat 100 unit kamar dan 20 unit restoran, maka total bangunan sensus Apartemen Kalibata berjumlah 100 BSTT, 20 BSBTT, serta 20 BSKEKO.



Gambar 3.5. Contoh Apartemen



Gambar 3.6. Contoh Rumah Susun

3.5.3. Kantor

Kantor yang dimaksud adalah satu bangunan atau beberapa bangunan yang digunakan untuk menjalankan aktivitas perkantoran bagi satu perusahaan atau satu instansi pemerintahan. Mekanisme penghitungannya adalah sebagai berikut:

1. Datangi bagian yang bertanggung jawab/mengerti terhadap kondisi kantor (bagian urusan dalam/rumah tangga perusahaan/kantor) sebagai narasumber.
2. Tanyakan banyaknya fasilitas kantor menurut fungsinya, misalnya untuk ruang kerja, kantor, klinik, lahan parkir.
3. Satu/beberapa fasilitas dengan kesamaan fungsi dihitung sebagai satu BSBTT. Aktivitas usaha seperti toko, minimarket, kantin atau apotik dihitung sebagai satu BSBTT sekaligus satu BSKEKO.
4. Tanyakan juga apakah ada bangunan khusus yang dipakai sebagai tempat tinggal. Misal ada bangunan yang difungsikan sebagai rumah penjaga kantor, maka dihitung satu BSTT.
5. Jika orang yang berkompeten sebagai narasumber tidak dapat ditemui, mintalah ijin untuk melakukan perhitungan bangunan secara mandiri dengan melihat kondisi lingkungan kantor.



Gambar 3.7. Contoh Kantor

3.5.4. Kompleks Perkantoran

Kompleks perkantoran merupakan kumpulan banyak bangunan dalam suatu lokasi atau kawasan tertentu yang digunakan sebagai kantor beberapa perusahaan atau instansi pemerintahan. Mekanisme penghitungannya adalah sebagai berikut:

1. Datangi pengelola kompleks perkantoran sebagai narasumber.
2. Tanyakan berapa banyak kantor/perusahaan yang berlokasi di kompleks tersebut, dimana satu kantor/perusahaan dihitung sebagai satu BSBTT.

3. Tanyakan berapa banyak bangunan selain kantor yang berlokasi di kompleks tersebut, seperti minimarket, poliklinik, toko. Dimana satu bangunan yang digunakan untuk melakukan aktivitas pekerjaanya, dihitung sebagai satu BSBTT. BSBTT yang ada aktivitas ekonominya dihitung juga sebagai BSKEKO.
4. Tanyakan juga apakah ada bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal (karyawan, penjaga, atau penduduk) di dalam kompleks tersebut. Jika ada, satu bangunan dihitung satu BSTT.
5. Bangunan yang fungsinya sebagai bangunan tempat tinggal dan kondisinya kosong (tidak ditinggali) dihitung sebagai BSTT Kosong.
6. Jika orang yang berkompeten sebagai narasumber tidak ditemukan, petugas meminta izin untuk menghitung secara mandiri.



Gambar 3.8. Contoh Kompleks Perkantoran

3.5.5. Gedung Perkantoran

Gedung perkantoran yang dimaksud adalah suatu gedung (biasanya satu gedung bertingkat) dimana difungsikan atau digunakan sebagai kantor bagi beberapa perusahaan atau kantor pemerintahan. Mekanisme penghitungannya adalah sebagai berikut:

1. Datangi pengelola gedung perkantoran setempat, tanyakan banyaknya kantor/perusahaan yang bertempat di gedung perkantoran, bisa dirinci per lantai.
2. Satu bangunan kantor/perusahaan dihitung sebagai satu BSBTT.
3. Jika ada ruang atau lantai digunakan untuk fungsi selain kegiatan kantor, seperti supermarket, klinik, apotek, dan lain-lain, dihitung satu usaha sebagai satu BSBTT sekaligus satu BSKEKO.

Contoh, Gedung City Tower terdiri dari satu Esprit Service Center, satu Samsung Service Center. Total bangunan sensus di Gedung City Tower berjumlah 2 (dua) BSBTT dan 2 (dua) BSKEKO.



Gambar 3.9. Contoh Gedung Perkantoran

3.5.6. Pasar

1. Datangi pengelola pasar sebagai narasumber.
2. Tanyakan banyaknya los yang ada di pasar tersebut, dimana satu los dihitung sebagai satu BSBTT.
3. Tanyakan banyaknya toko/kios yang terletak di pinggir pasar dan masih dalam kawasan pasar, dimana satu los/kios dihitung sebagai satu BSBTT dan satu BSKEKO.
4. Jika tidak dapat bertemu dengan pengelola pasar, hitung secara mandiri.
Contohnya Pasar Kebon Sayur terdapat 30 los, maka total bangunan sensus di Pasar Kebon Sayur berjumlah 30 BSBTT dan juga 30 BSKEKO.



Gambar 3.10. Contoh Pasar

3.5.7. Kompleks Pertokoan/Mall

1. Datangi pengelola kompleks perkantoran/mall sebagai narasumber.
2. Tanyakan berapa banyak toko yang berlokasi di kompleks tersebut, dimana satu toko dihitung sebagai satu BSBTT sekaligus sebagai satu BSKEKO.

3. Tanyakan juga apakah ada bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal (karyawan, penjaga, atau penduduk) di dalam kompleks pertokoan/mall tersebut. Jika ada, satu bangunan dihitung satu BSTT.
4. Jika orang yang berkompeten sebagai narasumber tidak ditemukan, petugas meminta ijin untuk menghitung secara mandiri.

Contoh, Mall Kota Kasablanka terdapat 20 restoran, 25 los pakaian, 5 los sepatu, dan 7 los elektronik, maka total bangunan sensus di Mall Kota Kasablanka berjumlah 57 BSBTT dan dihitung juga dalam 57 BSKEKO.



Gambar 3.11. Contoh Pertokoan



Gambar 3.12. Contoh Mall

3.6. Hasil Kegiatan

Hasil yang diperoleh dari kegiatan lapangan ini adalah:

Pemeta

1. Daftar Identifikasi Wilayah yang sudah diisi Pemeta.
2. SP2020WA-Sementara yang sudah digambar batas SLS dan Non SLS.
3. SP2020WB-Sementara yang sudah digambar:
 - a. Batas SLS/non SLS;
 - b. Batas dan nomor segmen;

- c. Titik *landmark* batas SLS;
 - d. Titik *landmark* infrastruktur.
4. *Geotagging* foto batas SLS.
 5. *Geotagging* foto bangunan infrastruktur.
 6. Lembar Kerja Muatan (LK-M) yang sudah diisi Pemeta.

Pengawas

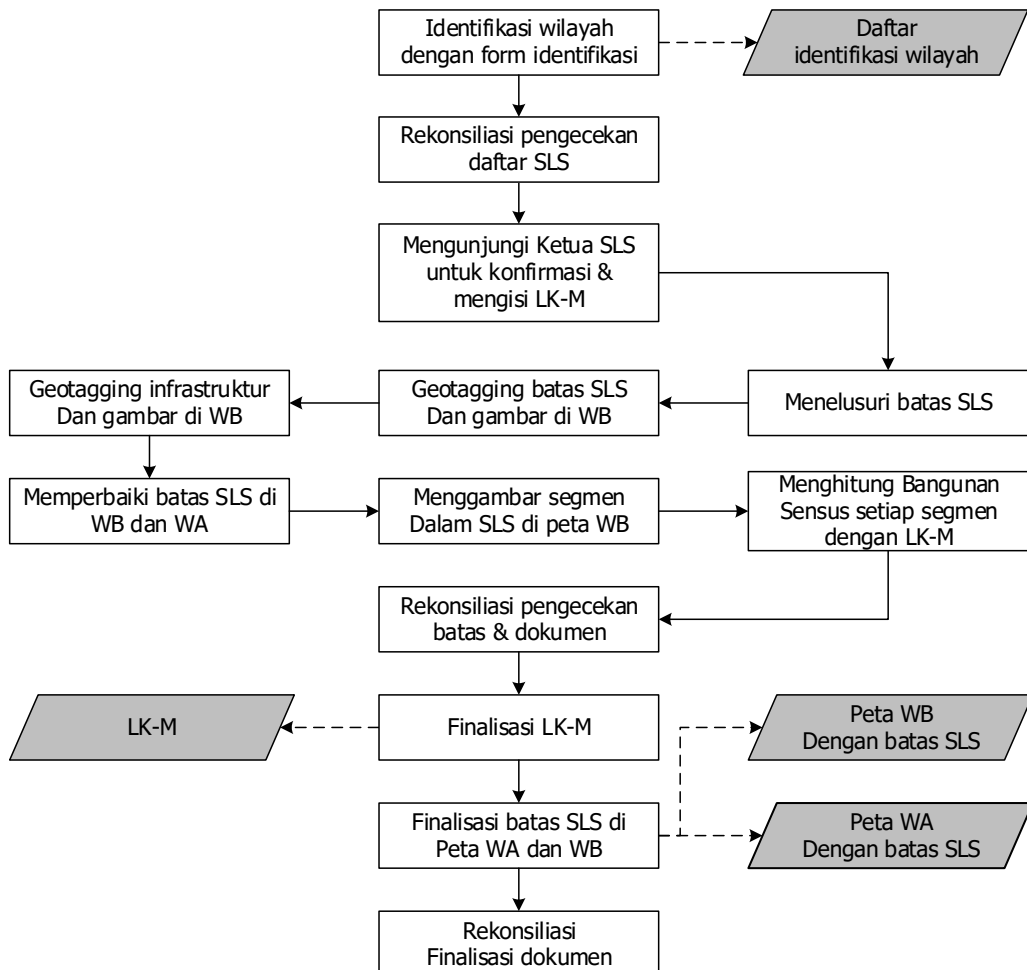
1. SP2020-RS yang sudah diisi dengan informasi SLS/non SLS dan identitas Pemeta yang ditugaskan.
2. SP2020WA-Sementara hasil kompilasi (gabungan) yang sudah digambarkan dengan:
 - a. Batas SLS/non SLS dan 4 digit kode SLS/non SLS.
 - b. Perbaikan batas desa;
 - c. Ditandatangani dan cap kepala desa/lurah.
3. SP2020-RD yang sudah diisi.
4. Laporan kegiatan Pengawas.

Semua dokumen harus disimpan di seksi IPDS dengan rapih. Selanjutnya, dokumen tersebut digunakan untuk bahan pengolahan tahun 2019 dan pembentukan *cluster area* di tahun selanjutnya.

BAB 4. ALUR KERJA PEMETA

4.1. Bagan Alur Kerja Pemeta

Dari tugas dan fungsi petugas yang sudah dijelaskan di Bab 3 Metodologi, digambarkan alur kerja Pemeta dengan lebih detail sebagai berikut:



Gambar 4.1. Alur Kerja Pemeta

4.2. Instrumen yang Digunakan

Instrumen yang digunakan oleh Pemeta adalah:

1. Daftar identifikasi wilayah.
2. Informasi SP2020-RS.
3. SP2020WA-Sementara.
4. SP2020WB-Sementara.
5. LK-M.
6. *Smartphone* yang diinstall Aplikasi Wilkerstat.

4.3. Identifikasi Wilayah

Tujuan identifikasi adalah untuk mengetahui keberadaan SLS yang ada di SP2020WB-Sementara. Tahapannya adalah sebagai berikut:

1. Kunjungi setiap wilayah BS.
2. Menggunakan bantuan peta, tanyakan ke narasumber yang mengetahui keberadaan SLS di BS tersebut. Narasumber bisa ketua SLS maupun warga setempat.
3. Isikan keberadaan SLS di Daftar Identifikasi Wilayah.
4. Tata cara pengisian lihat di **Bab 5 Tata Cara Pengisian Dokumen**.

4.4. Rekonsiliasi Pengecekan Daftar SLS

Rekonsiliasi ini bertujuan untuk:

1. Melakukan *cross check* data antar Pemeta dan Pengawas untuk memperoleh informasi SLS yang lengkap dan benar.
2. Informasi SLS dari Pemeta diperoleh dari dokumen Daftar Identifikasi Wilayah.
3. Informasi SLS dari Pengawas diperoleh dari SP2020-RS.
4. Jika ada penambahan SLS maka Pengawas menambahkan dibaris terakhir.
5. Jika ada SLS yang tidak ditemukan di coret dan tidak diberi nomor urut.
6. Pengawas menentukan wilayah tugas Pemeta berdasarkan SLS/non SLS dengan menuliskan identitas Pemeta pada tiap SLS/non SLS dalam daftar SP2020-RS.

7. Setiap Pemeta mendapat wilayah tugas SLS/non SLS utuh yang berada di peta BS masing-masing.
8. Pengawas memberikan kode wilayah SLS/non SLS dan nomor urut SLS/non SLS. Kode wilayah SLS adalah 0 dan kode wilayah non SLS diantara 1 – 6. (Rincian dapat dilihat pada Bab 5 Tata Cara Pengisian SP2020-RS).
9. Kode identitas SLS/non SLS terdiri dari 1 digit kode wilayah SLS/non SLS dan tiga digit nomor urut SLS/non SLS harus selesai dibuat sebelum Pemeta ke lapangan.
10. Pengawas menyalin identitas SLS/non SLS dari SP2020-RS ke LK-M. Satu LK-M untuk satu wilayah SLS/non SLS.

4.5. Mengunjungi Ketua SLS

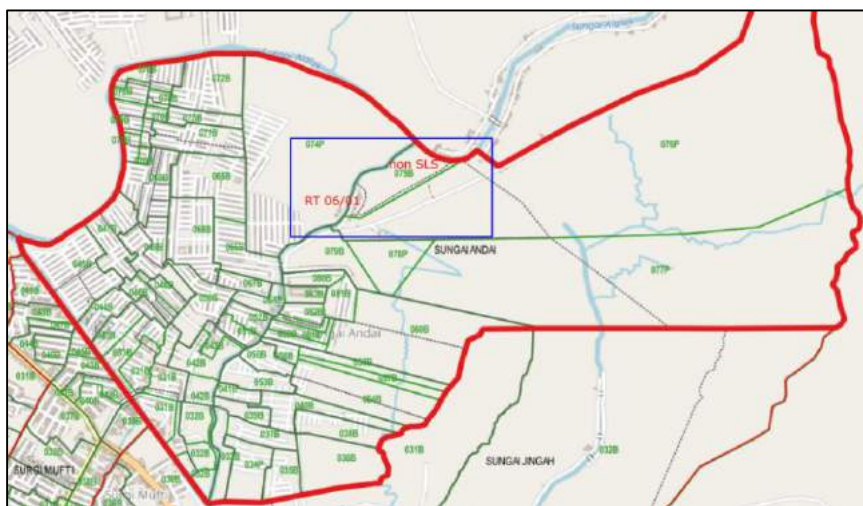
Mengunjungi ketua SLS bertujuan untuk menggali informasi yang ada di SLS tersebut. Informasi batas SLS digambar ke SP2020WA-Sementara dan SP2020WB-Sementara menggunakan pensil. Informasi selain batas diisikan ke dalam LK-M.

4.5.1. Menanyakan Informasi SLS/Non SLS dengan Mengisi LK-M

Informasi terkait muatan SLS isikan ke dalam form LK-M. Adapun informasi yang harus ditanyakan adalah:

1. Identitas SLS Terkecil
 - a. Nama SLS dan nama ketua SLS.
 - b. Salin informasi SLS ke LK-M.
2. Jumlah KK
 - a. Tanyakan jumlah KK di SLS tersebut. Sebisa mungkin petugas menggali informasi jumlah KK per segmen.
 - b. Salin jumlah KK ke LK-M.
3. Muatan dominan
 - a. Tanyakan muatan dominan di SLS tersebut.
 - b. Penjelasan lihat **Bab 2 Konsep dan Definisi terkait Kriteria Muatan Dominan**.
 - c. Isikan muatan dominan di LK-M dengan kode yang sesuai.
4. Bangunan yang digunakan kegiatan ekonomi
 - a. Tanyakan apakah ada bangunan yang dijadikan kegiatan ekonomi.

- b. Contoh kegiatan ekonomi: berdagang, konveksi, bengkel, dan lain-lain.
 - c. Informasi ini bisa dijadikan informasi awal untuk perhitungan bangunan sensus di LK-M.
5. Keberadaan wilayah non SLS
- a. Penjelasan lihat **Bab 2 Konsep dan Definisi terkait wilayah non SLS**.
 - b. Tanyakan keberadaan wilayah non SLS terdekat yang diketahui.
 - c. Jika ada wilayah non SLS, gambarkan di SP2020WA-Sementara dan SP2020WB-Sementara.



Gambar 4.2. Contoh Batas Non SLS di SP2020WA-Sementara

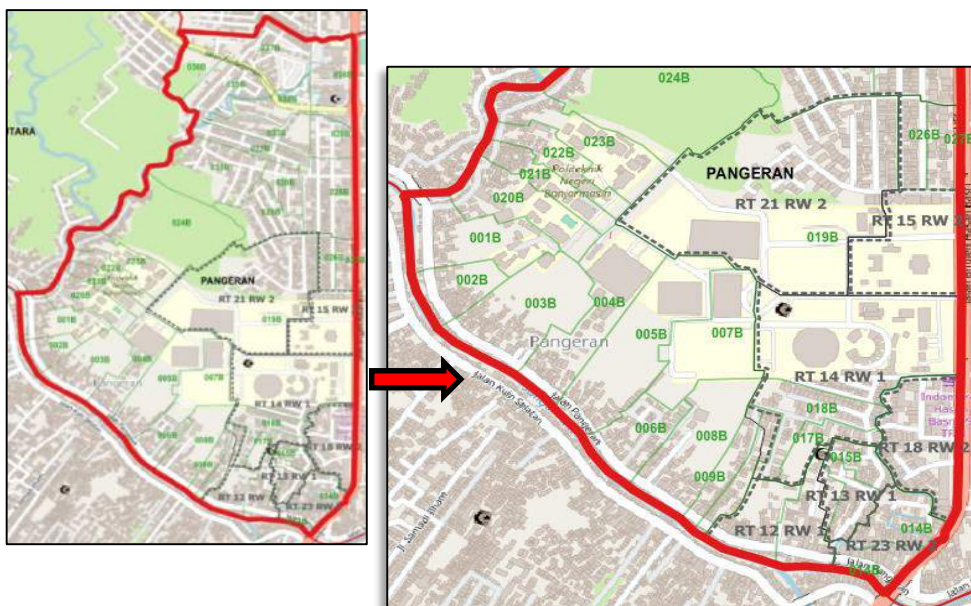


Gambar 4.3. Contoh Batas Non SLS

4.5.2. Menggambar Batas SLS

Biasanya ketua SLS memiliki peta atau denah wilayah SLSnya. Gali informasi tersebut dan gambarkan.

1. Gambarkan batas SLS ke SP2020WB-Sementara dan SP2020WA-Sementara menggunakan pensil.
2. Berikan nama SLS di batas tersebut.
3. Jika batas SLS yang didapat dari desa/kelurahan berbeda, lakukan perbaikan.
4. Tanyakan patokan batas terluar SLS untuk memudahkan saat penelusuran (contoh: nama pemilik rumah, pos satpam, persimpangan jalan, dan lain-lain).
5. Tanyakan SLS yang bersebelahan dengan SLS yang dikunjungi, beri tanda di peta.



Gambar 4.4. Penggambaran Batas SLS di SP2020WA-Sementara



Gambar 4.5. Penggambaran Batas SLS di SP2020WB-Sementara

4.6. Menelusuri Batas SLS

Setelah informasi SLS diperoleh, lakukan penelusuran batas SLS sambil melakukan *Geotagging* batas dan gambarkan batas SLS hasil penelusuran. Lihat Penjelasan **Bab 6 Aplikasi Wilkerstat**.

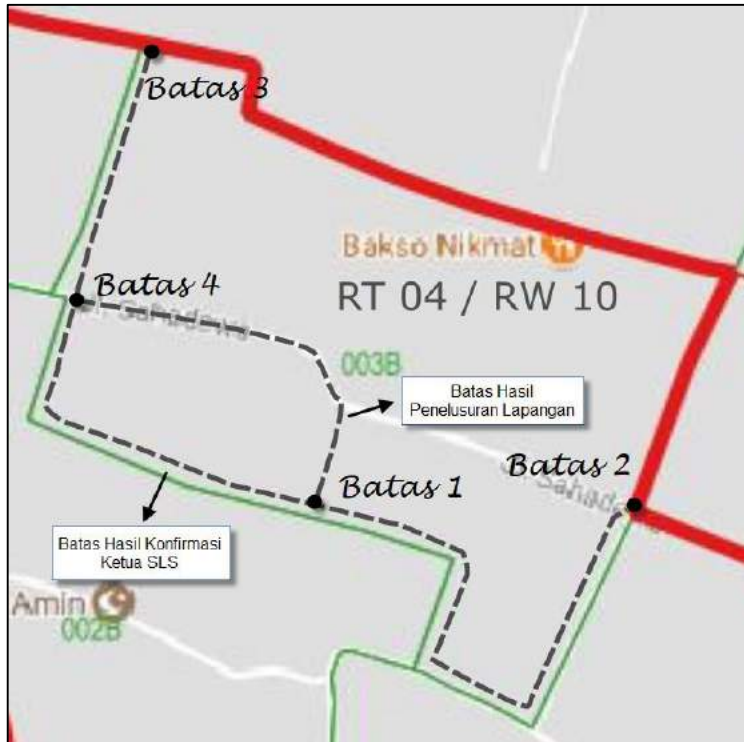
Penting untuk diperhatikan, nama *project* di Aplikasi Wilkerstat harus menggunakan 4 digit kode identitas SLS/non SLS.

4.6.1. *Geotagging* Foto *Landmark* Batas SLS

Saat penelusuran batas SLS, lakukan *Geotagging landmark* batas SLS dengan cara mengambil foto di empat titik batas SLS. Yang perlu diperhatikan adalah:

1. Ambil foto *landmark* batas SLS dengan Aplikasi Wilkerstat.
2. Gambarkan posisi *landmark* batas di SP2020WA-Sementara dengan simbol bulat hitam. Beri nama setiap simbol dengan nama Batas 1, Batas 2, Batas 3, dan Batas 4.

- Utamakan melakukan *Geotagging* di batas yang tidak jelas, seperti batas SLS di punggung rumah, di gang kecil yang tidak tergambar di peta, kebun, sawah, dan lain-lain.



Gambar 4.6. Penggambaran *Landmark* Batas SLS

- Dalam kondisi tertentu karena ketiadaan *landmark* yang jelas, *Geotagging* batas dapat mengambil foto hutan, tanah kosong, sawah atau lainnya.



Gambar 4.7. *Landmark* Batas SLS (*Imagine*)

4.6.2. *Geotagging* Foto Bangunan Infrastruktur

Selain *landmark* batas SLS, Pemeta juga harus mengambil foto semua infrastruktur yang ada dalam desa/kelurahan. Yang perlu diperhatikan adalah:

1. Ambil foto *landmark* infrastruktur dengan Aplikasi Wilkerstat.
2. Isikan nama *landmark* dan deskripsi di Aplikasi Wilkerstat.
3. Penjelasan jenis *Landmark* infrastruktur dan kodenya lihat di **Bab 2 Konsep dan Definisi**.
4. Infrastruktur yang diambil adalah infrastruktur yang tercakup dalam tujuh kategori di atas. Di luar kategori tersebut, **tidak dilakukan *Geotagging***.
5. Foto *landmark* dari tampak depan bangunan.
6. Apabila ada dua infrastruktur atau lebih dalam satu tempat, foto diambil sebanyak infrastruktur tersebut. Contoh: infrastruktur SD, SMP dan SMA dalam satu kesatuan bangunan dan plang informasinya hanya satu, maka foto diambil tiga kali.



SD Doremi EC (12)



SMP Doremi EC (13)



SMA Doremi EC (14)

Satu lokasi, **tiga landmark** infrastruktur **difoto** sebanyak **tiga kali**.

Gambar 4.8. Contoh Foto Lebih dari Satu Infrastruktur Dalam Satu Kawasan

7. Bangunan Infrastruktur yang sekaligus menjadi *Landmark* batas SLS, foto dilakukan dua kali.



Kantor Desa Cupel
yang menjadi batas
SLS dilakukan
Geotagging dua kali



Peta SP2020WB-
Sementara:
Digambarkan satu
titik hitam **dan**
penulisan
informasinya
dijadikan **satu**.
Contoh: Kantor Desa
Cupel & Batas 1.

8. Bangunan infrastruktur yang terletak di dua SLS atau lebih, Pemeta berkoordinasi dengan Pengawas untuk menentukan, Pemeta mana yang melakukan

Geotagging. Satu infrastruktur difoto satu kali oleh Pemeta terpilih, setelah melakukan koordinasi dengan Pengawas.

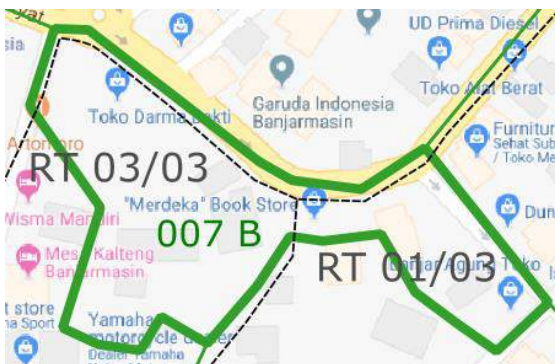


Bila ada infrastruktur di perbatasan SLS, lakukan koordinasi Pemeta atau tim lain untuk menentukan siapa yang melakukan *Geotagging*.

4.6.3. Memperbaiki Batas SLS

Hasil penelusuran batas SLS dan *Geotagging* batas dapat memastikan batas SLS sebenarnya di lapangan. Dalam penggambaran SLS hal-hal yang harus diperhatikan:

1. Batas SLS hasil penelusuran lapangan dengan hasil konfirmasi bisa berbeda.
2. Perbaiki batas SLS menggunakan pensil di SP2020WA-Sementara dan SP2020WB-Sementara sesuai dengan kondisi lapangan.
3. Satu SLS harus tergambar utuh (satu poligon).
4. Batas SLS bisa saja tergambar di beberapa SP2020WB-Sementara (di lebih dari satu peta).

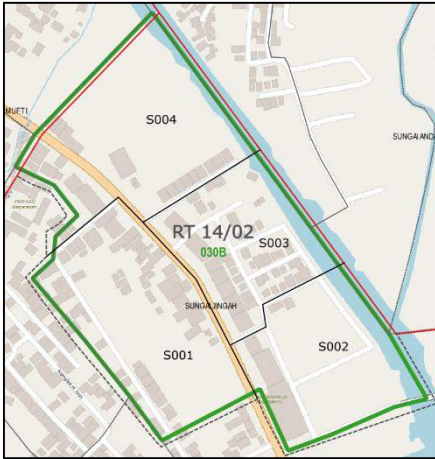


RT 01 yang tergambar di sebagian Peta 007B

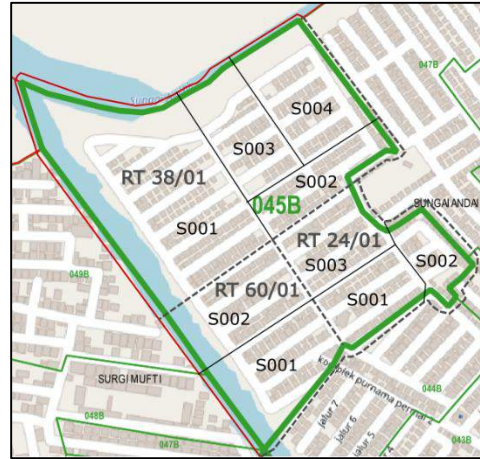


RT 01 yang tergambar di sebagian Peta 009B

1. Segmen SLS digambar dengan pensil di SP2020WB-Sementara.
2. Satu SLS harus dibagi habis oleh segmen.
3. Batas segmen mengikuti batas jelas seperti jalan, gang, sungai, selokan.
4. Beri nomor segmen mulai dari S001, S002, S003, dan seterusnya.
5. Penomoran zigzag dimulai dari arah barat daya.



Gambar 4.10. Contoh Segmen di 1 BS dan 1 SLS

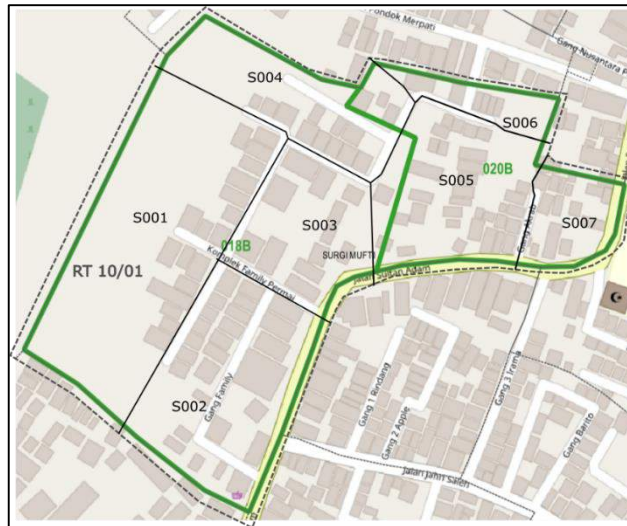


Gambar 4.11. Contoh Segmen di 1 BS dan 3 SLS



Gambar 4.12. Contoh Segmen di 1 SLS di 2 BS





Gambar 4.13. Segmen dalam 1 SLS di 2 BS (Digabung)

4.7.2. Mengisi LK-M

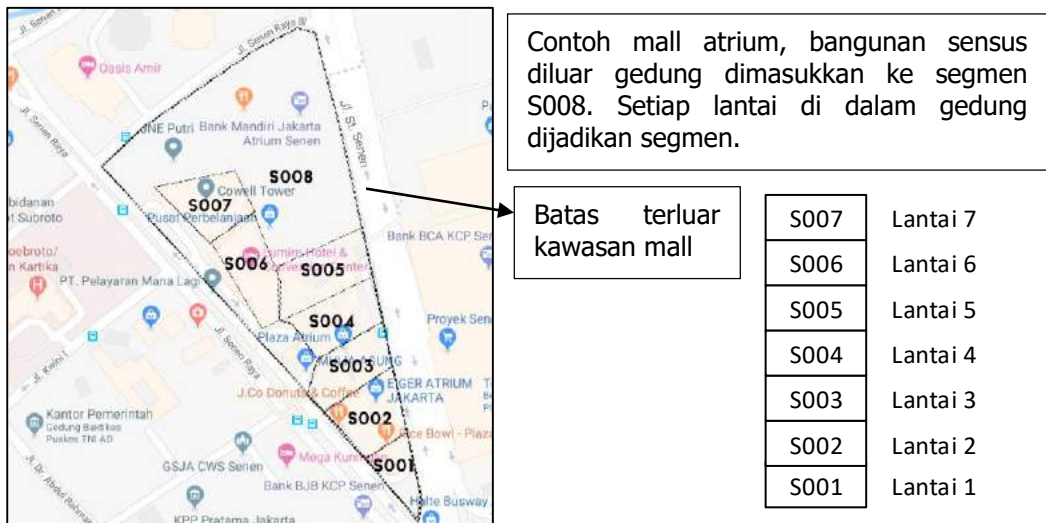
Setelah segmen dibuat, tahapan berikutnya adalah menghitung bangunan sensus dengan bantuan Lembar Kerja Muatan (LK-M). Hal-hal yang harus diperhatikan:

1. Menghitung bangunan sensus dilakukan per segmen. Jadi setelah habis satu segmen, baru dilanjutkan ke segmen berikutnya.
2. Hasil perhitungan bangunan sensus dituliskan di LK-M.
3. Lengkapi isian LK-M.
4. Tata cara pengisian LK-M lihat pada **Bab 5 Tata Cara Pengisian Dokumen**.

4.8. Memetakan dan Menghitung Muatan Pada Bangunan Bertingkat dan Kawasan Niaga

Contoh bangunan bertingkat atau kawasan niaga adalah mall, apartemen, rusun, dan pasar. Kawasan tersebut cenderung memiliki muatan besar tetapi wilayahnya tidak luas sehingga perlakuannya sedikit berbeda.

1. Batas terluar bangunan harus dibuat batas terluar segmen.
2. Bangunan sensus yang berada diluar gedung dijadikan satu segmen.
3. Setiap lantai dalam satu bangunan/tower dijadikan satu segmen.

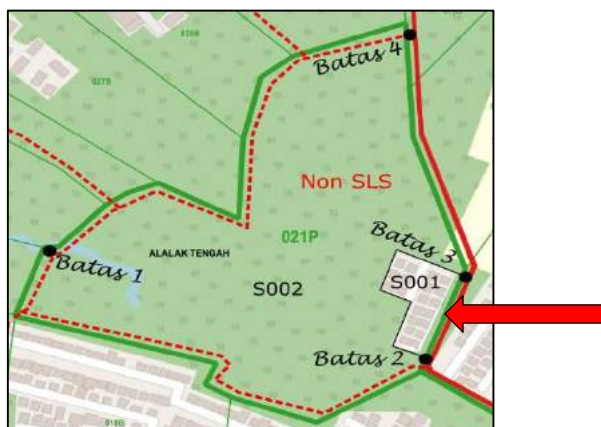


Gambar 4.14. Contoh segmen Bangunan Bertingkat

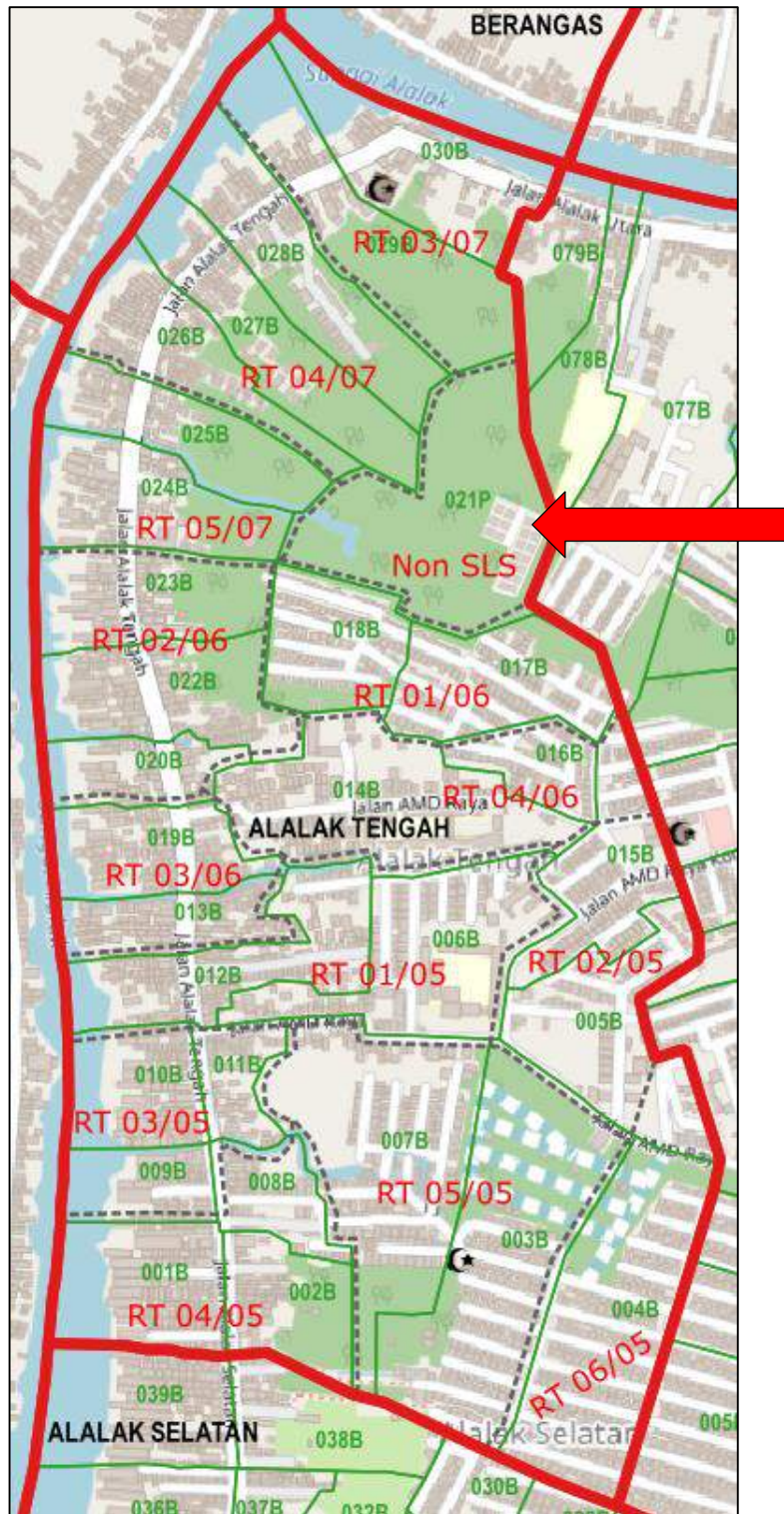
4.9. Memetakan dan Menghitung Muatan Pada Wilayah Non SLS

Pada kasus tertentu, tidak semua wilayah desa/kelurahan terbagi habis menjadi wilayah SLS. Bisa terjadi ada beberapa wilayah yang tidak masuk kedalam SLS manapun (non SLS). Wilayah-wilayah non SLS ini tetap harus tergambar di peta. Hal-hal yang harus diperhatikan:

1. Pahami Bab 2 Konsep dan Definisi tentang wilayah-wilayah non SLS.
2. Beban tugas wilayah non SLS ditentukan oleh Pengawas.
3. Jika ada bangunan sensus di wilayah non SLS tetap dihitung dengan LK-M.
4. Tata cara pengisian LK-M lihat di **Bab 5 Tata Cara Pengisian Dokumen**.



Gambar 4.15. Contoh wilayah non SLS di Peta WB



Gambar 4.16. Contoh wilayah non SLS di Peta WA

4.10. Rekonsiliasi Hasil Pengecekan Batas dan Isian Dokumen

Rekonsiliasi ini bertujuan untuk:

1. Melakukan *cross check* data antar petugas dan Pengawas untuk memperoleh informasi batas SLS dan non SLS yang benar.
 2. Memastikan dalam satu desa terbagi habis menjadi wilayah SLS atau non SLS.
 3. Memastikan tidak ada batas wilayah yang bertampalan dengan wilayah lain.
- Memastikan semua wilayah SLS dan non SLS tergambar di Peta dan tercatat di LK-M.

Hasil rekonsiliasi harus bisa menghasilkan peta yang final. Hal-hal yang harus difinalkan antara lain titik *landmark* dan batas SLS/non SLS sudah tergambar di semua peta.

4.10.1. Finalisasi SP2020WB-Sementara

1. Rapihkan batas SLS dengan garis putus-putus menggunakan spidol merah.
2. Rapihkan batas segmen dan nomor segmen dengan pulpen hitam.
3. Nomor segmen diawali huruf S dan diikuti dengan nomor urut. Contoh: S001, S002, S003, dan seterusnya.
4. Tuliskan identitas setiap SLS dengan spidol merah.
5. Pastikan semua wilayah baik SLS dan non SLS tergambar di setiap SP2020WB-Sementara dan isian muatan tertulis di LK-M.



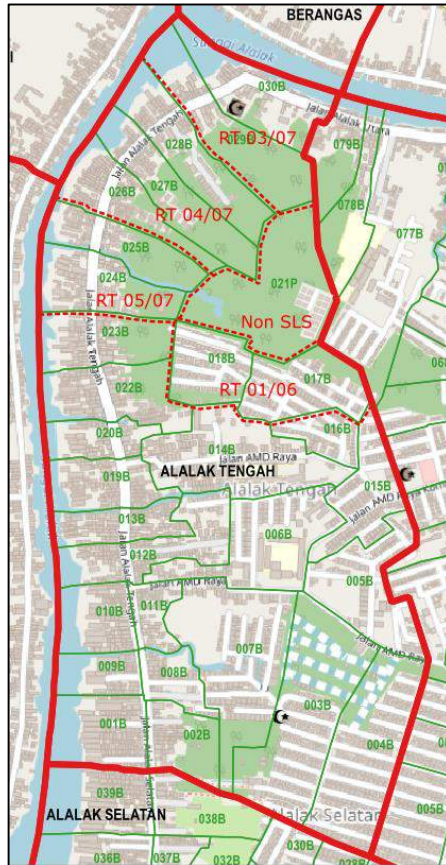
Gambar 4.17. Contoh simbolisasi di peta yang sudah final



Gambar 4.18. Contoh simbolisasi segmen non SLS di peta yang sudah final

4.10.2. Finalisasi SP2020WA-Sementara

1. Gambarkan semua batas SLS Non SLS di SP2020WA-Sementara dengan garis putus-putus menggunakan spidol merah.
2. Pastikan semua wilayah baik SLS dan non SLS tertulis di LK-M.
3. Pastikan identitas wilayah sama, baik di Peta maupun di LK-M.



Gambar 4.19. Contoh simbolisasi peta SP2020WA-Sementara yang sudah final

4.11. Rekonsiliasi Finalisasi Dokumen

Rekonsiliasi ini bertujuan untuk:

1. Melakukan finalisasi peta di tingkat desa berdasarkan kompilasi Peta SP2020WA & SP2020WB final dari Pemeta.

2. Melakukan finalisasi dokumen di tingkat desa berdasarkan LK-M final dari Pemeta.
3. Jika ada 1 desa memiliki lebih dari 1 Pengawas, harus melakukan rekonsiliasi bersama.

4.12. Hasil Lapangan

Semua hasil lapangan dikumpulkan ke Pengawas. *Output* yang dihasilkan oleh Pemeta adalah:

1. Daftar Identifikasi Wilayah yang sudah diisi Pemeta.
2. SP2020WA-Sementara yang sudah digambar batas SLS dan Non SLS.
3. SP2020WB-Sementara yang sudah digambar:
 - a. Batas SLS/non SLS;
 - b. Batas dan nomor segmen;
 - c. Titik *landmark* batas SLS;
 - d. Titik *landmark* infrastruktur.
4. *Geotagging* Photo batas SLS.
5. *Geotagging* Photo bangunan infrastruktur.
6. Lembar Kerja Muatan (LK-M) yang sudah diisi Pemeta.



BAB 5. TATA CARA PENGISIAN DOKUMEN

5.1. Daftar Identifikasi Wilayah Tugas

Identifikasi wilayah tugas berisi daftar BS yang menjadi wilayah tugas Pemeta yang telah ditentukan IPDS Kabupaten/Kota. Selanjutnya Pemeta akan melakukan identifikasi SLS/non SLS terkecil apa saja yang tercakup dalam setiap BS wilayah tugasnya. Narasumber dalam proses identifikasi ini bisa Ketua SLS maupun warga setempat. Pemeta mendatangi satu per satu BS tersebut sambil menggali informasi SLS/non SLS terkecil yang tercakup dalam BS.

Rincian daftar identifikasi wilayah tugas adalah sebagai berikut:

1. Identitas wilayah, berisi identitas kode dan nama wilayah sampai dengan level kecamatan. Rincian ini sudah terisi.
2. Identitas Pengawas dan Pemeta, berisi nama petugas Pengawas dan Pemeta untuk daftar BS yang bersangkutan. Rincian ini sudah terisi.
3. Kolom 1 (No), berisi nomor urut daftar BS wilayah identifikasi.
4. Kolom 2 (Kode dan Nama Desa), berisi kode dan nama desa, dan sudah terisi.
5. Kolom 3 (Blok Sensus) berisi BS wilayah tugas yang ditentukan.
6. Kolom 4 (Nama wilayah SLS / Non SLS), kolom ini digunakan untuk mengisi informasi SLS atau non SLS yang tercakup dalam BS. Tuliskan nama SLS atau nama wilayah yang dikenali jika tidak ada atau tidak tercakup dalam SLS pada tiap BS.
7. Kolom 5 (Nomor Segmen), digunakan untuk menuliskan informasi nomor segmen untuk desa yang tidak memiliki SLS. Segmen dibuat berdasarkan ketentuan pembentukan dan penomoran segmen.

Catatan:

- Khusus desa yang tidak memiliki SLS, Pemeta didampingi Pengawas mengidentifikasi wilayah sekaligus membagi habis desa dalam segmen-segmen. Segmen dibuat berdasarkan ketentuan pembentukan dan penomoran segmen.
- Pengisian informasi untuk desa tanpa SLS adalah kolom 4 kosong (-) dan kolom 5 diisi nomor segmen.

DAFTAR IDENTIFIKASI WILAYAH TUGAS				
Provinsi		: [31] DKI JAKARTA		
Kabupaten/Kota		: [72] JAKARTA TIMUR		
Kecamatan		: [060] JATINEGARA		
Pengawas		: [] Nama Pengawas		
Pemeta Desa		: [] Nama Pemeta		
No.	Desa/Kelurahan	Blok Sensus	Nama Wilayah SLS / Non SLS	Nomor Segmen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	[001] BIDARA CINA	084B		
2	[001] BIDARA CINA	085B		
3	[001] BIDARA CINA	086B		
4	[001] BIDARA CINA	094B		

Gambar 5.1. Contoh daftar identifikasi wilayah tugas

5.2. Tata Cara Pengisian Rekap SLS (SP2020-RS)

Daftar SP2020-RS berisi daftar seluruh SLS yang ada di desa yang diperoleh dari Kantor Desa/Kelurahan. Pengisian SP2020-RS dilakukan oleh Pengawas sebagai dasar untuk menentukan wilayah tugas Pemeta dalam melakukan Pemetaan SLS.

BLOK I. PENGENALAN TEMPAT

1. Rincian 1 – 4

Berisi nama dan kode wilayah mulai dari provinsi (rincian 1), kabupaten/kota (rincian 2), kecamatan (rincian 3), dan desa/kelurahan (rincian 4).

Contoh:

BLOK I. PENGENALAN TEMPAT			
1. Provinsi	DKI JAKARTA		3 1
2. Kabupaten/Kota	JAKARTA TIMUR		7 2
3. Kecamatan	JATINEGARA		0 6 0
4. Desa/Kelurahan	BIDARACINA		0 0 1

Gambar 5.2. Contoh Blok I rincian 1-4

2. Rincian 5

Berisi alamat kantor desa/kelurahan secara lengkap.

Contoh:

5. Alamat Kantor Desa/Kelurahan	GANG KOBER DEPOK NO-22, RT 004 RW 007, KP MELAYU, JATINEGARA, JAKARTA TIMUR
---------------------------------	--

Gambar 5.3. Contoh Blok I rincian 5

3. Rincian 6

Berisi dasar hukum pembentukan desa/kelurahan beserta nomor SK. Lakukan pengecekan nomor SK tersebut kepada aparat desa/kelurahan.

Contoh:

6. Dasar Hukum Pembentukan	UU NO. 23 TAHUN 2007
----------------------------	----------------------

Gambar 5.4. Contoh Blok I rincian 6

4. Rincian 7

Berisi informasi tentang akses dari kantor kecamatan menuju kantor desa/kelurahan yaitu jenis transportasi yang digunakan (rincian 7a) dan perkiraan untuk biaya transportasi PP (rincian 7b).

Contoh:

7. Akses dari Kantor Kecamatan ke Kantor Desa	☒ 1. Angkutan bertrayek atau teratur ☐ 2. Angkutan sewa/carter ☐ 4. Jalan kaki	1
a. Transportasi yang digunakan (pilihan boleh lebih dari 1 kode) b. Perkiraan biaya transportasi dari kantor kecamatan ke kantor desa	Rp. 7.000	

Gambar 5.5. Contoh Blok I rincian 7

5. Rincian 8 (Wilayah SLS)

Berisi informasi ketersediaan SLS di bawah desa, jumlah tingkatan SLS di bawah desa, jumlah SLS terkecil, dan ketersediaan peta SLS di kantor desa/kelurahan.

Contoh:

8. Wilayah SLS		
a. Apakah ada SLS di bawah desa?	① Ya 2. Tidak (ke rincian 9)	1
b. Jumlah tingkatan SLS di bawah desa	2	2
c. Jumlah SLS terkecil	188	1 8 8
d. Apakah tersedia peta SLS?	① Ya 2. Tidak	1

Gambar 5.6. Contoh Blok I rincian 8

6. Rincian 9 (Wilayah Non SLS)

Berisi rekapitulasi banyaknya wilayah di desa/kelurahan yang tidak tercakup dalam SLS manapun (wilayah Non SLS) berdasarkan laporan desa/kelurahan.

Contoh:

9. Jumlah Wilayah Non SLS	0	0 0 0
---------------------------	---	--

Gambar 5.7. Contoh Blok I rincian 9

BLOK II. KETERANGAN PETUGAS

Blok II berisikan informasi yang berkaitan dengan petugas lapangan dan waktu pelaksanaan.

BLOK II. KETERANGAN PETUGAS	
Uraian (1)	Pengawas (2)
1. Nama Petugas	WAHYU SETYO BUDI
2. NIP/NIMS	99959182
3. No. HP	08123456789
4. Tanggal Pelaksanaan	24 APRIL 2019
5. Tanda Tangan	
6. Mengetahui Kepala Desa/Lurah :	Tanggal: _____ (nama, sandi/tangkas, stempel)

Gambar 5.8. Contoh Blok II keterangan petugas

BLOK III. REKAP SATUAN LINGKUNGAN SETEMPAT

Blok III digunakan untuk mencatat keberadaan seluruh SLS yang ada di desa/kelurahan. Pengisian kolom pada Blok III yaitu dengan mengurutkan SLS dimulai dari SLS terendah di bawah desa sampai dengan SLS tertinggi di bawah desa. Informasi jumlah hirarki/tingkatan SLS harus sesuai dengan isian pada Blok I rincian 8b.

Contoh:

Jika isian Blok I rincian 8b adalah 2, maka SLS tertinggi di bawah desa/kelurahan adalah tingkat 2. Tuliskan nama SLS dan isikan kode SLS sesuai dengan nama SLS pada kotak kode yang tersedia.

8. Wilayah SLS			
a. Apakah ada SLS di bawah desa?	1. Ya	2. Tidak (ke rincian 9)	1
b. Jumlah tingkatan SLS di bawah desa	2		2

PROV	KAB	KEC	DESA	Nama Desa	Halaman 12 dari 13 halaman							
31	72	060	001	BIDARACINA								
BLOK III. REKAP SLS												
No	SLS Tingkat 1 (Tuliskan)	Kode *)	Jumlah KK	SLS Tingkat 2 (Tuliskan)	Kode *)	SLS Tingkat 3 (Tuliskan)	Kode *)	SLS Tingkat 4 (Tuliskan)	Kode *)	Perkiraan Biaya Transportasi dari Kantor Desa ke SLS (PP)	No Urut SLS Terkecil	Identitas Pemeta
	RT	1		RW	2							

Gambar 5.9. Contoh pengisian kode SLS

Kode SLS yang diisikan adalah sebagai berikut:

- Kode "1", untuk RT,
- Kode "2", untuk RW,
- Kode "3", untuk Jorong,
- Kode "4", untuk Korong,
- Kode "5", untuk Lingkungan,
- Kode "6", untuk Banjar,
- Kode "7", untuk Dusun,
- Kode "8", untuk Lainnya,

Tata cara pengurutan nama SLS adalah sebagai berikut:

- Nama SLS sesuai dengan kondisi lapangan yang telah ditentukan oleh masing-masing desa/kelurahan.
- Jika penamaan SLS mengikuti aturan angka (misal: 1, 2, 3, ..., dst), urutkan nama SLS satu tingkat di bawah desa/kelurahan dimulai dari nomor terkecil hingga terbesar;
- Jika penamaan SLS tidak mengikuti aturan angka (misal: sukasenang, sukamakmur, sukajadi), urutkan sesuai dengan pencatatan yang ada di laporan desa/kelurahan;

- Untuk masing-masing SLS satu tingkat di bawah desa/kelurahan, urutkan SLS di bawahnya seperti cara di atas, hingga SLS terkecil.

Penjelasan isian pada Blok III adalah sebagai berikut:

1. Kode identitas wilayah

Identitas wilayah yang dimaksud disini adalah kode dan nama desa/kelurahan.

PROV	KAB	KEC	DESA	Nama Desa
31	72	060	001	BIDARACINA

Halaman 12 dari 13 halaman

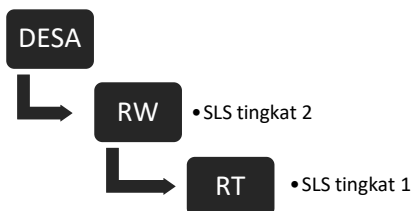
Gambar 5.10. Contoh pengisian kode identitas wilayah

2. Isian SLS Terkecil

- Tiap baris pada Blok III daftar SP2020-RS disebut 1 (satu) SLS terkecil.
- Jumlah KK diperoleh dari kantor desa/kelurahan berdasarkan pencatatan yang ada. Jumlah KK merujuk pada jumlah KK di setiap SLS terkecil.
Apabila pemerintah desa/kelurahan tidak memiliki informasi jumlah KK, maka informasi jumlah KK tidak perlu diisi.
- Jika di bawah desa/kelurahan tidak terdapat SLS (Blok I Rincian 8a berkode 2), Blok III tidak terisi.
- Nomor urut SLS terkecil adalah nomor unik yang diberikan Pengawas untuk setiap SLS terkecil yang ada di desa/kelurahan.

Contoh 1:

Desa/kelurahan yang memiliki 2 hirarki SLS di bawah desa, yaitu RT dan RW.



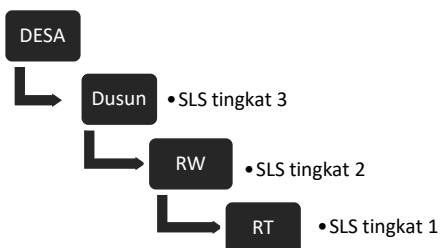
BLOK III. REKAP SLS												
No	SLS Tingkat 1 (Tuliskan)		Jumlah KK	SLS Tingkat 2		SLS Tingkat 3		SLS Tingkat 4		Perkiraan Biaya Transportasi dari Kantor Desa ke SLS (PP) (Rupiah)	No Urut SLS Terkecil	Identitas Pemeta
	Kode *)			Kode *)		Kode *)		Kode *)				
	RT			RW		-		-				
	Nama SLS	Nama Ketua SLS Terkecil		Nama SLS		Nama SLS		Nama SLS				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
1	001	MODI ARINA	45	001						7000	001	
2	002	MULYONO	43	001						7000	002	
3	003	ADIN S	99	001						7000	003	
4	004	BOY ENOVA	66	001						7000	004	
5	005	WILSON P	76	001						7000	005	
6	006	AGUS EFENDI	87	001						7000	006	
7	007	ANDI ANDYA	97	001						7000	007	

Gambar 5.11. Contoh pengisian wilayah 2 hirarki SLS dibawah desa/kelurahan

Dari gambar di atas yang disebut 1 SLS terkecil adalah RT 001 RW, RT 002 RW 001, dan seterusnya.

Contoh 2:

Desa/kelurahan yang memiliki 3 hirarki SLS di bawah desa, yaitu RT 001, RW 001, dan Dusun.



PROV	KAB	KEC	DESA	Nama Desa								
32	75	090	007	DUREN JAYA	Halaman 12 dari 13 halaman							
BLOK III. REKAP SLS												
No	SLS Tingkat 1 (Tuliskan)		Jumlah KK	SLS Tingkat 2		SLS Tingkat 3		SLS Tingkat 4		Perkiraan Biaya Transportasi dari Kantor Desa ke SLS (PP) (Rupiah)	No Urut SLS Terkecil	Identitas Pemeta
	Kode *)			Kode *)		Kode *)		Kode *)				
	RT			RW		DUSUN		-				
	Nama SLS	Nama Ketua SLS Terkecil		Nama SLS		Nama SLS		Nama SLS				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
1	001	Rody SOLIHIN	69	001	MEKARWANGI					10.000	001	
2	002	ENCEP R.	60	001						10.000	002	
3	003	CECEP M.	70	001						10.000	003	
4	001	KEMARUDIN	40	001						10.000	004	
5	002	MAH ENDANG	42	002						10.000	005	
6	003	LADI ARNITA	33	002						10.000	006	
7	001	JOKO KEMAR	55	001	MEKARAJA					15.000	007	
8	002	JUNADI S.	44	001						15.000	008	
9	003	PATA S.	38	001						15.000	009	
10	004	KENDI H.	54	001						15.000	010	
11	001	MERYANTO	68	002						15.000	011	
12	002	DENDI H.	75	002						15.000	012	
13	003	KURNIA S.	66	002						15.000	013	
14	001	BAMBANG P.	45	003	MEKARHARUT					10.000	014	
15	002	RUDI C.	54	003						10.000	015	

Gambar 5.12. Contoh pengisian wilayah 3 hirarki SLS dibawah desa/kelurahan

Dari gambar di atas yang disebut 1 SLS terkecil adalah RT 001 RW 001 Dusun Mekarwangi, RT 002 RW 001 Dusun Mekarwangi, dan seterusnya.

Contoh 3:

Tidak terdapat SLS di bawah desa/kelurahan.

DESA • SLS tingkat 1

BLOK I. PENGENALAN TEMPAT			
1. Provinsi	SUMATERA UTARA		1 2
2. Kabupaten/Kota	PADANGSIDEMPUAN		7 7
3. Kecamatan	PADANGSIDEMPUAN TENGGARA		0 1 0
4. Desa/Kelurahan	HUTA KOJE		0 0 5
5. Alamat Kantor Desa/Kelurahan	HUTA KOJE		
6. Dasar Hukum Pembentukan	UU NO. 32 TAHUN 1982		
7. Akses dari Kantor Kecamatan ke Kantor Desa a. Transportasi yang digunakan (pilihan boleh lebih dari 1 kode) b. Perkiraan biaya transportasi dari kantor kecamatan ke kantor desa	1. Angkutan bertrayek atau teratur 2. Angkutan sewa/carter 3. Jalan kaki Rp. 0		4 0
8. Wilayah SLS			
a. Apakah ada SLS di bawah desa?	1. Ya 2. Tidak (ke rincian 9)		1
b. Jumlah tingkatan SLS di bawah desa			
c. Jumlah SLS terkecil			
d. Apakah tersedia peta SLS?	1. Ya 2. Tidak		
9. Jumlah Wilayah Non SLS	3		0 0 3

Gambar 5.13. Contoh pengisian wilayah yang tidak ada SLS dibawah desa/kelurahan

BLOK IV. REKAP NON SATUAN LINGKUNGAN SETEMPAT

Blok IV digunakan untuk mencatat keberadaan wilayah di dalam desa/kelurahan yang tidak tercapuk di SLS manapun di desa/kelurahan tersebut.

PROV	KAB	KEC	DESA	Nama Desa	BLOK IV. REKAP NON SLS		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1 2	7 7	0 1 0	0 0 5	HUTA KOJE			
No	Kode Wilayah Non SLS *)	Keterangan (Nama Wilayah Non SLS)	Perkiraan Jumlah Muatan KK	Perkiraan Biaya Transportasi dari Kantor Desa ke Non SLS (PP) (Rupiah)	No Urut Non SLS	Identitas Pemeta	
1	1	LADANG	20	30	5000	001	
2	2	HUTAN	0	0	5000	002	
3	3	PEMUKIMAN PENDUDUK	120	105	5000	003	

Gambar 5.14. Contoh pengisian wilayah yang tidak tercapuk di SLS manapun

Keterangan isian pada Blok IV adalah sebagai berikut:

1. Kolom 1 (No)

Isian kolom 1 adalah urutan penulisan wilayah Non SLS dalam desa/kelurahan.

2. Kolom 2 (Kode Wilayah Non SLS)

Kolom 2 berisi kode wilayah Non SLS apabila wilayah tersebut tidak tercakup dalam SLS manapun.

Kode wilayah Non SLS yang diisikan adalah sebagai berikut:

- Kode "1", untuk Wilayah Bervegetasi Pertanian,
- Kode "2", untuk Wilayah Bervegetasi Bukan Pertanian,
- Kode "3", untuk Lahan Terbuka,
- Kode "4", untuk Kawasan Terbangun Pemukiman,
- Kode "5", untuk Kawasan Terbangun Bukan Pemukiman,
- Kode "6", untuk Wilayah Perairan.

3. Kolom 3 (Keterangan)

Kolom 3 berisi dengan nama, jenis atau keterangan tambahan mengenai wilayah yang tidak tercakup dalam SLS tersebut.

4. Kolom 4 (Perkiraan jumlah KK)

Kolom 4 berisi perkiraan jumlah KK setiap wilayah non SLS berdasarkan informasi dari Kepala Desa/Lurah atau sumber lain di kantor desa/kelurahan.

5. Kolom 5 (Perkiraan jumlah bangunan)

Kolom 5 berisi perkiraan jumlah bangunan (termasuk BSTT, BSBTT maupun BSTT kosong) setiap wilayah non SLS berdasarkan informasi dari Kepala Desa/Lurah atau sumber lain di kantor desa/kelurahan.

6. Kolom 6 (No Urut Non SLS)

Kolom 6 digunakan untuk mencatat nomor urut dari setiap wilayah non SLS di desa tersebut. Penulisan nomor urut berisikan 3 (tiga) digit angka. No urut non SLS melanjutkan no urut SLS terakhir pada Blok III.

7. Kolom 7 (Identitas Pemeta)

Kolom 7 berisi identitas Petugas Pemeta yang ditugaskan pada wilayah non SLS bersangkutan.

BLOK V. CATATAN

Berisi keterangan atau informasi perihal SLS/non SLS penting lainnya sebagai pelengkap atau penjelasan lebih rinci.

5.3. Tata Cara Pengisian Lembar Kerja Perhitungan Muatan (LK-M)

Lembar kerja perhitungan muatan (LK-M) merupakan lembar yang digunakan untuk mempermudah proses penghitungan muatan BSTT, BSBTT, BSTT kosong dan BSKEKO oleh Pemeta. Daftar ini juga memuat informasi yang diperoleh dari ketua SLS ketika Pemeta mendatangi ketua SLS, seperti: batas SLS, perkiraan jumlah KK, bangunan bangunan khusus, dan informasi penting terkait SLS maupun wilayah Non SLS. Setelah itu kemudian Pemeta mulai melakukan perhitungan muatan dengan mengelilingi SLS/Non SLS. 1 (satu) lembar LK-M diperuntukan untuk 1 (satu) perhitungan SLS/Non SLS.

PETUGAS PEMETA

Petugas mendapat lembar LK-M yang sudah berisi identitas wilayah (kode provinsi, kode kabupaten/kota, kode kecamatan, kode dan nama desa/kelurahan, kode dan nomor urut SLS/Non SLS, serta nama SLS/Non SLS) dan identitas Pemeta sebagaimana yang ditugaskan oleh Pengawas.

Contoh:

LEMBAR KERJA PENGHITUNGAN MUATAN (LK-M)									
Identitas Wilayah Desa*)					Identitas SLS/Non SLS*)				
Prov	Kab	Kec	Desa		Kode	No. Urut			
31	72	060	001		0	030			
Nama Desa					Nama SLS/Non SLS				
BIDARACINA					RT 007 RW 003				
Identitas Pemeta*)									
YUNIAR S									

Gambar 5.15. Contoh pengisian identitas wilayah dan Pemeta di lembar LK-M

Lembar Kerja Perhitungan Muatan (LK-M)

Petunjuk pengisian kolom pada Blok I adalah sebagai berikut:

1. Kolom 1 (Nomor Segmen)

Penulisan nomor segmen dimulai dari arah barat daya dan berisikan urutan dari 001, 002, 003, dan seterusnya serta diawali dengan kode S.

Contoh:

Nomor Segmen	Muatan Dominan	Jumlah KK	Jumlah Muatan				Jumlah Bangunan Sensus Ekonomi
			BSTT	BSBTT	BSTT Kosong	Jumlah Kolom (4)+(5)+(6)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
S001	1	15	HHH HHH HH = 15	1 = 1	—	16	11 = 2
S002	1	12	HHH HHH 11 = 12	—	—	12	—
S003	1	19	HHH HHH HHH HHH = 20	—	11 = 2	22	—

Gambar 5.16. Contoh pengisian nomor segmen

2. Kolom 2 (Muatan Dominan)

Kode muatan dominan diisi berdasarkan jumlah muatan yang paling banyak di segmen tersebut.

Kode muatan dominan yang diisikan adalah sebagai berikut:

- Kode "1", untuk Permukiman Biasa,
- Kode "2", untuk Perumahan Mewah/ Elite/ Real estate,
- Kode "3", untuk Permukiman Kumuh,
- Kode "4", untuk Apartemen/ Kondominium/ Flat,
- Kode "5", untuk Kos-kosan/ Kontrakan,
- Kode "6", untuk Pesantren/ Barak/ Asrama/ Sekolah,
- Kode "7", untuk Pertokoan/ Pasar/ Perkantoran,
- Kode "8", untuk Pusat Perbelanjaan Modern/Mal,
- Kode "9", untuk Kawasan Industri,
- Kode "10", untuk Hotel/ Tempat Rekreasi,
- Kode "11", untuk Lainnya (Hutan/ kebun, pulau kosong, danau/waduk/rawa, lahan kosong)

Contoh:

Nomor Segmen	Muatan Dominan	Jumlah KK	Jumlah Muatan				Jumlah Bangunan Sensus Ekonomi
			BSTT	BSBTT	BSTT Kosong	Jumlah Kolom (4)+(5)+(6)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
S001	1	15	HHH HHH HHH = 15	I = 1	-	16	11 = 2
S002	1	12	HHH HHH II = 12	-	-	12	-
S003	1	19	HHH HHH HHH HHH = 20	-	II = 2	22	-

Gambar 5.17. Contoh pengisian muatan dominan

3. Kolom 3 (Jumlah KK)

Tuliskan jumlah KK setiap segmen pada SLS/Non SLS sesuai keterangan dari ketua SLS.

Contoh:

Nomor Segmen	Muatan Dominan	Jumlah KK	Jumlah Muatan				Jumlah Bangunan Sensus Ekonomi
			BSTT	BSBTT	BSTT Kosong	Jumlah Kolom (4)+(5)+(6)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
S001	1	15	HHH HHH HHH = 15	I = 1	-	16	11 = 2
S002	1	12	HHH HHH II = 12	-	-	12	-
S003	1	19	HHH HHH HHH HHH = 20	-	II = 2	22	-

Gambar 5.18. Contoh pengisian jumlah KK

4. Kolom 4 (Jumlah Muatan BSTT)

Hitung BSTT pada setiap segmen SLS/Non SLS dengan memberikan *tally*. Untuk setiap BSTT yang dihitung, identifikasilah apakah di BSTT tersebut terdapat kegiatan ekonomi. Apabila di BSTT tersebut terdapat kegiatan ekonomi maka berikan *tally* juga pada kolom 8 (Informasi bangunan sensus ekonomi). Apabila tidak terdapat BSTT maka berilah tanda (-).

5. Kolom 5 (Jumlah Muatan BSBTT)

Hitung BSBTT pada setiap segmen SLS/Non SLS dengan memberikan *tally*. Untuk setiap BSBTT yang dihitung, identifikasilah apakah di BSBTT tersebut terdapat kegiatan ekonomi. Apabila di BSBTT tersebut terdapat kegiatan ekonomi maka berikan *tally* juga pada kolom 8 (informasi bangunan sensus ekonomi). Apabila tidak terdapat BSBTT maka berilah tanda (-).

6. Kolom 6 (Jumlah Muatan BSTT Kosong)

Hitung BSTT kosong pada setiap segmen SLS/non SLS dengan memberikan *tally*. Apabila tidak terdapat BSTT kosong maka berilah tanda (-).

Contoh:

Nomor Segmen	Muatan Dominan	Jumlah KK	Jumlah Muatan			Jumlah Bangunan Sensus Ekonomi
			BSTT	BSBTT	BSTT Kosong	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
S001	1	15	= 15	1 = 1	—	16
S002	1	12	= 12	—	—	12
S003	1	19	= 20	—	= 2	22

Gambar 5.19. Contoh pengisian BSTT, BSBTT, dan BSTT kosong

7. Kolom 7 (Jumlah)

Jumlahkan isian kolom 4, kolom 5, dan kolom 6, lalu tuliskan hasil penjumlahannya di kolom 7 (jumlah).

Contoh:

Nomor Segmen	Muatan Dominan	Jumlah KK	Jumlah Muatan			Jumlah Bangunan Sensus Ekonomi
			BSTT	BSBTT	BSTT Kosong	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
S001	1	15	= 15	1 = 1	—	16
S002	1	12	= 12	—	—	12
S003	1	19	= 20	—	= 2	22

Gambar 5.20. Contoh pengisian jumlah muatan

8. Kolom 8 (Informasi Bangunan Sensus Ekonomi)

Informasi mengenai bangunan sensus ekonomi didapatkan ketika Pemeta mengelilingi SLS/Non SLS untuk menghitung BSTT dan BSBTT pada Kolom 4 dan Kolom 5.

Contoh:

Nomor Segmen	Muatan Dominan	Jumlah KK	Jumlah Muatan				Jumlah Bangunan Sensus Ekonomi
			BSTT	BSBTT	BSTT Kosong	Jumlah Kolom (4)+(5)+(6)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
S001	1	15	### ## = 15	1 = 1	—	16	11 = 2
S002	1	12	### ## = 12	—	—	12	—
S003	1	19	### ## ## ### = 20	—	11 = 2	22	—

Gambar 5.21. Contoh pengisian jumlah bangunan sensus ekonomi

9. Baris terakhir adalah jumlah dari masing-masing kolom.

Contoh:

Nomor Segmen	Muatan Dominan	Jumlah KK	Jumlah Muatan				Jumlah Bangunan Sensus Ekonomi
			BSTT	BSBTT	BSTT Kosong	Jumlah Kolom (4)+(5)+(6)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
S001	1	15	### ## = 15	1 = 1	—	16	11 = 2
S002	1	12	### ## = 12	—	—	12	—
S003	1	19	### ## ## ### = 20	—	11 = 2	22	—
Jumlah		46	47	1	2	50	2

Gambar 5.22. Contoh pengisian jumlah masing-masing kolom

Hal-hal yang harus diperhatikan Pemeta adalah sebagai berikut:

1. Dalam penghitungan bangunan sensus, selesaikan terlebih dahulu 1 (satu) segmen sebelum melanjutkan ke segmen lainnya.
2. Identifikasi setiap bangunan sensus yang ditemui, gunanya adalah untuk menentukan muatan dominan dari setiap segmen.
3. Jika hanya diketahui informasi jumlah KK total dalam 1 (satu) SLS, Pemeta harus memproporsikan per segmen dengan mempertimbangkan muatan bangunan sensus tempat tinggal (BSTT).
4. Periksa kembali isian setiap kolom, terutama isian jumlah.



BAB 6. APLIKASI WILKERSTAT

Aplikasi “wilkerstat” adalah aplikasi berbasis android yang dibuat khusus untuk lingkungan kerja Badan Pusat Statistik (BPS), berfungsi untuk mengenali batas wilayah kerja statistik (wilkerstat) dan untuk melakukan pengambilan *Geotagging* foto suatu *landmark* batas wilkerstat maupun *landmark* infrastruktur.

6.1. Pengguna Aplikasi

Aplikasi wilkerstat bisa digunakan untuk pegawai BPS (organik BPS) atau bukan pegawai BPS (non organik BPS). Khusus untuk non organik, dibatasi hanya untuk petugas yang terdaftar di dalam aplikasi. Ada 3 jenis pengguna aplikasi wilkerstat, yaitu:

1. Petugas Pengawas, memiliki fasilitas untuk monitoring Pemeta, melakukan approval *Geotagging*, dan melihat batas wilkerstat.
2. Petugas Pemeta, memiliki fasilitas untuk melakukan *Geotagging landmark* dan untuk melihat batas wilkerstat.
3. Selain petugas (BPS organik), memiliki fasilitas untuk melihat batas wilkerstat.

6.2. Menu Aplikasi

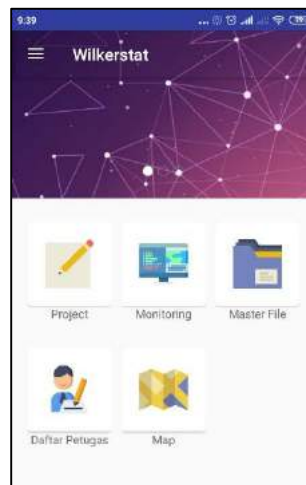
Pada tampilan awal (Home Page) aplikasi wilkerstat untuk Pengawas dan petugas Pemeta terdapat perbedaan pada menu yang diberikan. Berikut menu yang terdapat pada aplikasi wilkerstat Pengawas dan petugas Pemeta beserta fungsinya:

6.2.1. Pengawas

- a. **Project**, menu untuk melakukan pengecekan lapangan secara *offline*, tetapi tidak bisa melakukan *Geotagging*.

- b. **Monitoring**, menu untuk memonitor keberadaan petugas dilapangan, melihat sebaran *landmark* hasil *Geotagging* petugas, mem-verifikasi hasil *Geotagging (approval)* yang lakukan petugas. Aktifitas *approval* dan dilakukan secara *online*.
- c. **Map**, menu untuk melihat peta batas wilkerstat secara keseluruhan di seluruh indonesia secara *online*.
- d. **Master File**, menu untuk menampilkan jumlah dan daftar Master File Desa (MFD) dan bisa ditampilkan secara *offline*.
- e. **Daftar Petugas**, menu untuk melihat daftar petugas Pemeta yang berada dibawah wilayah kerja Pengawas.
- f. **Geometri Repository**, menu untuk men-*download* peta wilkerstat saat *online* agar dapat digunakan pada secara *offline*.

Berikut adalah tampilan awal (home page) dari aplikasi wilkerstat:



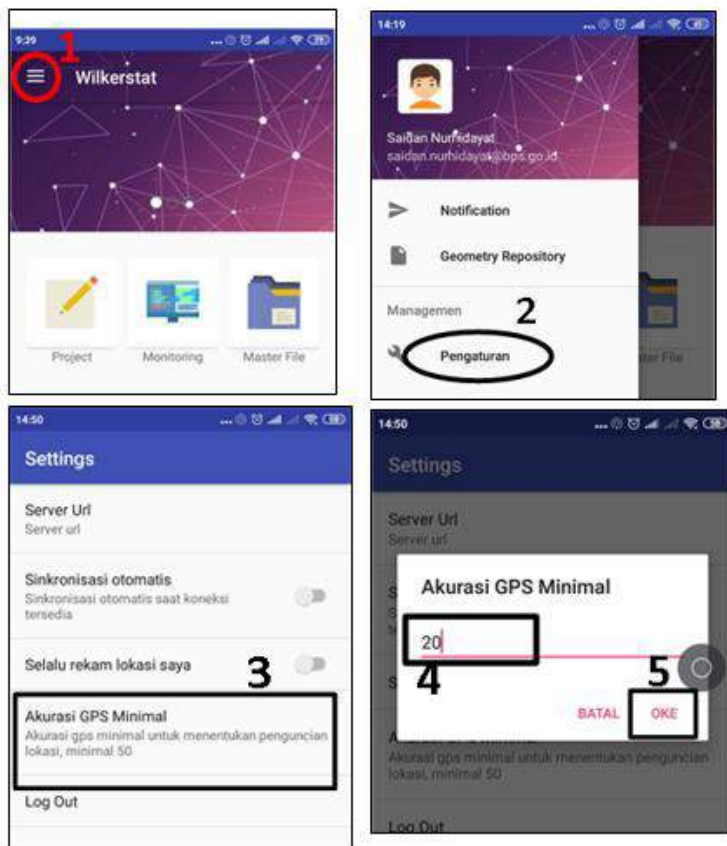
6.2.2. Pemeta

- a. **Project**, yaitu menu untuk melakukan *Geotagging landmark* batas SLS dan *landmark* infrastruktur. Selain itu, menuntut menampilkan peta digital BS wilayah kerjanya dan dilakukan dalam keadaan *online*.
- b. **Map**, menu untuk melihat peta batas wilkerstat secara *online*.
- c. **Master File**, menu untuk menampilkan jumlah master file desa (MFD) seluruh indonesia dan dapat diakses dalam keadaan *offline*.

6.2.3. Pengaturan Umum

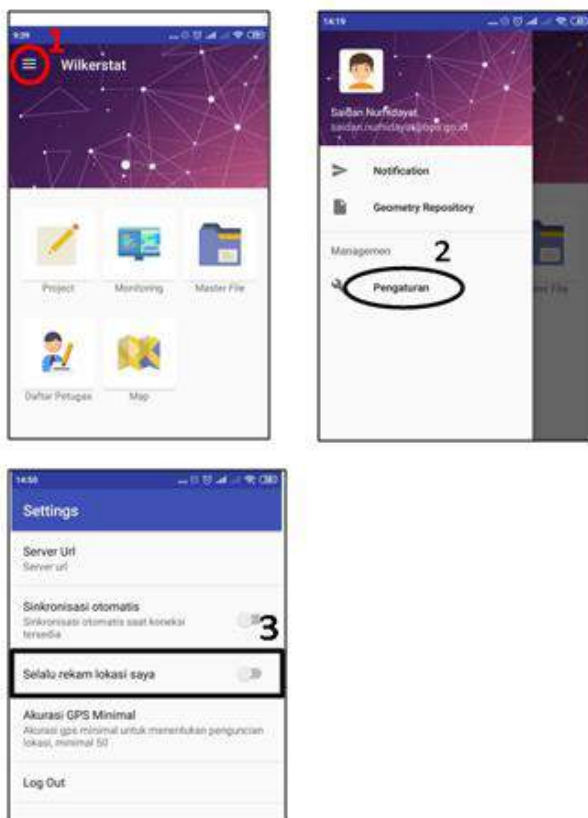
a. Mengubah akurasi GPS

Batas SLS dan *landmark* dapat di-*save* dan di-*upload* apabila tidak melebihi batas akurasi. Akurasi *default* adalah 20 meter, ini dapat diperkecil maupun diperbesar tetapi batas maksimum adalah 50 meter. Cara untuk mengubah akurasi GPS adalah sebagai berikut:



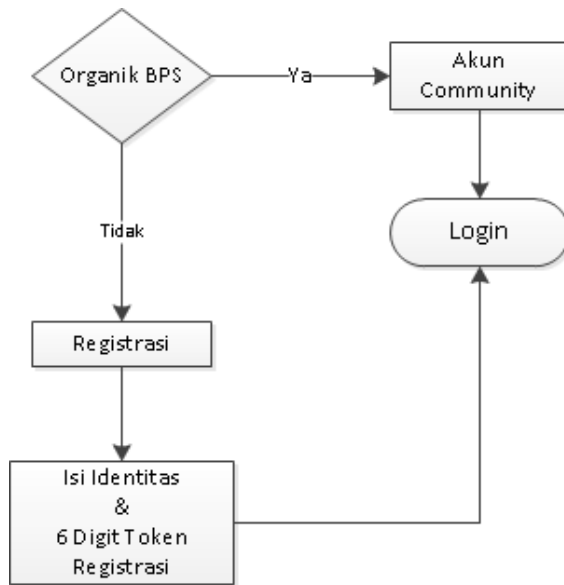
b. Rekam lokasi (pergerakan)

Ketika men-*download* dan membuka aplikasi Wilkerstat, GPS pada android otomatis akan hidup bahkan ketika kita keluar dari aplikasi, GPS akan tetap hidup. Untuk mematikan GPS ketika sedang tidak bekerja caranya adalah sebagai berikut:



6.3. Login dan Registrasi Aplikasi Wilkerstat

Petugas non organik BPS untuk dapat melakukan login ke aplikasi wilkerstat, harus melalui registrasi terlebih dahulu. Ketika akan melakukan registrasi awal, petugas akan mendapatkan kode token dari administrator Kab/Kota. Sedangkan organik BPS dapat langsung login menggunakan *user community*. Berikut adalah alur untuk memulai login ke dalam aplikasi wilkerstat:



Gambar 6.1. Alur Login Aplikasi Wilkerstat

Selanjutnya adalah langkah-langkah untuk melakukan “login” aplikasi Wilkerstat:

1. Buka aplikasi wilkerstat.
2. Klik login. Jika organik BPS, masukkan akun *community*. Jika petugas non organik BPS, klik “daftar disini” untuk registrasi.
3. Non organik BPS, melakukan registrasi dengan mengisi data dan memasukkan nomor token yang diberikan oleh administrator Kab/Kota.
4. Klik “Registrasi”.
5. Selesai.

14:57

Wilkerstat

Email

Password

SIGN IN

Belum memiliki akun? Daftar disini

©Badan Pusat Statistik

14:57

Wilkerstat

Email

Password

SIGN IN

Belum memiliki akun? **Daftar disini**

Non Organik BPS

©Badan Pusat Statistik

15:19

Wilkerstat

Email

Nomor Handphone

Nama

Jenis Kelamin

Pilih jenis kelamin

Password

Konfirmasi Password

Kode Referensi

☐ Saya setuju atas kebijakan penggunaan

REGISTRASI

6.4. Cara Bekerja Secara *Offline*

Geometri repository disediakan untuk mengantisipasi jika tidak ada koneksi internet ketika pelaksanaan lapangan. Melalui menu ini, petugas bisa terlebih dahulu

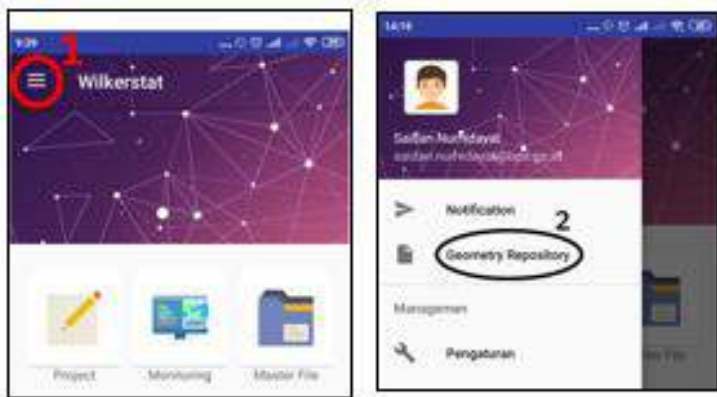
men-*download* peta digital wilkerstat wilayah kerjanya sehingga tetap bisa bekerja walaupun dalam keadaan *offline*.

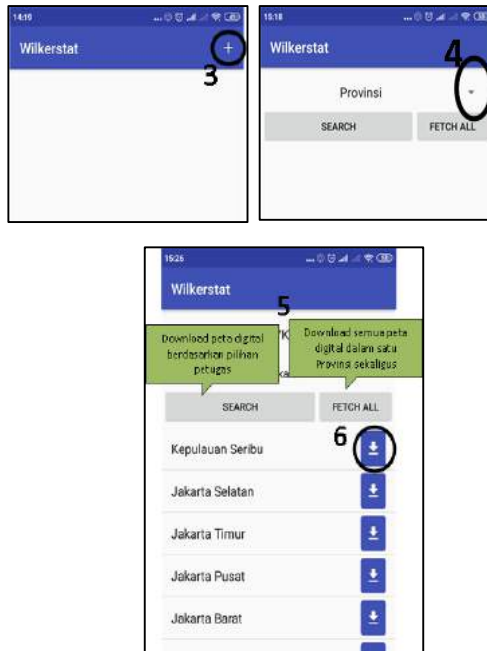
Cara men-download peta digital wilkerstat adalah sebagai berikut:

1. Ketika ada jaringan internet, *download* peta wilkerstat yang akan dikunjungi menggunakan menu "Geometri repository".
2. Pilih ikon garis tiga di pojok kiri atas.
3. Pilih "Geometry Repository".
4. Klik "+" pada pojok kanan atas.
5. Menambahkan project.

Ingat, nama *project* yang dibuat oleh Pemeta harus menggunakan 4 digit kode SLS/non SLS.

6. Tambahkan peta yang sudah di download dari *geometry repository*.
7. Agar saat bekerja *offline Google Maps* masih bisa diakses, tampilkan (*load*) peta *Google Maps* diwilayah yang akan dikunjungi (zoom in/out atau geser).

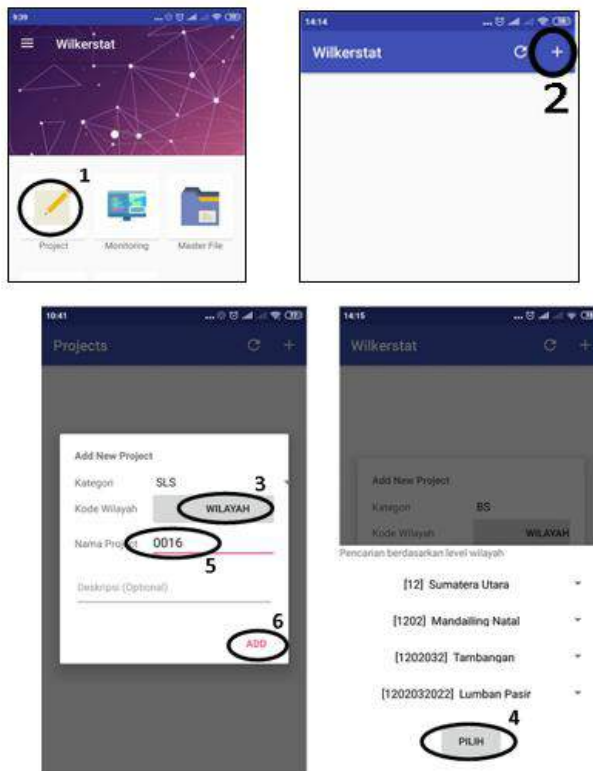




6.5. Cara Membuat Project

Sebelum memulai pekerjaan dilapangan, terlebih dahulu Pemeta harus membuat *project*. Cara membuat project di wilkerstat adalah sebagai berikut:

1. Pilih menu "Project"
2. Pilih "+" pada pojok kanan atas
3. Isikan kode wilayah sesuai wilayah tugas yaitu desa, kemudian klik "pilih"
4. Isikan nama project dengan kode identitas SLS/Non-SLS yang berjumlah empat digit yang didapat dari isian LK-M.
5. Klik "add".
6. Selesai

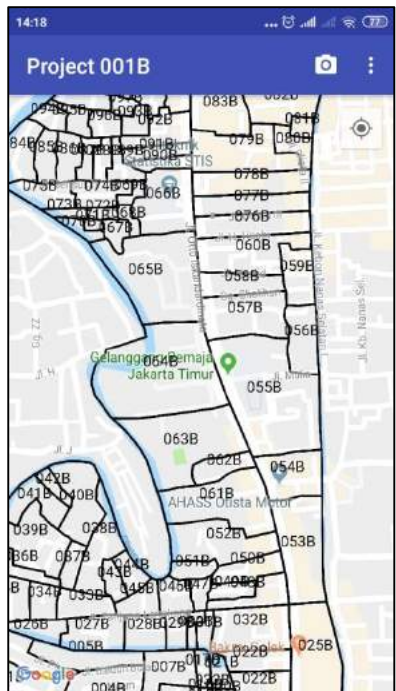
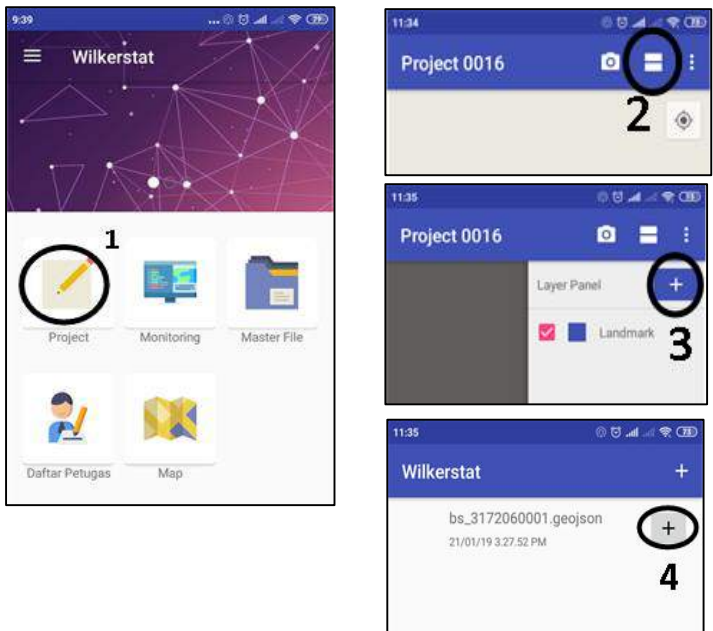


6.5.1. Menambahkan Peta Digital wilkerstat Ke Project

Setelah membuat *project*, tahap berikutnya adalah menambahkan peta wilkerstat kedalam project tersebut. Tambahkan peta wilkerstat yang hanya menjadi wilayah tugas saja.

1. Pilih menu "project".
2. Pilih project yang sudah dibuat sebelumnya, contoh: "0016", maka akan muncul halaman dengan tampilan peta posisi petugas.
3. Klik ikon "kotak" di pojok kanan atas atau *swipe* layar android dari samping kanan ke kiri, akan muncul halaman selanjutnya.
4. Klik "+" pada pojok kanan atas, maka akan muncul peta wilkerstat sesuai wilayah kerja.
5. Pilih peta yang menjadi wilayah kerja dengan klik "+" pada nama peta (format geojson).
6. Keluar dari halaman "layer panel" dan akan muncul peta yang dipilih.

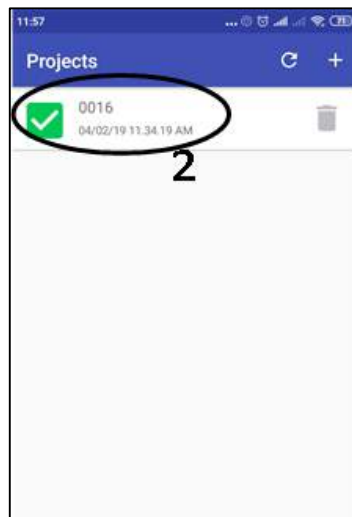
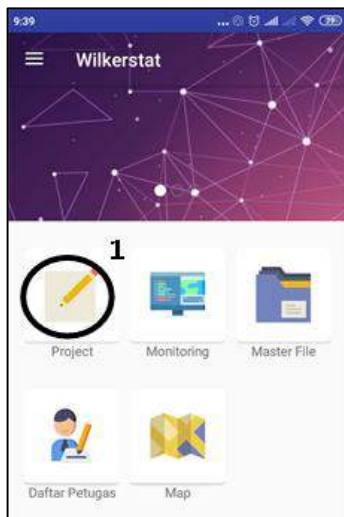
7. Selesai.

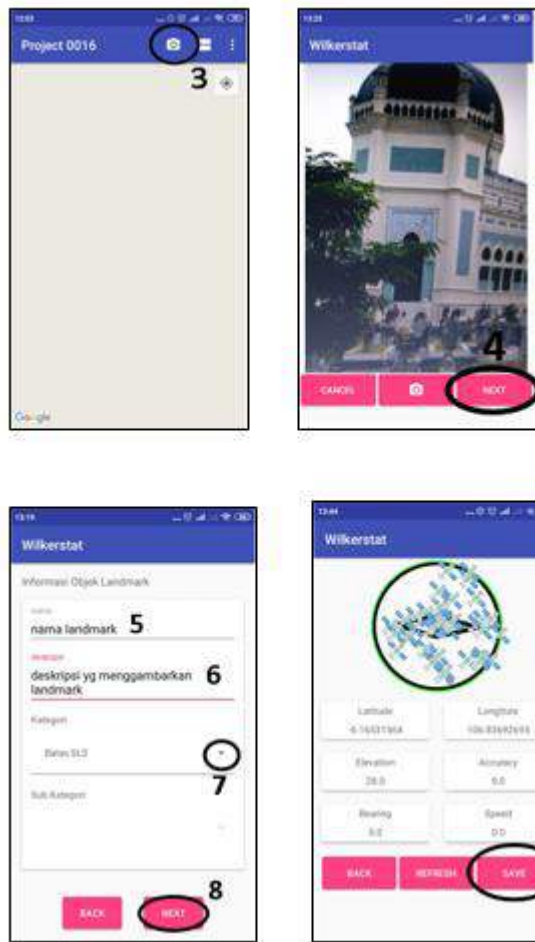


6.5.2. Cara *Geotagging*

Tugas Pemeta adalah melakukan *Geotagging landmark* batas SLS maupun *landmark* infrastruktur. *Geotagging* akan menghasilkan foto lengkap dengan posisi titik koordinatnya. Untuk melakukan *Geotagging* dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pilih menu "project".
2. Pilih *project* yang telah dibuat sebelumnya.
3. Pilih ikon "kamera" pada pojok kanan atas untuk melakukan *Geotagging*.
4. Setelah berhasil melakukan *Geotagging* isikan "nama" dan "deskripsi".
5. Pengisian "nama" sesuaikan dengan nama *landmark*, pengisian "Deskripsi" diisi penjelasan yang menjelaskan sedetail mungkin tentang *landmark* tersebut. contoh:
nama : Mesjid Al-Huda Lumban Pasir
deskripsi : Mesjid Al-Huda terletak disamping rumah no 16 dan didepan rumah no 01
6. Pilih keterangan untuk hasil *Geotagging* tersebut apakah batas SLS atau *landmark*, untuk batas "*landmark*" tambahkan keterangan jenis *landmark* tersebut pada sub kategori.
7. Pilih "next" kemudian "save".
8. Selesai.



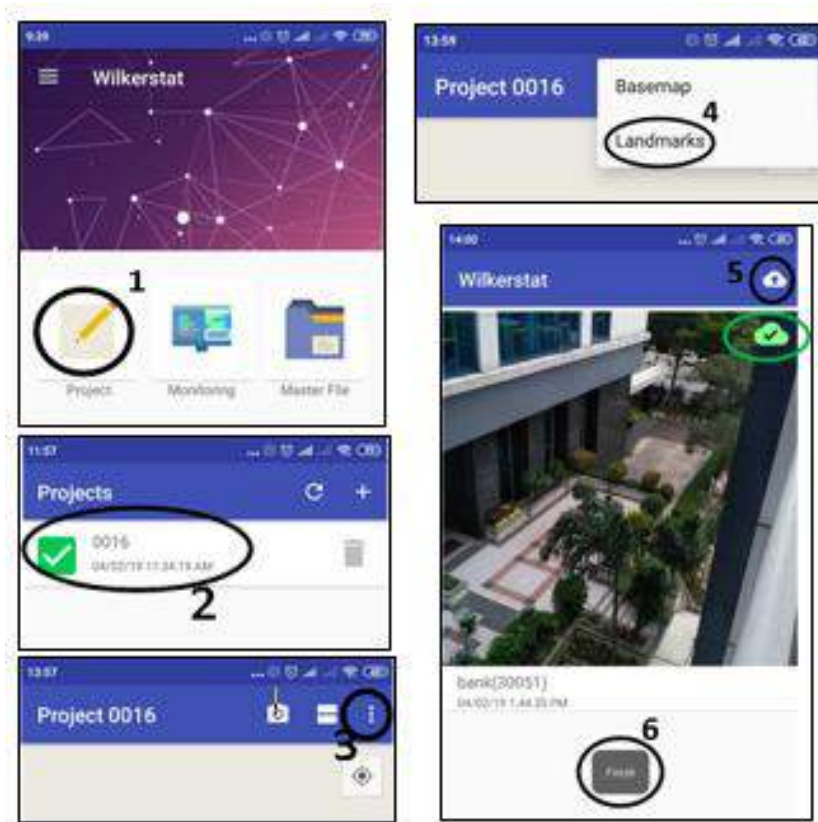


6.5.3. Cara Sinkronisasi Hasil *Geotagging Landmark*

Setelah petugas Pemeta melakukan *Geotagging* dan disimpan dalam android, petugas perlu melakukan *upload* untuk sinkronisasi ke server pusat. Cara melakukan upload/sinkronisasi adalah sebagai berikut:

1. Pilih menu "project".
2. Pilih project yang ingin di *upload*.
3. Pilih ikon "titik tiga" dipojok kanan atas.
4. Pilih "*landmark*" dan akan muncul foto hasil *Geotagging*.
5. Pilih ikon "awan dengan tanda panah keatas" di pojok kanan atas.

6. Pastikan tanda awan pada foto sudah ada tanda “ceklis” yang menandakan bahwa proses upload/sinkronisasi sudah selesai.
7. Pilih “Finish”
8. Selesai.





BAB 7. PERMASALAHAN KHUSUS

1. Bagaimana mekanisme Pemetaan dan perhitungan muatan untuk desa yang hanya memiliki 1 SLS?

Jawab:

- Batas SLS sama dengan batas desa, karena 1 desa hanya memiliki 1 SLS maka dokumen SP2020-RS Blok III hanya terisi 1 baris.
- Identifikasi wilayah dilakukan untuk menentukan batas segmen.
- Penomoran segmen dilakukan saat rekonsiliasi 1.
- Nomor segmen unik dalam 1 desa, dimulai dari Barat Daya *zigzag* ke Timur ke Barat dan seterusnya.
- Pemeta menghitung muatan setiap segmen yang menjadi tanggungjawabnya pada lembar LK-M.
- Hasil dari LK-M tersebut nantinya akan disalin ke RD oleh Pengawas.

2. Bagaimana mekanisme Pemetaan dan perhitungan muatan untuk desa yang hanya memiliki 1 SLS yang dikerjakan oleh lebih dari 1 Pemeta?

Contoh :

satu SLS (Dusun Seberaya) berada di 20 BS, berdasarkan beban tugas rata-rata 10 BS = 1 Pemeta, maka desa tersebut akan dipetakan oleh 2 Pemeta.

Jawab:

- Pemetaan dan penghitungan muatan SLS harus dikerjakan secara tim.
- Tim secara bersama-sama melakukan penelusuran wilayah untuk membuat batas segmen dari seluruh wilayah desa dan menggambarinya di peta. Selain itu, dilakukan juga *Geotagging* pada batas desa.

A. Pengisian SP2020-RS

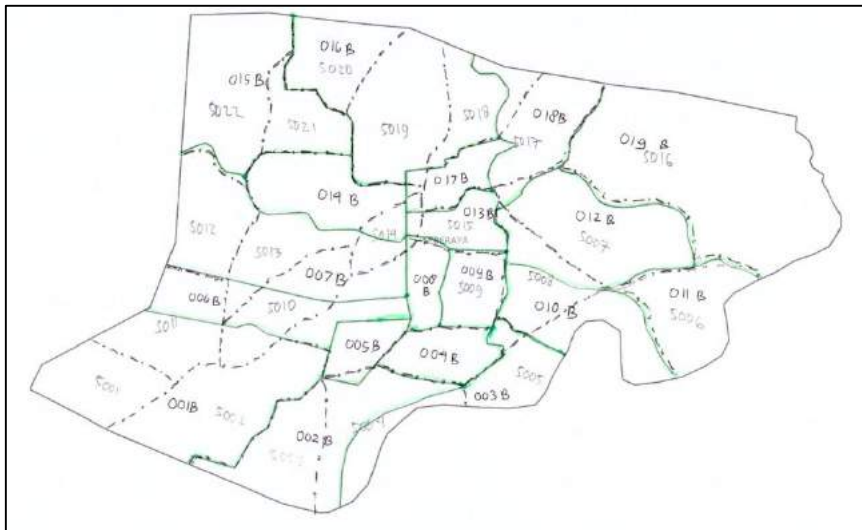
Karena 1 desa hanya memiliki 1 SLS maka dokumen SP2020-RS Blok III hanya terisi 1 baris.

PROV	KAB	KEC	DESA	Nama Desa						
1	2	3	4	5	SEBERAYA					
BLOK III. REKAP SLS										
No	SLS Tingkat 1 (Tuliskan)	Kode *)	Jumlah KK	SLS Tingkat 2 Kode *)	SLS Tingkat 3 Kode *)	SLS Tingkat 4 Kode *)	Perkiraan Biaya Transportasi dari Kantor Desa ke SLS (PP) (Rupiah)	No Urut SLS Terkecil	Identitas Pemeta	
	Dusun	7								
	Nama SLS	Nama Ketua SLS Terkecil		Nama SLS	Nama SLS	Nama SLS				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	SEBERAYA	ARIF NOVAN	582				30.000	001	STEYAN/YUNAR	
2										

Gambar 7.1. Pengisian SLS pada Blok III

B. Penggambaran segmen

Setelah dilakukan penelusuran didapatkan 22 segmen. Nomor segmen unik dalam 1 desa, dimulai dari barat daya *zigzag* ke timur dan seterusnya



Gambar 7.2. Peta WA Desa Seberaya berdasar batas BS dan batas segmen

C. Pengisian Daftar Identifikasi Wilayah Tugas

- Setelah batas segmen terbentuk, Pengawas membagikan tugas kepada Pemeta berdasarkan batas segmen.
- Pembagian segmen dipilih berdasarkan pada satu hamparan agar memudahkan dalam melakukan perhitungan muatan.
- Segmen hasil penelusuran dicatat dalam Daftar Identifikasi Wilayah Tugas dan diberikan nomor segmen pada saat rekonsiliasi 1.
- Pemeta 1 dan 2 mendapatkan tugas menghitung muatan di seluruh segmen.

DAFTAR IDENTIFIKASI WILAYAH TUGAS				
Provinsi		: [12] SUMATERA UTARA		
Kabupaten/Kota		: [11] KARO		
Kecamatan		: [110] TIGA PANAH		
Pengawas		: [] WAHYU S.B.		
Pemeta		: [] STEVAN CAHYA, YUNIAR		
No	Desa / Kelurahan	Blok Sensus	Nama Wilayah SLS/Non SLS	Nomor Segmen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	[015] SEBERAYA		DUSUN SEBERAYA	S 001
2	[015] SEBERAYA		DUSUN SEBERAYA	S 002
3	[015] SEBERAYA		DUSUN SEBERAYA	S 003
4	[015] SEBERAYA		DUSUN SEBERAYA	S 004
...				
	[015] SEBERAYA		DUSUN SEBERAYA	S 021
	[015] SEBERAYA		DUSUN SEBERAYA	S 022

Gambar 7.3. Daftar Identifikasi Wilayah

D. Contoh pembagian tugas:

Pemeta 1 Stevan mendapatkan tugas untuk menghitung muatan pada segmen S001, S002, S003, S004, S005, S006, S007, S008, S009, S010, S011 (11 segmen).

Pemeta 2 Yuniar mendapatkan tugas untuk menghitung muatan pada segmen S012, S013, S014, S015, S016, S017, S018, S019, S020, S021, S022 (11 segmen).

E. Pengisian LK-M Pemeta 1

LEMBAR KERJA PENGHITUNGAN MUATAN (LK-M)

Identitas Wilayah Desa*)

Prov 1 2 Kab 1 1 Kec 1 1 0 Desa 0 1 5

Nama Desa SEBERAYA

Identitas SLS/Non SLS*)

Kode 0 No. Urut 0 0 1

Nama SLS/Non SLS DUSUN SEBERAYA

Identitas Pemeta*)

STEVAN

TOTAL PERHITUNGAN

	kk	BSTT	BSBT	BSTTK	TOTAL	BSEKONOMI
STEVAN	430	463	49	10	522	27
YUNIAR	152	136	30	15	181	15
TOTAL	582	599	79	25	703	42

Nomor Segmen	Muatan Dominan	Jumlah KK	Jumlah Muatan				Jumlah Bangunan Sensus Ekonomi
			BSTT	BSBT	BSTT Kosong	Jumlah Kolom (4)+(5)+(6)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
S001	1	30	III III III III III III III = 35	III = 5	I = 1	41	III = 3
S002	1	20	III III III III III III = 22	III = 3	II = 2	27	I = 1

...

Tambahkan lembar LK-M apabila jumlah segmen yang menjadi tugas Pemeta tersebut lebih dari 6 segmen, sehingga kolom jumlah merupakan jumlah muatan dari seluruh segmen yang menjadi tanggungjawabnya.

S010	3	25	~~III III III~~ ~~III III III~~ I = 26	III = 9	I = 1	31	I = 1
S011	1	20	III III III III II = 22	I = 1	I	23	II = 2
Jumlah		430	463	49	10	522	27

Gambar 7.4. LK-M untuk Pemeta 1

F. Pengisian LK-M Pemeta 2

LEMBAR KERJA PENGHITUNGAN MUATAN (LK-M)							
Identitas Wilayah Desa*) Prov 1 2 Kab 1 1 Kec 1 1 0 Desa 0 1 5 Nama Desa <u>SEBERAYA</u>				Identitas SLS/Non SLS*) Kode 0 No. Urut 0 0 1 Nama SLS/Non SLS <u>DUSUN SEBERAYA</u>			
Identitas Pemeta*) <u>YUNIAR</u>							
Nomor Segmen	Muatan Dominan	Jumlah KK	Jumlah Muatan				Jumlah Bangunan Sensus Ekonomi
(1)	(2)	(3)	BSTT (4)	BSBTT (5)	BSTT Kosong (6)	Jumlah Kolom (4)+(5)+(6) (7)	(8)
5012	1	15	HH HH HH HH = 10	HH = 3	HH = 2	23	HH = 2
5013	1	20	HH HH HH HH HH = 23	HH = 2	HH = 1	26	HH = 1
...							
5022	1	17	HH HH HH HH HH HH = 12	HH = 2	-	14	HH = 2
Jumlah		152	136	30	15	181	15
Kode wilayah *) Disalin dari Blok III dan Blok IV SP 2020-RS Kolom (2) Muatan Dominan: 1. Permukiman biasa 2. Perumahan mewah/elite/real estate 3. Permukiman kumuh 4. Apartemen/kondominium/flat 5. Kos-kosan/kontrakan 6. Pesantren/barak/asrama/sekolah 7. Pertokoan/pasar/perkantoran 8. Pusat perbelanjaan modern/mall 9. Kawasan industri 10. Hotel/tempat rekreasi 11. Lainnya (hutan/kebun, pulau kosong, danau/waduk/rawa, lahan kosong)							

Gambar 7.5. LK-M untuk Pemeta 2

G. Sinkronisasi pengisian LK-M

- Setiap Pemeta memiliki dokumen LK-M masing-masing.
- Pengawas bertugas untuk mengumpulkan kedua dokumen LK-M dari masing masing Pemeta dan menghitung total jumlah KK, BSTT, BSBTT, BSTT kosong dan bangunan sensus ekonomi dari seluruh segmen di 1 SLS dalam 1 desa.
- Penulisan total jumlah dalam 1 SLS 1 desa dapat dilakukan di samping kanan identitas Pemeta pada salah satu lembar LK-M.

LEMBAR KERJA PENGHITUNGAN MUATAN (LK-M)

Identitas Wilayah Desa*				Identitas SLS/Non SLS*			
Prov	Kab	Kec	Desa	Kode	No. Urut		
1	2	1	1	0	0	0	1
Nama Desa				Nama SLS/Non SLS			
SEBERAYA				DUSUN SEBERAYA			
Identitas Pemeta*							
STEVAJ							

TOTAL PERHITUNGAN						
	KK	BSBT	BSBT	BSPTK	TOTAL	BSEKONOMI
STEVAJ	430	443	49	10	522	27
YUNIAR	152	136	30	15	181	15
TOTAL	582	599	79	25	703	42

Gambar 7.6. Pengawas menjumlahkan total muatan Pemeta 1 dan Pemeta 2

H. Pengisian SP2020-RD

Pengawas menyalin seluruh segmen (beserta muatannya) pada lembar LK-M ke dalam SP2020-RD. Penulisan segmen pada daftar RD harus berurutan dari S001, S002, dan seterusnya.

PROV KAB KEC DESA Halaman 1 dari 2 halaman

BLOK V. REKAPITULASI DESA MENURUT SLS*									
No Urut SLS Terkecil	Nama SLS terkecil (lengkap)	No Segmen	Muatan Dominan	Jumlah KK	Jumlah Muatan				Jumlah Bangunan Sensus Ekonomi
					BSTT	BSBTT	BSTT Kosong	Jumlah kolom (5) + (7) + (8)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
001	DUSUN SEBERAYA	S001	1	30	35	5	1	41	3
		S002	1	20	22	3	2	27	1
		S003	1	45	50	5	3	58	2

...

		5020	1	25	27	5	3	35	7
		5021	1	15	18	3	0	21	3
		5022	1	17	12	2	0	19	2
a. Jumlah halaman ini				502	599	79	25	703	42
b. Jumlah kumulatif Blok V sampai dengan halaman sebelumnya				0	0	0	0	0	0
c. Jumlah kumulatif Blok V sampai dengan halaman ini (a+b)				502	599	79	25	703	42

Gambar 7.7. Hasil penyalinan LK-M ke dalam SP2020-RD

3. Bagaimana mekanisme Pemetaan dan perhitungan muatan untuk desa yang tidak memiliki SLS?

Contoh:

desa A tidak memiliki SLS dan terdiri dari 20 BS. Berdasarkan beban tugas ideal 10 BS satu Pemeta, Maka desa tersebut akan dipetakan oleh 2 Pemeta.

Jawab:

- Batas wilayah kerja adalah BS.
- Setiap BS dikategorikan sebagai wilayah Non SLS (berkode 1/2/3/4/5/6).
- Pengisian di SP2020-RS dimasukkan ke **Blok IV**.
- *Geotagging* dilakukan di setiap batas BS.
- Contoh pengisian SP2020-RS; baris pertama adalah nama wilayah non SLS yang merujuk pada BS pertama, dan seterusnya sehingga dalam Blok IV akan terisi 20 baris wilayah non SLS.

PROV		KAB	REC	DESA		Nama Desa		Halaman 2 dari 3 halaman	
1	2	03	1	6	0	1	2	PADANG	MANDALING
BLOK IV. REKAP NON SLS									
No	Kode Wilayah Non SLS *)	Keterangan (Nama Wilayah Non SLS)	Perkiraan Jumlah Muatan		Perkiraan Biaya Transportasi dan Kantor Desa ke Non SLS (PP) (Rp/jam)	No Urut Non SLS	Identitas Pemeta		
			KK	Bangunan					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
1	1	PEMUKIMAN	32	25	2.000	001			
2	5	TOKO & PASAR	42	30	3.000	002			
3	1	SALAH	10	0	5.000	003			
4	1		22	20	1	004			
5	1		3	3	1	005			
6	2		0	0	1	006			
7	1		30	30	1	007			
8	2		0	0	1	008			
9	1		5	5	1	009			
10	2		0	0	10.000	010			

Kode *)
1. Wilayah Bervegetasi Pertanian (Sawah, Ladang, Tegul, Huma, Kebun)
2. Wilayah Bervegetasi Bukan Pertanian (Hutan, Semak Belukar, Sebang, Rumpun, Rawa)
3. Lahan Terbuka (Sampiran Padi, Gajah Padi)
4. Kawasan Terbangun Pemukiman
5. Kawasan Terbangun Bukan Pemukiman
6. Wilayah Perairan

Gambar 7.8. Menuliskan informasi per wilayah non SLS halaman pertama

PROV	KAB	KEC	DESA	Nama Desa	
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
PADANG PAMPALING					Halaman 3 dari 3 halaman

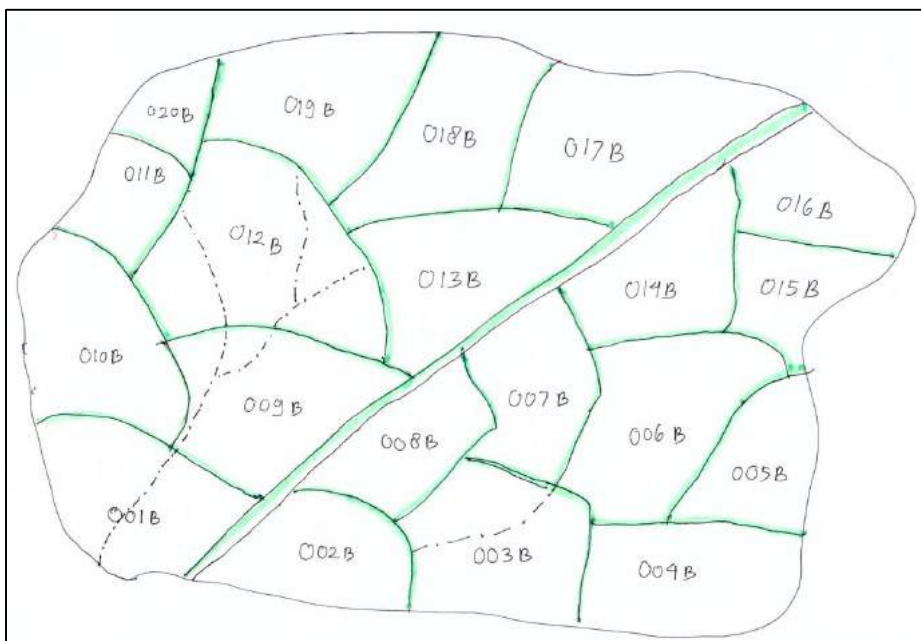
BLOK IV. REKAP NON SLS (LANJUTAN)							
No	Kode Wilayah Non SLS *)	Keterangan (Nama Wilayah Non SLS)	Perkiraan Jumlah Muatan		Perkiraan Biaya Transportasi dari Kantor Desa ke Non SLS (PP) (Rupiah)	No Urut Non SLS	Identitas Pemeta
			KK	Sangunan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11	1	LADANG	10	10	10.000	011	YUNIAR
12	4	PEMUKIMAN	30	40	12.000	012	YUNIAR
13	5	PASAB	50	50	15.000	013	YUNIAR
14	1	LADANG				014	ARIF
15	4	1				015	ARIF
16	5	1				016	ARIF
17	1	1				017	YUNIAR
18	6	1				018	YUNIAR
19	1	1				019	YUNIAR
20	2	HUTAN	0	0	2.000	020	YUNIAR

kode *)

1. Wilayah Bervegetasi Pertanian (Sawah, Ladang, Tegal, Huma, Kebun)
2. Wilayah Bervegetasi Bukan Pertanian (Hutan, Semak Belukar, Sabang, Rumput, Rawai)
3. Lahan Terbuka (Hamparan Pasir, Gumuk Pasir)
4. Kawasan Terbangun Pemukiman
5. Kawasan Terbangun Bukan Pemukiman
6. Wilayah Perairan

Gambar 7.9. Menuliskan informasi per wilayah non SLS halaman selanjutnya

- Pemeta membuat segmen di setiap BS wilayah tugasnya sesuai aturan yang ditetapkan. Contoh: Pada BS 012B, Pemeta membagi BS tersebut menjadi 3 segmen.



Gambar 7.10. Contoh Segmen yang terbentuk

- Pemeta menghitung muatan setiap segmen di BS wilayah kerjanya.

LEMBAR KERJA PENGHITUNGAN MUATAN (LK-M)

Identitas Wilayah Desa*)

Prov 12 Kab 03 Kec 160 Desa 128

Nama Desa PADANG MANDAILING GARUGUR

Identitas SLS/Non SLS*)

Kode 4 No. Urut 012

Nama SLS/Non SLS PEMUKIMAN PENDUDUK

Identitas Pemeta*)

YUNIAR

Nomor Segmen	Muatan Dominan	Jumlah KK	Jumlah Muatan				Jumlah Bangunan Sensus Ekonomi
			BSTT	BSBTT	BSTT Kosong	Jumlah Kolom (4)+(5)+(6)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
S001	1	10	= 15	= 2	-	17	= 5
S002	1	5	= 7	I = 1	-	8	I = 1
S003	1	4	= 6	= 4	-	10	= 2
S004	1	11	= 12	= 1	= 2	15	= 3
Jumlah			40	8	2	50	11

Gambar 7.11. Hasil penghitungan muatan dalam LK-M

4. Bagaimana mekanisme Pemetaan untuk desa yang baru ditemukan saat kegiatan lapangan?

Jawab:

Syarat penambahan desa baru harus memenuhi 5 ketentuan:

- 1) ada SK pembentukan.
- 2) ada wilayahnya.
- 3) ada perangkat desa.
- 4) ada penduduknya.
- 5) sudah operasional.

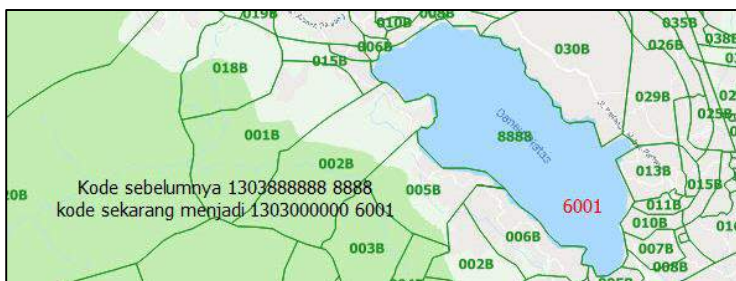
Desa baru harus dilaporkan sampai ke IPDS Kabupaten/kota. Penambahan desa dilakukan lewat aplikasi entri RD. Petugas Pengawas dan Pemeta adalah petugas dari desa awal. Pengerjaan Pemetaan dan pengisian dokumen muatan sesuai dengan kondisi desa baru.

5. Penyesuaian Pengkodean hutan, danau, pulau kosong (555, 888,999) di peta digital 2018 ke pengkodean baru.

Jawab:

A. Wilayah perairan:

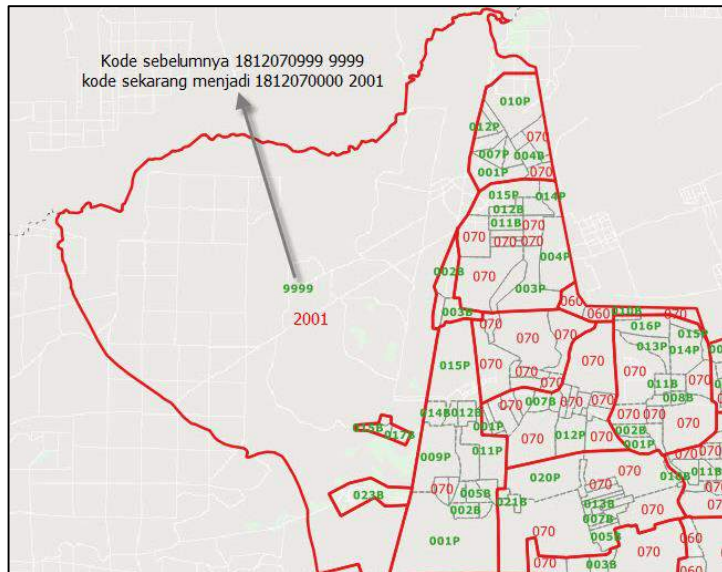
Contoh danau dalam satu kabupaten, sebelumnya diberikan kode misalnya 13038888888888, sekarang berubah menjadi 13030000006001. 1303000000 adalah kode wilayah untuk kabupaten/kota. 6 adalah kode wilayah non SLS untuk perairan. 001 adalah nomor urut dari wilayah non SLS.



Gambar 7.12. Contoh pengkodean danau

B. Wilayah hutan:

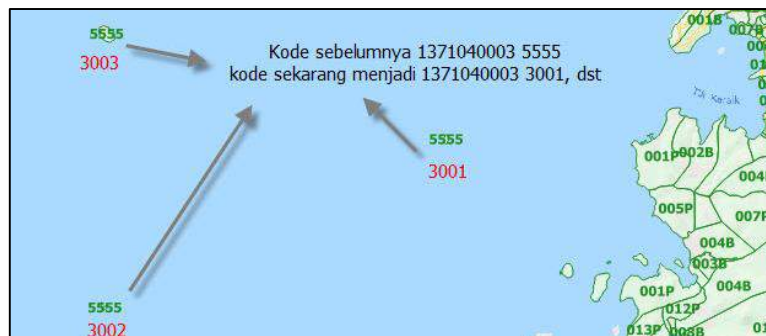
Contoh hutan yang terdapat di satu kecamatan, semula berkode 18120709999999 menjadi 18120700002001. 1812070000 adalah kode wilayah kecamatan. Kode 2 adalah wilayah non SLS vegetasi bukan pertanian. 001 adalah nomor urut wilayah non SLS.



Gambar 7.13. contoh pengkodean hutan

C. Wilayah pulau tidak berpenghuni:

Contoh pulau tak berpenghuni di sebuah desa, semula berkode 13710400035555 menjadi 13710400033001, dimana 1371040003 adalah kode wilayah sampai desa, 3 adalah kode wilayah non SLS untuk lahan terbuka, dan 001 adalah nomor urut wilayah non SLS.



Gambar 7.14. contoh pengkodean pulau tidak berpenghuni

6. Bagaimana mekanisme Pemetaan untuk wilayah yang tidak menggunakan android atau wilayah yang tidak tertangkap sinyal GPS?

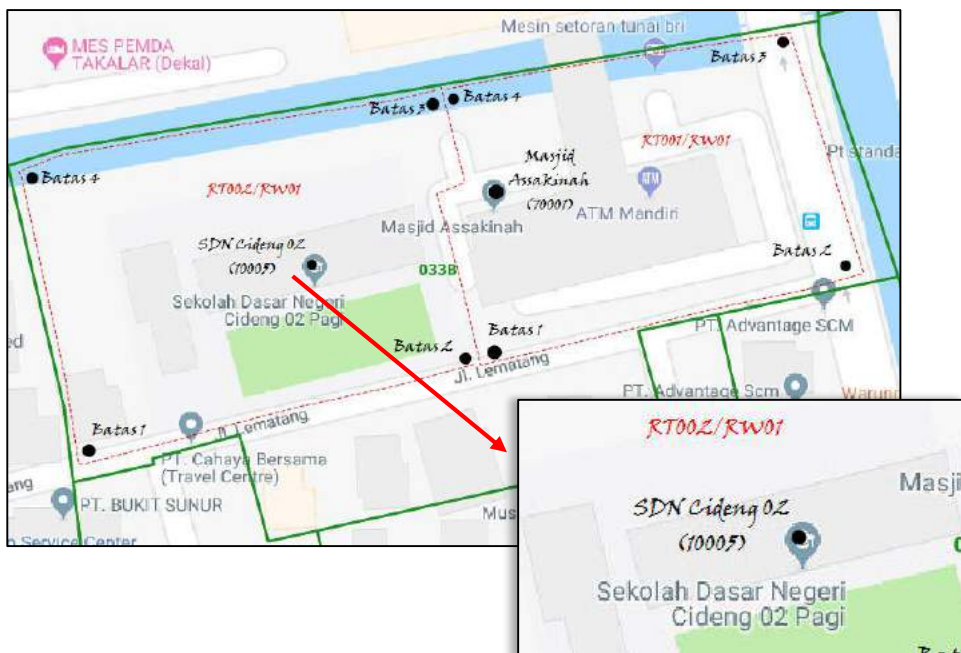
Perlu diingat, hasil *Geotagging* sangat membantu bagi pengolah yang akan melakukan digitasi batas SLS/non SLS. Oleh karena itu, lakukan semaksimal mungkin untuk bisa melakukan *Geotagging*.

Jawab:

1. *Landmark* batas SLS digambarkan dengan lingkaran/titik hitam dengan menuliskan "batas 1", "batas 2", dst sampai pada batas 4.
2. Untuk *landmark* infrastruktur, tandai posisi titik *landmark* pada peta dengan tanda lingkaran hitam. Kemudian, beri nama infrastuktur tersebut. Lengkapi dengan kode infrastruktur dengan cara memberi tanda kurung. Contoh: Masjid Assakinah (70001), SDN Cideng 02 (10005), dan sebagainya.

Lihat pengkodean infrastruktur di **Bab 2 Konsep dan Definisi**

Contoh peta:



Gambar 7.15. pengkodean infrastruktur tanpa menggunakan android

LAMPIRAN

Lampiran 1. Contoh Penentuan Wilayah Tugas

Contoh Pembagian Petugas di Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin.

1. IPDS melakukan pembagian petugas dengan perhitungan sebagai berikut:

Jumlah Desa = 10

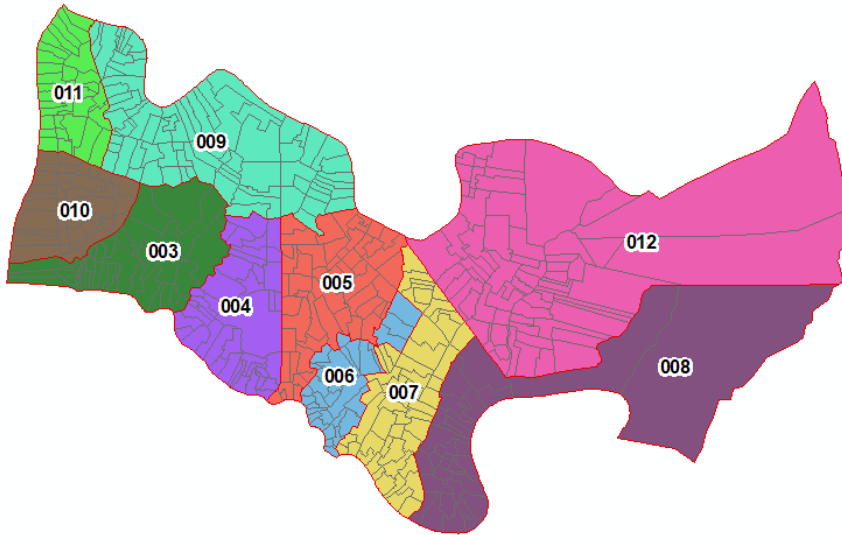
Jumlah BS = 457

Jika beban Pemeta adalah 10 BS, maka ada sejumlah 46 Pemeta.

Jika beban Pengawas adalah 5 Pemeta, maka ada sejumlah 8 Pengawas.

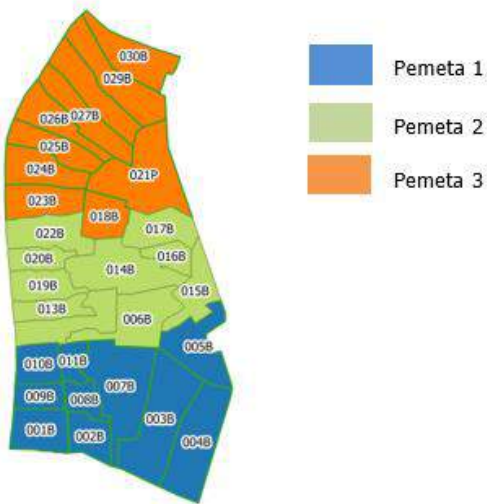
Dari komposisi jumlah BS per desa, diperoleh komposisi petugas sebagai berikut:

ID Desa	Desa	Jumlah BS	Jumlah Pemeta	Pengawas	Pengawas penanggung jawab desa
010	Alalak Selatan	39	4	Pengawas 1	Pengawas 1
003	Kuin Utara	39	4	Pengawas 1 (1 Pemeta) Pengawas 2 (3 Pemeta)	Pengawas 2
004	Pangeran	39	4	Pengawas 2 (2 Pemeta)	Pengawas 2
005	Sungai Miai	54	5	Pengawas 3	Pengawas 3
006	Antasan Kecil Timur	31	3	Pengawas 4	Pengawas 4
007	Surgi mufti	50	5	Pengawas 4 (2 Pemeta) Pengawas 5 (3 Pemeta)	Pengawas 4
008	Sungai Jingah	33	3	Pengawas 5	Pengawas 5
012	Sungai Andai	65	7	Pengawas 6 (5 Pemeta) Pengawas 7 (2 Pemeta)	Pengawas 6
009	Alalak Utara	77	7	Pengawas 7 (3 Pemeta) Pengawas 8 (3 Pemeta)	Pengawas 7
011	Alalak Tengah	30	3	Pengawas 8	Pengawas 8



Gambar 9.1. Sebaran desa di Kecamatan Banjarmasin Utara

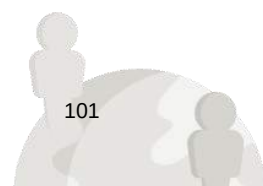
2. Contoh Desa Alalak Tengah (011) terdiri dari 30 BS dan 3 Pemeta (masing-masing 10 BS). Distribusi wilayah tugas berdasarkan peta BS adalah sebagai berikut:



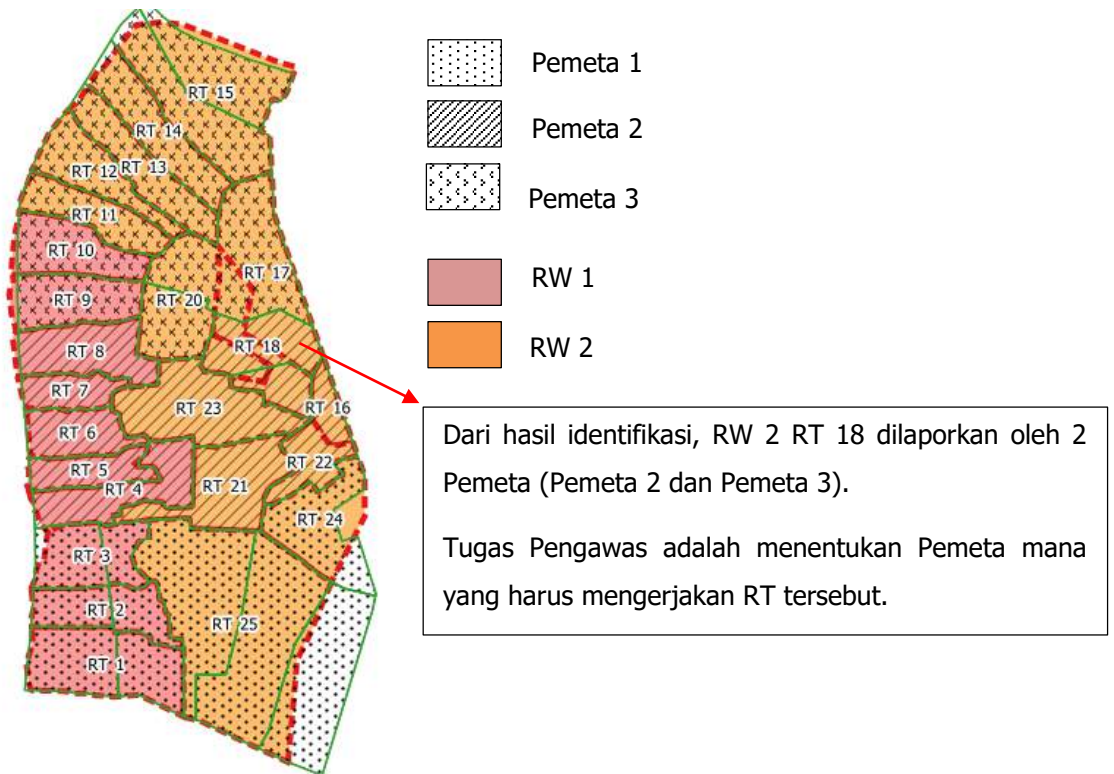
Gambar 9.2. Contoh distribusi wilayah BS Pemeta di dalam satu desa

3. Setelah dilakukan identifikasi wilayah, Desa Alalak Tengah (011) terdiri dari: RW 01 sebanyak 10 RT, RW 02 sebanyak 15 RT. Dengan distribusi wilayah tugas sebagai berikut:

BS	Pemilik BS	SLS tingkat 2	SLS tingkat 1
001 B	Pemeta 1	RW 1	RT 1
002 B	Pemeta 1	RW 1	RT 1
003 B	Pemeta 1	RW 2	RT 25
004 B	Pemeta 1	RW 2	RT 25
005 B	Pemeta 1	RW 2	RT 24
006 B	Pemeta 2	RW 2	RT 21
007 B	Pemeta 1	RW 2	RT 25
008 B	Pemeta 1	RW 1	RT 2
009 B	Pemeta 1	RW 1	RT 2
010 B	Pemeta 1	RW 1	RT 3
011 B	Pemeta 1	RW 1	RT 3
012 B	Pemeta 2	RW 1	RT 4
013 B	Pemeta 2	RW 1	RT 5
014 B	Pemeta 2	RW 2	RT 23
015 B	Pemeta 2	RW 2	RT 22
			RT 16
016 B	Pemeta 2	RW 2	RT 18
017 B	Pemeta 2	RW 2	RT 18
018 B	Pemeta 3	RW 2	RT 20
019 B	Pemeta 2	RW 1	RT 6
020 B	Pemeta 2	RW 1	RT 7
021 P	Pemeta 3	RW 2	RT 17
			RT 18
			RT 20
022 B	Pemeta 2	RW 1	RT 8
023 B	Pemeta 3	RW 1	RT 9
024 B	Pemeta 3	RW 1	RT 10
025 B	Pemeta 3	RW 2	RT 11
026 B	Pemeta 3	RW 2	RT 12
027 B	Pemeta 3	RW 2	RT 13
028 B	Pemeta 3	RW 2	RT 14
029 B	Pemeta 3	RW 2	RT 15
030 B	Pemeta 3	RW 2	RT 15



Distribusi wilayah tugas berdasarkan SLS dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 9.3. Contoh distribusi wilayah SLS Pemeta di dalam satu desa

Lampiran 2. Contoh Daftar Identifikasi Wilayah Tugas

DAFTAR IDENTIFIKASI WILAYAH TUGAS

Provinsi : [31] DKI JAKARTA
 Kabupaten/Kota : [72] JAKARTA TIMUR
 Kecamatan : [060] JATINEGARA
 Pengawas : [] Nama Pengawas
 Pemeta : [] Nama Pemeta

No	Desa / Kelurahan	Blok Sensus	Nama Wilayah SLS/Non SLS	Nomor Segmen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	[001] BIDARA CINA	084B	RT 012 RW 003 RT 009 RW 003 RT 011 RW 003	—
2	[001] BIDARA CINA	085B	RT 011 RW 003	—
3	[001] BIDARA CINA	086B	RT 010 RW 003	—
4	[001] BIDARA CINA	094B	RT 009 RW 003 RT 011 RW 003 RT 010 RW 003	—
5	[001] BIDARA CINA	095B	RT 009 RW 003 RT 010 RW 003 RT 008 RW 003	—
6	[001] BIDARA CINA	096B	RT 008 RW 003 RT 007 RW 003	—
7	[001] BIDARA CINA	093B	RT 006 RW 003 RT 005 RW 003	—
8	[001] BIDARA CINA	097B	RT 007 RW 003	—
9	[001] BIDARA CINA	098B	RT 004 RW 003	—
10	[001] BIDARA CINA	099B	RT 007 RW 003	—

Lampiran 3. Contoh SP2020 RS Tingkat 2



DAFTAR REKAP SLS PEMUTAKHIRAN WILAYAH KERJA STATISTIK

BLOK I. PENGENALAN TEMPAT		
1. Provinsi	DKI JAKARTA	3 1
2. Kabupaten/Kota	JAKARTA TIMUR	7 2
3. Kecamatan	JATINEGARA	0 6 6
4. Desa/Kelurahan	BIDARACINA	0 0 1
5. Alamat Kantor Desa/Kelurahan	GANG KOPER DEPOK NO.22, RT004 RW007, KPE MELAYU, JATINEGARA, JAKARTA TIMUR	
6. Dasar Hukum Pembentukan	UU NO.29 TAHUN 2007	
7. Akses dari Kantor Kecamatan ke Kantor Desa a. Transportasi yang digunakan (pilihan boleh lebih dari 1 kode) b. Perkiraan biaya transportasi dari kantor kecamatan ke kantor desa	☒ 1. Angkutan bertrayek atau teratur ☐ 2. Angkutan sewa/carter ☐ 4. Jalan kaki Rp. 7.000	1 7 0 0 0
8. Wilayah SLS		
a. Apakah ada SLS di bawah desa?	☒ Ya ☐ 2. Tidak (ke rincian 9)	1
b. Jumlah tingkatan SLS di bawah desa	2	2
c. Jumlah SLS terkecil	188	1 8 8
d. Apakah tersedia peta SLS?	☒ Ya ☐ 2. Tidak	1
9. Jumlah Wilayah Non SLS	0	0 0 0

BLOK II. KETERANGAN PETUGAS	
Uraian (1)	Pengawas (2)
1. Nama Petugas	WAHYU SETYO BUDI
2. NIP/NIMS	999 59182
3. No. HP	08123456789
4. Tanggal Pelaksanaan	24 APRIL 2019
5. Tanda Tangan	
6. Mengetahui Kepala Desa/Lurah :	Tanggal: (Materai, tanda tangan, cap/stempel) ()

PROV **31** KAB **72** KEC **060** DESA **001**

Nama Desa
BIDARACINA

Halaman **1** dari **13** halaman

BLOK III. REKAP SLS

No	SLS Tingkat 1 (Tuliskan)		Jumlah KK	SLS Tingkat 2		SLS Tingkat 3	SLS Tingkat 4	Perkiraan Biaya Transportasi dari Kantor Desa ke SLS (Rp) (Rupiah)	No Urut SLS Terkecil	Identitas Pemeta
	Nama SLS	Kode *)		Nama SLS	Kode *)					
	SLS Tingkat 1 (Tuliskan) R.T.			SLS Tingkat 2 RW						
	Nama Ketua SLS Terkecil (3)			Nama SLS (5)						
(1)			(4)			(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	001	MODI ARINA	45	001				7000	001	YUNIAR S
2	002	MULYONO	43	001				7000	002	YUNIAR S
3	003	ADIN S	99	001				7000	003	YUNIAR S
4	004	BOY ENOVA	66	001				7000	004	YUNIAR S
5	005	WILSON P	76	001				7000	005	YUNIAR S
6	006	AGUS EFFENDI	87	001				7000	006	YUNIAR S
7	007	ANDI ANDYA	97	001				7000	007	YUNIAR S
8	008	SAPIN H	86	001				7000	008	STEVEN C
9	009	IMAM S	75	001				7000	009	STEVEN C
10	010	SURADI	92	002				7000	010	STEVEN C
11	011	IBRQHIM	93	002				7000	011	STEVEN C
12	012	HADI NASITG	84	002				7000	012	STEVEN C
13	013	IRIN SOBIRIN	87	002				7000	013	STEVEN C
14	014	ANG TJANG	89	002				7000	014	STEVEN C
15	015	H. MUCH A.	71	002				7000	015	STEVEN C

- kode *)
 1. RT
 2. RW
 3. Jorong
 4. Korong

5. Lingkungan
 6. Banjar
 7. Dusun
 8. Lainnya

PROV 3 1
 KAB 7 2
 KEC 0 6 0
 DESA 0 0 1

Nama Desa BIDARA CINA

Halaman 13 dari 13 halaman

BLOK IV. REKAP NON SLS

No	Kode Wilayah Non SLS *)	Keterangan (Nama Wilayah Non SLS)	Perkiraan Jumlah Muatan		Perkiraan Biaya Transportasi dari Kantor Desa ke Non SLS (pp) (Rupiah)	No Urut Non SLS	Identitas Pemeta
			KK	Bangunan			
(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	—	—	—	—	—	—	—
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Kode *)

1. Wilayah Bervegetasi Pertanian (Sawah, Ladang, Tegol, Huma, kebun)
2. Wilayah Bervegetasi Bukan Pertanian (Hutan, Semak Belukar, Sabang, Rumpuk, Pawa)
3. Lahan Terbuka (Hamparan Pasir, Gumak Pasir)

4. Kawasan Terbangun Pemukiman
5. Kawasan Terbangun Bukan Pemukiman
6. Wilayah Perairan

BLOK V. CATATAN



BLOK I. PENGENALAN TEMPAT			
1. Provinsi	JAWA BARAT		3 2
2. Kabupaten/Kota	BEKASI		7 5
3. Kecamatan	BEKASI TIMUR		0 4 0
4. Desa/Kelurahan	DUFEN JAYA		0 0 7
5. Alamat Kantor Desa/Kelurahan	DUFEN JAYA, BEKASI TIMUR		
6. Dasar Hukum Pembentukan	UU NO.32 TAHUN 1982		
7. Akses dari Kantor Kecamatan ke Kantor Desa	☒ 1. Angkutan bertrayek atau teratur ☐ 2. Angkutan sewa/carter ☐ 4. Jalan kaki		1
a. Transportasi yang digunakan (pilihan boleh lebih dari 1 kode)			
b. Perkiraan biaya transportasi dari kantor kecamatan ke kantor desa	Rp. 10.000		1 0 0 0 0
8. Wilayah SLS			
a. Apakah ada SLS di bawah desa?	☒ Ya ☐ 2. Tidak (ke rincian 9)		1
b. Jumlah tingkatan SLS di bawah desa	3		3
c. Jumlah SLS terkecil	180		1 8 0
d. Apakah tersedia peta SLS?	☒ Ya ☐ 2. Tidak		1
9. Jumlah Wilayah Non SLS	0		0 0 0

BLOK II. KETERANGAN PETUGAS	
Uraian	Pengawas
(1)	(2)
1. Nama Petugas	WAHYU SETYO BUDI
2. NIP/NIMS	399 59 182
3. No. HP	08123456789
4. Tanggal Pelaksanaan	24 APRIL 2019
5. Tanda Tangan	
6. Mengetahui Kepala Desa/Lurah :	Tanggal: (nama, jabatan, dan tanggal)

3

2

7

5

0

4

0

0

7

PROV KAB KEC DESA Nama Desa
 3 2 7 5 0 4 0 0 7 DUREN JAYA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kode Wilayah Non SLS *)

(1) (2) (3)

Keterangan
(Nama Wilayah Non SLS)

Perkiraan Jumlah Muatan

KK Bangunan

(4) (5)

Perkiraan Biaya
Transportasi dari Kantor
Desa ke Non SLS (PP)
(Rupiah)

(6)

No Urut
Non SLS

(7)

Identitas Pemeta

(8)

Halaman 13 dari 13 halaman

BLOK IV. REKAP NON SLS

kode *)

1. Wilayah Bervegetasi Pertanian (Sawah, Ladang, Tegul, Huma, Kebun)
2. Wilayah Bervegetasi Bukan Pertanian (Hutan, Semak Belukar, Sabang, Rumpul, Rawa)
3. Lahan Terbuka (Hamparan Pasir, Gumak Pasir)

4. Kawasan Terbangun Pemukiman
5. Kawasan Terbangun Bukan Pemukiman
6. Wilayah Perairan

BLOK V. CATATAN

111

Lampiran 5. Contoh SP2020-RS dengan Wilayah Non SLS



DAFTAR REKAP SLS PEMUTAKHIRAN WILAYAH KERJA STATISTIK

BLOK I. PENGENALAN TEMPAT		
1. Provinsi	SUMATERA UTARA	1 2
2. Kabupaten/Kota	PADANGSIDEMPUAN	7 7
3. Kecamatan	PADANGSIDEMPUANTENGARA	0 1 0
4. Desa/Kelurahan	HUTA KOSG	0 0 5
5. Alamat Kantor Desa/Kelurahan	HUTA KOSG	
6. Dasar Hukum Pembentukan	UU NO 32-TAHUN 1982	
7. Akses dari Kantor Kecamatan ke Kantor Desa a. Transportasi yang digunakan (pilihan boleh lebih dari 1 kode)	1. Angkutan bertrayek atau teratur 2. Angkutan sewa/carter 3. Jalan kaki	4
b. Perkiraan biaya transportasi dari kantor kecamatan ke kantor desa	Rp. 0	0 0 0 0 0 0 0 0
8. Wilayah SLS		
a. Apakah ada SLS di bawah desa?	1. Ya 2. Tidak (ke rincian 9)	2
b. Jumlah tingkatan SLS di bawah desa		
c. Jumlah SLS terkecil		
d. Apakah tersedia peta SLS?	1. Ya 2. Tidak	
9. Jumlah Wilayah Non SLS	3	0 0 3

BLOK II. KETERANGAN PETUGAS	
Uraian	Pengawas
(1)	(2)
1. Nama Petugas	WAHYU SETYO BUDI
2. NIP/NIMS	999 59 182
3. No. HP	08123456789
4. Tanggal Pelaksanaan	24 APRIL 2019
5. Tanda Tangan	
6. Mengetahui Kepala Desa/Lurah :	Tanggal: (nama, jabatan, tempat)

PROV **12** KAB **77** KEC **010** DESA **005** Nama Desa **HUTA KOJE** Rollman 1 dari 2 halaman

BLOK III. REKAP SLS

No	SLS Tingkat 1 (Tuliskan)		Jumlah KK	SLS Tingkat 2	SLS Tingkat 3	SLS Tingkat 4	Perkiraan Biaya Transportasi dari Kantor Desa ke SLS (pp) (Rupiah)	No Urut SLS Terkecil	Identitas Pemeta
	Nama SLS (2)	Kode *) (1)		Nama SLS (5)	Kode *) (6)	Nama SLS (7)			
(1)			(4)				(8)	(9)	(10)
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

kode *)
1. RT
2. RW
3. Jorong
4. Karang

5. Lingkungan
6. Banjar
7. Dusun
8. Lainnya

PROV KAB KEC DESA Nama Desa
1 2 7 7 0 1 0 0 0 5 HUTA KOLE

BLOK IV. REKAP NON SLS									
No	Kode Wilayah Non SLS *)	Keterangan (Nama Wilayah Non SLS)	Perkiraan Jumlah Muatan		Perkiraan Biaya Transportasi dari Kantor Desa ke Non SLS (PP) (Rupiah)	No Urut Non SLS	Identitas Pemeta		
			KK	Bangunan					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
1	1	LADANG	20	30	5000	001	STEVEN C.A.K.		
2	2	HUTAN	0	0	5000	002	STEVEN C.A.K.		
3	4	PEMUKIMAN PENDUDUK	120	105	5000	003	STEVEN C.A.K.		
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

kode *)

- 1. Wilayah Bervegetasi Pertanian (Sawah, Ladang, Tegall, Huma, Kebun)
- 2. Wilayah Bervegetasi Bukan Pertanian (Hutan, Semak Belukar, Sabang, Rumpuk, Rawa)
- 3. Lahan Terbuka (Hamparan Pasir, Gumak Pasir)
- 4. Kawasan Terbangun Pemukiman
- 5. Kawasan Terbangun Bukan Pemukiman
- 6. Wilayah Perairan

BLOK V. CATATAN									

Lampiran 6. Contoh SP2020 Lembar Kerja Perhitungan Muatan (LK-M)

LEMBAR KERJA PENGHITUNGAN MUATAN (LK-M)

Identitas Wilayah Desa*)

Prov Kab Kec Desa

3	1
---	---

7	2
---	---

0	6	0
---	---	---

0	0	1
---	---	---

Nama Desa

BIDARACINA

Identitas SLS/Non SLS*)

Kode No. Urut

0

0	3	0
---	---	---

Nama SLS/Non SLS

RT 007 RW 003

Identitas Pemeta*)

YUNIAR S

Nomor Segmen	Muatan Dominan	Jumlah KK	Jumlah Muatan				Jumlah Bangunan Sensus Ekonomi
			BSTT	BSBTT	BSTT Kosong	Jumlah Kolom (4)+(5)+(6)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
S001	1	15	11111111111111111 = 15	1 = 1	-	16	11 = 2
S002	1	12	111111111111 = 12	-	-	12	-
S003	1	19	1111111111111111111 = 20	-	11 = 2	22	-
Jumlah		46	47	1	2	50	2

Kode wilayah *)

Disalin dari Blok III dan Blok IV SP2020-RS

Kolom (2) Muatan Dominan:

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Permukiman biasa 2. Perumahan mewah/elite /real estate 3. Permukiman kumuh 4. Apartemen/kondominium/flat 5. Kos-kosan/kontrakan 6. Pesantren/barak/asrama/sekolah | <ol style="list-style-type: none"> 7. Pertokoan/pasar/perkantoran 8. Pusat perbelanjaan modern/mall 9. Kawasan industri 10. Hotel/tempat rekreasi 11. Lainnya (hutan/kebun, pulau kosong, danau/waduk/rawa, lahan kosong) |
|---|--|

Lampiran 7. Contoh SP2020 RD



DAFTAR REKAP DESA PEMUTAKHIRAN WILAYAH KERJA STATISTIK

BLOK I. PENGENALAN TEMPAT		
1. Provinsi	DKI JAKARTA	3 1
2. Kabupaten/Kota	JAKARTA TIMUR	7 2
3. Kecamatan	JATINEGARA	0 6 0
4. Desa/Kelurahan	BIDARA CINA	0 0 1
5. Alamat Kantor Desa / Kelurahan	GANG. KOBER DEPOK NO. 22, RT. 004 RW. 007, KP. MELAYU, JATINEGARA, JAKARTA TIMUR	

BLOK II. RINGKASAN		
1. Jumlah SLS terkecil <i>No urut terbesar kolom 1 Blok V</i>	1 8 8	
2. Jumlah wilayah non SLS <i>No urut terbesar kolom 2 Blok VI</i>	0 0 0	
3. Jumlah muatan wilayah SLS (BSTT+BSBTT+BSTT Kosong) <i>Salin dari Blok V rincian jumlah c kolom (9)</i>	8 9 7 6	
4. Jumlah muatan wilayah Non SLS (BSTT+BSBTT+BSTT kosong) <i>Salin dari Blok VI rincian jumlah c kolom (10)</i>	0 0 0 0	

BLOK III. KETERANGAN PETUGAS	
Uraian	Pengawas
(1)	(2)
1. Nama	WAHYU SETYO BUDI
2. NIP/NIMS	99959182
3. No HP	08123456789
4. Tanggal	24 APRIL 2019
5. Tanda Tangan	

BLOK IV. CATATAN

PROV	KAB	KEC	DESA	Halaman 1 dari 1 Halaman						
31	72	060	001	BLOK V. REKAPITULASI DESA MENURUT SLS*						
No Urut SLS Terkecil	Nama SLS terkecil (lengkap)	No Segmen	Muatan Dominan	Jumlah KK	Jumlah Muatan				Jumlah Bangunan Sensus Ekonomi	
					BSTT	BSBT	BSTT Kosong	Jumlah kolom (6) + (7) + (8)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
001	RT 001 RW 001	S001	1	17	19	3	0	22	1	
		S002	1	20	21	2	0	23	1	
002	RT 002 RW 001	S001	1	15	18	0	0	18	0	
		S002	1	16	20	1	2	23	0	
		S003	1	10	13	2	0	15	0	
		S004	1	8	9	1	0	10	0	
003	RT 003 RW 001	S001	3	17	19	3	0	22	1	
		S002	3	16	21	2	1	24	0	
		S003	3	18	24	1	1	26	1	
004	RT 004 RW 001	S001	2	45	45	0	2	47	2	
005	RT 005 RW 001	S001	1	11	15	0	1	16	0	
		S002	1	14	17	0	0	17	1	
		S003	1	13	15	4	3	22	2	
		S004	1	17	19	0	0	19	3	
		S005	1	8	10	2	0	12	1	
		S006	1	9	13	1	0	14	0	
006	RT 006 RW 001	S001	7	22	25	0	2	27	10	
		S002	7	24	26	3	1	30	11	
007	RT 007 RW 001	S001	1	17	20	0	1	21	2	
		S002	2	18	19	0	3	22	1	
		S003	1	21	24	0	2	26	0	
008	RT 008 RW 001	S001	3	24	25	1	1	27	0	
		S002	1	16	20	0	1	21	1	
009	RT 009 RW 001	S001	1	9	11	7	2	20	0	
		S002	3	22	23	1	1	25	1	
a. Jumlah halaman ini				427	491	34	24	549	39	
b. Jumlah kumulatif Blok V sampai dengan halaman sebelumnya				0	0	0	0	0	0	
c. Jumlah kumulatif Blok V sampai dengan halaman ini (a+b)				427	491	34	24	549	39	

Keberangan:
*) Isian Blok V di salin dari LK-M

BLOK V. REKAPITULASI DESA MENURUT SLS*

[illegible]

METHODS

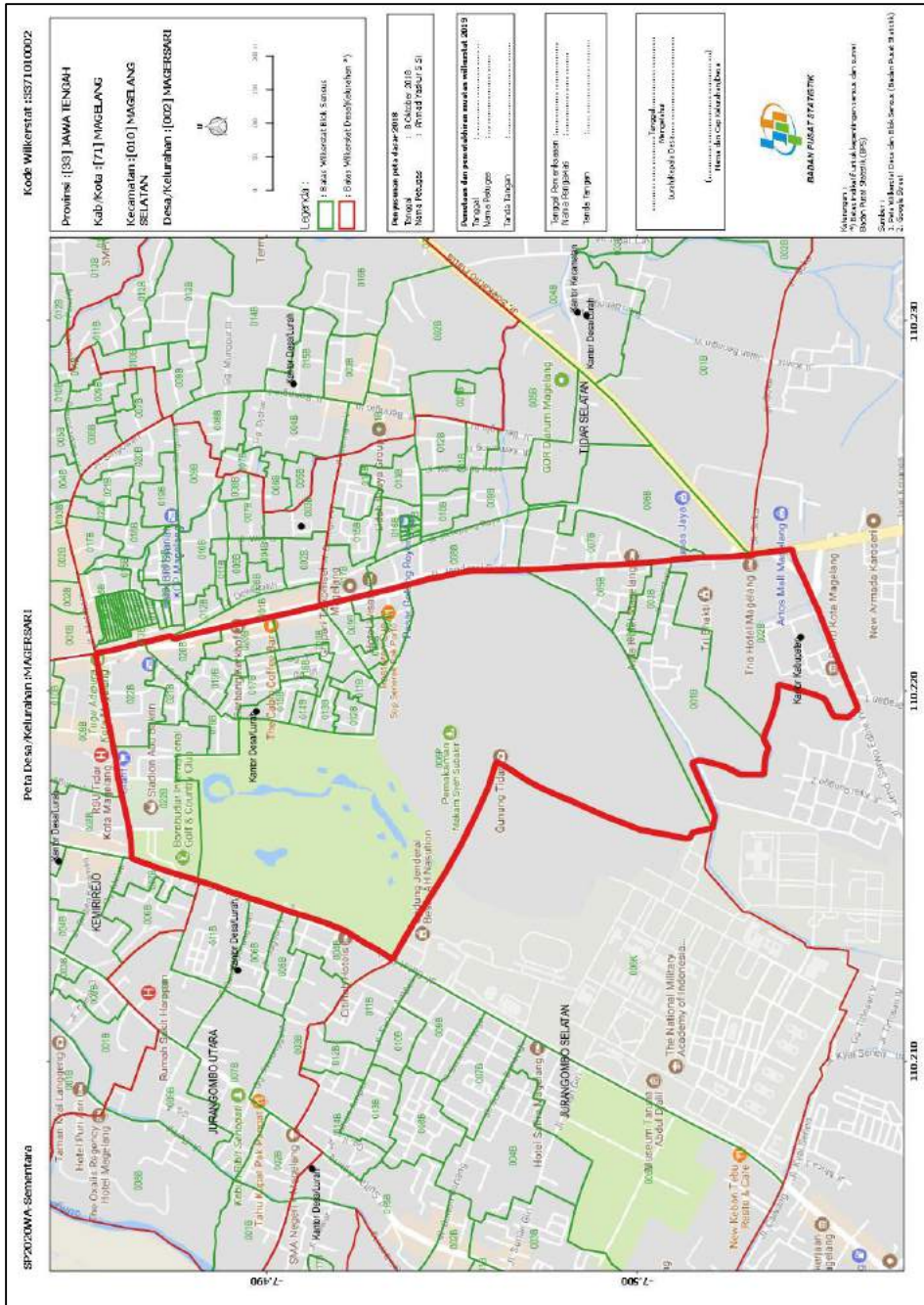
* $\text{mmHg} = 133 \text{ Pa}$

[illegible]

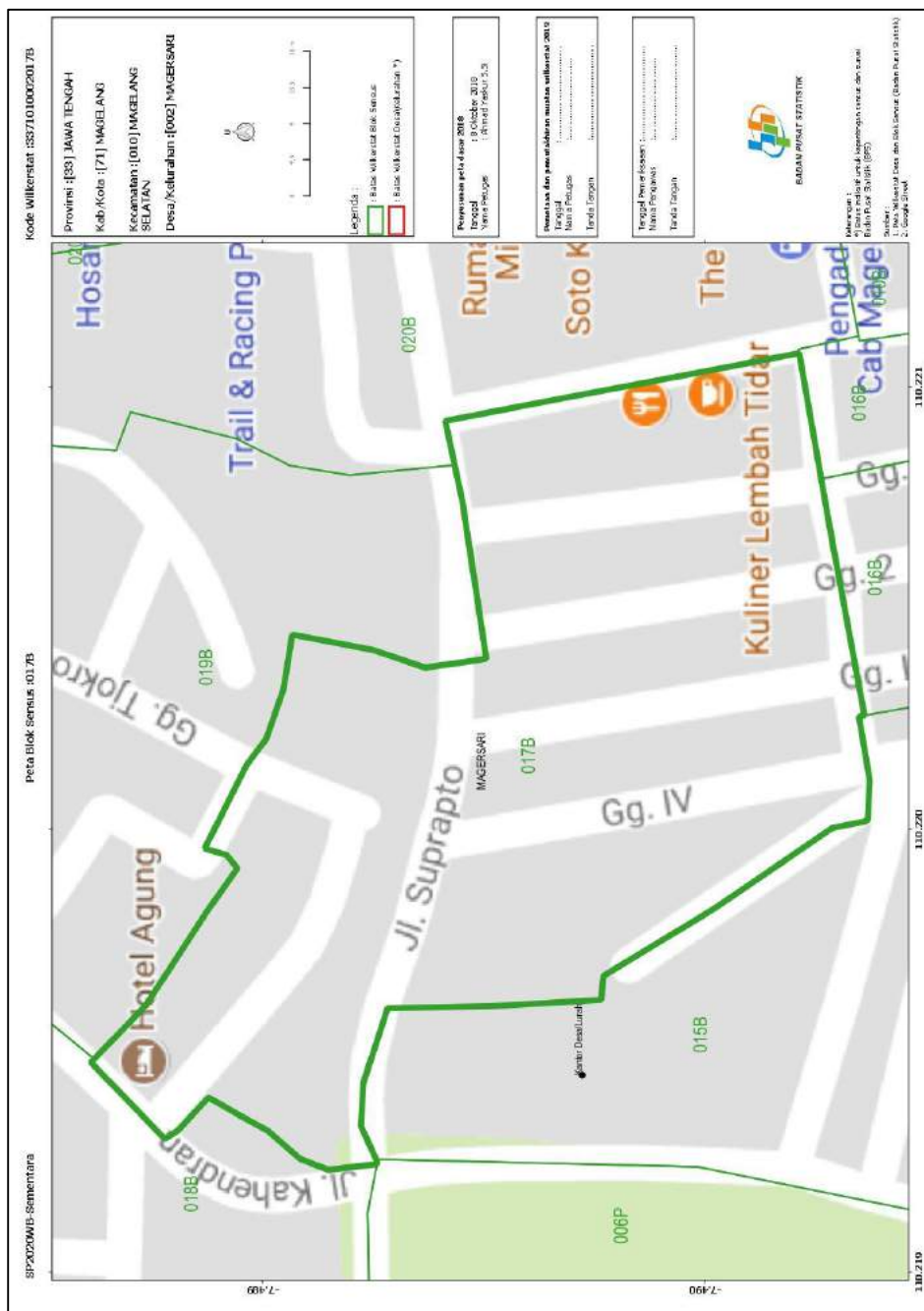
Keterangan:

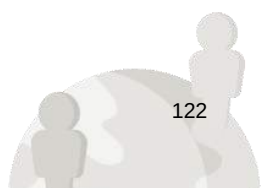
*) Isian Blok VI di salin dari LK-M

Lampiran 8. Contoh SP2020WA-Sementara



Pedoman Teknis Petugas Pemeta







DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No 6-8, Jakarta 10710

Telp: (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax: (021) 3857046

Homepage: <http://www.bps.go.id> Email: bpsHQ@bps.go.id